

Buku berjudul *Meluruskan Kiblat Bangsa* merupakan kumpulan dari artikel penulis yang pernah dimuat di Koran Jawa Pos, Seputar Indonesia (Sindo), dan Majalah Matan pada akhir 2012 hingga 2014.

Topik yang dibicarakan buku ini pun sangat beragam. Mulai dari soal politik, sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, hingga Persyarikatan Muhammadiyah. Beberapa topik ini dikemukakan sebagai refleksi penulis terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik sehingga diberitakan secara luas oleh media massa.

Buku ini diberi judul *Meluruskan Kiblat Bangsa* dengan merujuk pada salah satu artikel yang pernah dimuat Koran Sindo. Disamping itu, penulis juga terinspirasi pemikiran yang berulang kali diutarakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA.

Dalam berbagai kesempatan, beliau menganjurkan agar bangsa ini kembali ke jalur yang benar. Salah satu caranya, elit negeri ini harus menyatukan kata dengan perbuatan. Tegasnya, elit negeri ini harus benar-benar berintegritas. Tausiah Pak Din terasa sangat relevan karena sempat terjadi fenomena "kebohongan publik" sehingga mengundang perhatian sejumlah elit agama dan guru bangsa.

Pemimpin publik negeri ini juga harus bekerja dengan berorientasi pada prestasi, bukan sekedar pencitraan. Meminjam istilah dalam sosiologi, hidup memang seharusnya berorientasi pada prestasi (achievement orientation). Berdasarkan prestasi itulah seseorang akan dikenang generasi sesudahnya. Dengan demikian persoalan siapa dia tidak begitu penting. Yang terpenting adalah apa prestasi yang sudah dicapainya.

Karena itulah ajakan untuk bekerja dengan semangat mengabdikan pada bangsa dan negara harus terus digelorakan. Untuk mencapai itu semua, jelas dibutuhkan niatan yang lurus sehingga amanah konstitusi dapat ditegakkan. Itu berarti seluruh elemen harus meluruskan arah perjuangan bangsa untuk melunasi janji yang dicita-citakan *the founding fathers* negeri tercinta.

ISBN 978-979-796-323-1



9 789797 963231



Kritik dan saran mengenai buku ini via email: ummpress@gmail.com

DR. BIYANTO, M.AG

MELURUSKAN

kiblat

BANGSA

MELURUSKAN

kiblat

BANGSA

DR. BIYANTO, M.AG

PENGANTAR
PROF. DR. SYAFIQ A. MUGHNI, MA



Daftar Isi

Pengantar Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, MA	• vii
Pengantar Penulis	• xiii
Daftar Isi	• xvii

BAB I

Menyoal Moralitas Bangsa • 1

1. Buta Aksara Moral • 3
2. Meluruskan Kiblat Bangsa • 7
3. Bergaji Tinggi Tapi Korupsi • 11
4. Plagiarisme dan Moral Keilmuan • 15
5. Intelektual dan Kekuasaan • 19
6. Susahnya Menjadi Bangsa yang Jujur • 23
7. Saat Akil (Makan) Kemaruk • 27
8. Romli *Effect* untuk Integritas Kemenag • 31

9. Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan • 35
10. Cendekiawan Pejuang Antikorupsi • 39
11. Mendengar Koreksi RUU Ormas • 43
12. Memperkuat Pilar *Civil Society* • 47

BAB II

Beragama Minus Kasalehan • 51

1. Memoderasi Pemikiran Islam • 53
2. Berdamai Dengan Perbedaan • 57
3. Menjauhi Paradoks Ramadan • 61
4. Mudik ke Kampung Rohani • 65
5. Haji, Laksana Pertunjukan Akbar • 69
6. Berdakwah Seharusnya Nirkekerasan • 73
7. Mewaspada Virus ISIS • 77
8. Kampus dan Deradikalisasi • 81
9. Start Surabaya Bebas Prostitusi • 85
10. Amal Intelektualisme Buya Syafi'i • 89
11. Menumbuhkan Kesadaran Multikulturalisme • 93
12. Oase Gerakan Filantropi • 97

BAB III

Moralitas Dalam Berpolitik • 101

1. Tatkala Ulama Terbelah • 103
2. Imaginasi Politik Islam • 107
3. Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam • 111
4. Budaya Plutokrasi • 115
5. Politik Dinasti dan Kisah Adam • 119
6. Bangun Koalisi Mengusung Figur Alternatif • 123
7. Tiada Lawan Abadi dalam Politik • 127
8. Budaya Kontrak Politik • 131
9. Kaum Muda dan Siklus 20 Tahunan • 135
10. Selamatkan Peradaban Mesir • 139
11. Akhlak Pemimpin Publik • 143

-
12. Hijrah dari Pencitraan ke Kerja • 147
 13. Spirit Kemandirian Muhammadiyah • 151
 14. Dari Purifikasi Agama ke Purifikasi Sosial • 155
 15. Meneguhkan Ideologi Muhammadiyah • 159

BAB IV

Meniscayakan Pendidikan Holistik • 163

1. PR Pendidikan Nasional • 165
2. Kurikulum Baru dan Guru Inspiratif • 169
3. Mengawal *Start* Kurikulum Kapal Nuh • 173
4. Mengevaluasi Implementasi Kurikulum • 177
5. Menyongsong Ujian Nasional • 181
6. Menyoal Kredibilitas Unas • 185
7. Ganti Unas Dengan Penilaian Otentik • 189
8. Urgensi Pendidikan Holistik • 193
9. Delapan Prinsip Pendidikan Holistik • 197
10. Spirit Internasional Tanpa RSBI • 201
11. Gejala Inden Sekolah dan *Best Process* • 205
12. Membangun Harapan Melalui Pendidikan • 209
13. Selamatkan Buah Hati Kita • 213
14. Spirit Multikulturalisme Piala Dunia • 217
15. Harapan untuk Kementerian Ristek dan Dikti • 221
16. Memuliakan Profesi Guru • 225
17. Revitalisasi Fungsi Unas • 229

Sumber Tulisan • 233

Biodata Penulis • 237

BAB I

Menyoal Moralitas Bangsa

Buta Aksara Moral

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Din Syamsuddin dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa bangsa ini telah terjangkit penyakit buta aksara moral (*moral illiteracy*). Elemen bangsa ini seakan tidak mampu lagi membedakan antara benar-salah dan baik-buruk. Ungkapan tersebut terasa relevan untuk melukiskan kasus korupsi yang terus terjadi di negeri tercinta ini. Padahal, pemerintah telah membentuk begitu banyak lembaga *ad hoc* yang berfungsi untuk memberantas korupsi. Salah satu lembaga anti rasuah yang kini menjadi harapan masyarakat adalah komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Peningkatan jumlah kasus korupsi di antaranya dapat dibaca melalui pengumuman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan bahwa selama kurun 2004-2012 ada 173 dari 524 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Sebanyak 70 persen di antara kepala daerah itu telah dinyatakan bersalah dan dimasukkan penjara. Kasus lain yang menyita begitu banyak perhatian publik adalah suap impor daging sapi, Hambalang, Simulator SIM, Bank Century, dan

cek perjalanan yang menyertai pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom.

Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa sebagai bangsa, kita telah mengalami buta aksara moral secara berjamaah. Koruptor di negeri ini dengan penuh percaya diri terus melakukan kaderisasi. Mereka melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan jika latar belakang sosial koruptor kini pun sangat beragam; pengusaha, politisi, birokrat, aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan elit agama. Pelaku korupsi juga merambah kelompok akademisi.

Penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh KPK beberapa waktu lalu dapat menjadi contoh. Seperti diketahui, Rudi adalah guru besar dan akademisi ternama ITB. Bahkan, Rudi sempat dinobatkan menjadi dosen teladan. Jika yang dipersangkakan KPK terbukti, itu berarti akan menambah daftar kaum intelektual yang tersandung kasus korupsi.

Umumnya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dilakukan dengan cara suap-menyuap, *mark up* dan *mark down* anggaran, serta penyalahgunaan jabatan. Ironinya, praktik korupsi di instansi pemerintahan pun dianggap sebagai fenomena yang biasa dengan dalih sudah sesuai "prosedur". Pola pikir ini jamak terjadi di lembaga-lembaga publik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Yang lebih menyedihkan, sistem sosial budaya di masyarakat pun menunjukkan sikap yang permisif dengan menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Karena itulah, Mochtar Lubis dalam kata pengantar untuk buku *Bunga Rampai Korupsi* (1988) mengingatkan bahwa ekspresi korupsi telah mewujud dalam banyak budaya. Korupsi dikatakan telah bermetamorfosis dalam banyak wajah (*multifaces*).

Ekspresi korupsi dapat berbentuk tindakan menerima uang sogokan, uang kopi, uang lelah, uang rokok, salam tempel, uang semir, dan uang pelancar atau pelumas. Bahkan untuk mengelabui hukum, pemberian imbalan tidak langsung diberikan pada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, menantu, kerabat, dan teman dekatnya. Budaya sogok atau suap merupakan salah satu ekspresi korupsi yang paling mudah dijumpai di masyarakat.

Budaya itu tumbuh subur karena masyarakat menyikapi suap-menyuap dengan cara yang berbeda. Sebagian menyatakan bahwa

dalam kasus suap-menyuap tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan di luar gaji resmi. Pihak penyuap pun beruntung karena memperoleh kemudahan dalam mengurus persoalan. Sepintas jalan pikiran tersebut benar.

Tetapi jika durenungkan, maka dalam kasus suap-menyuap itu yang paling dirugikan adalah sistem. Budaya suap pada saatnya dapat merusak sistem sehingga tidak berjalan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akibatnya hanya orang "beruang" yang dapat menikmati pelayanan. Sistem pelayanan pun akhirnya dibangun dengan logika *the rule of the rich*, yakni untuk melayani orang-orang kaya.

Di antara faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program pemberantasan korupsi adalah karena gerakan antikorupsi dinilai belum memiliki konsep yang jelas. Pemberantasan korupsi juga mengalami kevakuman ideologi sehingga belum menjadi gerakan bagi seluruh komponen. Yang dimaksud ideologi dalam kaitan ini adalah seperangkat nilai yang digunakan sebagai arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan untuk mencapai tujuan.

Indikatornya, banyak orang yang berteriak-teriak anti korupsi saat masih berada di luar kekuasaan. Tetapi tatkala kekuasaan berada di genggaman, mereka pun tidak tahan godaan sehingga larut dalam budaya korupsi. Budaya korupsi dengan berbagai ekspresinya kini tidak hanya urusan kaum elit. Masyarakat lapisan bawah pun mengenal berbagai budaya korupsi. Akibatnya, praktik korupsi tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Ironinya, budaya korupsi terjadi dalam urusan yang berkaitan dengan kelahiran hingga kematian.

Itu dapat diamati dalam kegiatan yang melibatkan warga dan pejabat publik saat mengurus akta kelahiran. Begitu juga saat warga mengurus pemakaman anggota keluarganya, hampir semua aktivitas ini dijalani warga dengan cara yang dapat dikategorikan suap. Persoalannya, mengapa masyarakat begitu mudah terpengaruh budaya suap?

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan merujuk hasil survei Universitas Paramadina Jakarta dan Lembaga Pride Indonesia (2010). Hasil survei itu menyatakan bahwa tipologi masyarakat kita termasuk yang paling mudah disuap. Survei itu dilakukan secara spesifik untuk menjawab pertanyaan mengapa praktik *money politics* dalam

pemilihan kepala daerah (pilkada) sulit diberantas.

Karakter mudah disuap itulah yang menjadikan budaya korupsi dengan segala ekspresinya sulit diberantas. Karena itulah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bangsa ini mengalami gejala *moral illiteracy* akut. Bahkan lebih ekstrem, Profesor Taufiq Abdullah menyatakan bahwa bangsa ini telah mengalami *spiral stupidity* (lingkaran kebodohan) yang melibatkan rakyat jelata hingga elit.

Meski korupsi telah merajalela tetapi karena masalah korupsi sama dengan problem ekonomi, politik, dan sosial budaya lainnya, maka usaha untuk memberantasnya harus tetap digelorakan. Itu berarti pejuang antikorupsi tidak boleh bersikap fatalis, dengan menyatakan bahwa karena korupsi sudah begitu akut maka usaha memberantasnya akan sia-sia.

Agar budaya korupsi dapat diberantas, pejuang antikorupsi harus konsisten menjadikan korupsi dengan segala ekspresinya sebagai musuh bersama (*common enemy*). Inilah spirit ideologis yang harus terus disemai dalam hati satubari. Komitmen ini penting agar pada saatnya negara kita terhindar dari penyakit *moral illiteracy* akut, apalagi jika penyakit itu dialami warga bangsa secara berjamaah. Kita berlindung pada Allah SWT dari sifat demikian.

Meluruskan Kiblat Bangsa

Muhammadiyah melaksanakan Sidang Tanwir di Samarinda, Kalimantan Timur. Permusyawaratan tertinggi setelah muktamar ini dilaksanakan pada 23-25 Mei 2014. Agenda tahunan ini penting karena dilaksanakan dalam suasana menjelang pemilihan presiden (pilpres). Tidak ketinggalan, calon presiden (capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla, saat itu juga berkenan hadir. Secara bergiliran, mereka menyampaikan visinya jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Meski dihadiri capres dan cawapres, Muhammadiyah berkomitmen untuk tidak terjebak pada sikap dukung mendukung. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, bukanlah watak Muhammadiyah untuk bermain dalam ranah politik praktis. Yang dimainkan Muhammadiyah adalah politik adiluhung (*high politic*) demi pilpres yang bermartabat. Dengan demikian, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadi gerakan pencerahan (*al-harakah al-tanwiriyyah*).

Fungsi dakwah yang mencerahkan itulah yang dilakukan Muhammadiyah dalam sejarah perkembangannya. Jika menengok sejarah, konteks kelahiran Muhammadiyah jelas terkait dengan kondisi umat yang terbelakang di segala bidang. Kehidupan berbangsa saat itu juga masih di bawah pengaruh kolonialisme. Di antara kisah populer yang menunjukkan kiprah pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, adalah tatkala beliau meluruskan arah kiblat Masjid Besar Kauman.

Ikhtiar Dahlan itu kemudian memicu konflik dengan pejabat pemerintah, Kanjeng Penghulu Kamaludiningrat. Akibatnya, musala tempat pengajian Dahlan dan murid-muridnya dirobokkan. Peristiwa perobohan musala itu sama sekali tidak menyurutkan dakwah Dahlan. Dakwah beliau semakin meluas, tidak hanya berhenti pada usaha meluruskan arah kiblat untuk shalat.

Dahlan juga memelopori penggunaan bahasa Jawa dan Melayu untuk berkhotbah, pengelolaan haji, program mubalig keliling, shalat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, penafsiran Alquran dengan bahasa lokal, dan pembentukan badan amil zakat. Di bidang pendidikan, Dahlan juga mengupayakan terbentuknya sekolah modern dengan sistem klasikal. Kurikulum pendidikannya pun diperbarui dengan mengintegrasikan ilmu umum dan agama.

Dengan sistem ini, Dahlan bermimpi untuk melahirkan ulama-ilmuwan atau ilmuwan-ulama. Pembaruan Dahlan ini ditujukan untuk mengimbangi pendidikan unggul yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda dan umat Kristiani. Di bidang kesehatan, Dahlan juga meletakkan dasar-dasar pembangunan rumah sakit melalui badan yang bernama Penolong Kesejahteraan Oemum (PKO).

Tokoh Budi Utomo, Dokter Soetomo, yang pernah menjabat penasihat Hoofdbestuur (pimpinan pusat) Muhammadiyah bidang kesehatan, merupakan figur yang sangat berjasa dalam pengembangan rumah sakit. Pada 1924, Dokter Soetomo ditunjuk untuk meresmikan Poliklinik PKO Muhammadiyah yang berada di Jalan KH Mas Mansur, Surabaya.

Saat berpidato, Dokter Soetomo menyampaikan alasan dirinya bergabung dengan Muhammadiyah. Ia menyampaikan bahwa paham "kewelasihan" yang diajarkan Dahlan melalui berbagai kegiatan PKO telah memikat hatinya. Tatkala meresmikan PKO Surabaya, Soetomo mengajak undangan untuk menyumbang. Ajakan Soetomo disambut hadirin dengan antusias.

Peristiwa ini menarik karena sebagian besar undangan adalah "noni-noni" Belanda. Dengan sukarela noni-noni Belanda menyerahkan cincin, gelang, dan kalung yang dikenakannya untuk disumbangkan pada Muhammadiyah. Jika melihat kiprahnya, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa semua yang dilakukan Dahlan telah melampaui zamannya.

Akibatnya, Dahlan harus menerima kenyataan dicemooh dan dituduh sebagai antek penjajah dan agen Kristen. Dahlan juga dituduh telah melecehkan agama karena berani melakukan praktik keagamaan yang masih asing. Semua tuduhan dan ancaman itu tidak menciutkan nyali Dahlan untuk berdakwah. Dakwah Dahlan memberantas takhayul, bidah, dan churafat (TBC) semakin menggelora hingga ajal menjemputnya pada 1923.

Kini Muhammadiyah telah sukses melewati usia satu abad. Yang patut disyukuri, Muhammadiyah sejak kelahirannya hingga kini masih konsisten berkiprah untuk menyinari negeri. Muhammadiyah tetap berkhidmat untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar, tanpa sekalipun tergoda menjadi partai politik. Yang menarik dinanti adalah kiprah Muhammadiyah dalam konteks kekinian. Terutama menjelang pilpres yang sangat menentukan masa depan bangsa.

Karena tantangan yang dihadapi saat ini berbeda, orientasi dakwah Muhammadiyah tidak boleh hanya berhenti pada memberantas TBC. Dakwah Muhammadiyah harus mencakup seluruh aspek, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pada awal kelahirannya, ideolog Muhammadiyah berhasil meluruskan arah kiblat shalat, pertanyaannya mampukah generasi Muhammadiyah masa kini meluruskan arah kiblat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu penting karena situasi kehidupan berbangsa dan bernegara kini sedang menghadapi banyak persoalan. Berbagai persoalan itu meliputi kemandirian bangsa, perekonomian yang tak kunjung beranjak, korupsi yang semakin menjadi, pendidikan yang belum mencerahkan, terorisme, dan dinamika politik yang cenderung memanas jelang pilpres. Untuk itulah, medan dakwah Muhammadiyah harus digeser dari memberantas TBC pada membantu tugas negara agar cepat keluar dari persoalan yang dihadapi.

Dalam bidang politik kebangsaan, dakwah Muhammadiyah

harus mencerahkan rakyat sehingga menjadi pemilih rasional dalam pilpres. Seruan ini penting karena di ujung pilihan rakyat itulah masa depan bangsa dipertaruhkan. Sejauh ini Muhammadiyah telah menunjukkan keprihatinan mendalam dalam kehidupan berbangsa. Misalnya Muhammadiyah telah memelopori gerakan antikebohongan. Itu dimaksudkan agar elit negeri ini berintegritas dan memiliki kesamaan kata dengan perbuatan.

Muhammadiyah juga bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang terlalu mudah memberikan izin perusahaan asing untuk mengeksploitasi kekayaan alam. Hal itu ditunjukkan tatkala Muhammadiyah memelopori pengajuan *judicial review* terhadap keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Ikhtiar Muhammadiyah membuahkan hasil dengan dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, ikhtiar Muhammadiyah saat itu awalnya dicibir karena dianggap tidak berkompeten untuk mengajukan *judicial review* BP Migas.

Harus dipahami, komitmen Muhammadiyah terhadap persoalan Migas merupakan bagian dari ikhtiar untuk meluruskan arah kiblat dalam kehidupan berbangsa. Karena itu menarik dinanti kiprah Muhammadiyah di bidang yang lain.

Bergaji Tinggi Tapi Korupsi

Jika kita membaca media maka hampir tidak pernah sepi dari pemberitaan kasus korupsi dengan segala bentuk ekspresi budayanya. Pemberitaan kasus-kasus korupsi itu terasa akan semakin heboh jika melibatkan figur populer di negeri ini. Saat membaca berita itulah energi dan emosi publik seakan memuncak. Bagaimana tidak, yang terlibat dalam kasus korupsi itu mayoritas adalah pejabat publik yang diberitakan sangat kaya (*tajir*) dan bergaji tinggi. Lakon utama kasus-kasus yang menghebohkan itu di antaranya adalah Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, dan Akil Mochtar.

Di luar empat tersangka itu tentu masih banyak kasus serupa dan berskala besar. Tetapi yang menarik dari empat tersangka kasus tersebut adalah bahwa mereka sejatinya pejabat publik yang terhormat, kaya, dan bergaji tinggi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, komisi pemberantasan korupsi (KPK) pun tidak ragu menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.

Tidak mengherankan jika sebagian besar orang yang mengikuti pemberitaan kasus menghebohkan ini bertanya-tanya, mengapa mereka masih juga tergoda untuk melakukan korupsi? Bukankah kehidupan mereka telah tercukupi dengan begitu banyak fasilitas yang diberikan negara? Harta mereka pasti melimpah. Gaji mereka juga pasti sangat besar.

Lalu, kepuasan apalagi yang hendak mereka cari? Beberapa pertanyaan itu tentu absah untuk dimajukan. Tetapi sejatinya tidak ada yang aneh dengan kasus-kasus yang menghebohkan itu. Karena, sepanjang berkaitan dengan makhluk Tuhan yang bernama manusia, maka semua menjadi serbamungkin. Sebab, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sulit diprediksi.

Dengan kehidupan yang sangat dinamis maka perilaku manusia menjadi sangat sulit diprediksi. Jadi, persis seperti yang diungkapkan Louis Leahy dalam *Manusia Sebuah Misteri* (1989). Dalam buku itu digambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berdimensi banyak. Sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, manusia sejatinya memiliki tugas yang sangat terhormat. Yakni, memelihara kehidupan di alam semesta.

Tetapi, jangan lupa manusia juga berpotensi untuk menjadi perusak kehidupan di muka bumi. Karena itulah, Louis Leahy menyebut manusia sebagai makhluk dengan karakter yang paradoks. Itulah sebabnya ilmu-ilmu tentang manusia (*humanity sciences*) tergolong disiplin yang sulit untuk dipahami. Pendek kata, manusia yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu kemanusiaan sangat dinamis dan mudah berubah sehingga tidak dapat ditebak.

Hal itu berbeda dengan ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) yang menjadikan segala sesuatu di luar manusia sebagai objek kajian. Dengan karakter yang sangat stabil dan cenderung taat pada ketentuan Tuhan (*sunnatullah*), makhluk selain manusia mudah untuk dijelaskan. Itulah sebabnya banyak ilmuwan dapat memprediksi kejadian alam dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.

Coba bandingkan dengan manusia. Siapa yang dapat menebak apa yang akan dilakukan seseorang pada masa mendatang. Hari ini seseorang menampilkan diri sebagai sosok yang baik, tetapi bagaimana dengan besok. Siapa yang dapat menjamin bahwa besok ia akan tetap menjadi pribadi yang baik?

Dengan menggunakan perspektif dari ilmu-ilmu tentang manusia itulah kiranya kita dapat menjelaskan realitas orang yang sudah

bergaji tinggi tetapi masih melakukan korupsi. Sangat mungkin mereka adalah tipologi manusia yang senantiasa ingin memuaskan keinginan. Padahal yang namanya keinginan pasti tidak pernah berakhir. Keinginan itu laksana orang yang ingin menghilangkan rasa haus dengan minum air laut.

Jika itu dilakukan, maka yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak air laut yang diminum maka akan semakin haus. Jadi, sejatinya manusia tidak akan mampu memenuhi keinginannya. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jika seseorang sudah memiliki satu lembah berisi emas, maka ia pasti akan mencari lembah kedua. Jika lembah kedua yang berisi emas telah diperoleh, ia pun pasti mencari lembah ketiga.

Begitu seterusnya tabiat manusia. Manusia tidak akan pernah merasa puas kecuali setelah mulutnya disumpal dengan tanah alias mati. Hadis ini mengingatkan bahwa jika yang dicari manusia adalah kepuasan, pasti tidak akan ada ujungnya. Tetapi harus diakui, bahwa dalam hidup ini setiap orang selalu dihadapkan pada godaan. Celaknya, godaan itu selalu menyesuaikan dengan kondisi seseorang.

Mereka yang memiliki derajat tinggi seperti pejabat publik, pasti akan berhadapan dengan godaan yang luar biasa. Ibaratnya, semakin tinggi pepohonan maka semakin kencang angin menerpa. Maka, beruntunglah mereka yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Meski godaan terus berdatangan namun dengan fondasi keimanan yang kuat, ia tetap dapat menjaga integritasnya.

Berkaitan dengan kuatnya godaan itulah maka setiap pejabat publik harus diingatkan bahwa kekuasaan itu amanah. Karena kekuasaan itu amanah maka harus dijaga sebaik-baiknya. Bahkan, dalam Alquran ditegaskan bahwa kekuasaan itu sejatinya titipan Allah. Dialah pemilik kekuasaan yang sejati. Dia berkuasa untuk memberikan kekuasaan dan kehormatan pada orang yang dikehendaki.

Sebaliknya, Allah juga berkuasa mencabut kekuasaan dari seseorang dan menjadikannya terhina (QS. Ali Imran: 26). Ketentuan itu jelas termaktub dalam hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Itulah yang terjadi pada diri pejabat publik yang tadinya berkuasa dan terhormat kemudian harus kehilangan semuanya. Bukan hanya kekuasaan yang pergi.

Bahkan, ia harus menerima kenyataan menjadi orang yang

terhinakan. Semua itu harus dipahami sebagai hukum yang tak terelakkan jika seseorang tidak mampu menjaga amanah. Kasus suap yang mengguncang kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini tentu harus dijadikan pelajaran (*ibrah*). Siapa pun yang bermain-main dengan korupsi, pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Karena itu, jangan pernah melakukan kesalahan yang sama.

Semoga penangkapan pejabat publik yang sudah kaya dan bergaji tinggi tapi masih serakah sehingga melakukan korupsi dapat menjadikan bangsa ini semakin kuat dan bermartabat. Hal itu karena memang tidak ada seorang pun yang benar-benar kebal dari hukum.

Plagiarisme dan Moral Keilmuan

Kasus plagiarisme yang melibatkan akademisi perguruan tinggi kembali terjadi. Kali ini lakonnya adalah Anggito Abimanyu (Anggito), akademisi dan pejabat negara yang dikenal memiliki rekam jejak hebat dan sangat berintegritas. Meski menjadi pejabat negara dan harus menghabiskan waktu di Ibu Kota, Anggito masih tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM.

Anggito pun selalu menyempatkan hadir untuk mengajar di UGM, kampus yang membesarkan namanya. Selain sebagai akademisi, Anggito juga menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag). Sebelumnya Anggito menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF Kementerian Keuangan). Di bidang olahraga, Anggito juga dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi).

Beberapa jabatan yang diraih Anggito menunjukkan bahwa beliau sosok yang multitalenta. Dengan talenta yang hebat itulah,

terasa tak percaya tatkala menyimak berita bahwa Anggito tersandung kasus plagiat sehingga harus mundur dari UGM. Pemberitaan di media *online* ternyata juga tidak kalah ramai. Kasus plagiarisme yang melibatkan Anggito mendapat respons yang luar biasa dari pembaca. Banyak di antara mereka yang mencoba untuk berempati pada Anggito.

Sementara yang lain menganggap kesalahan Anggito termasuk yang tidak dapat ditoleransi di dunia akademik dan karena itu pelakunya harus dihukum. Kasus plagiarisme Anggito bermula dari seorang penulis di *Kompasiana* yang menulis kolom dengan judul *Anggito Abimanyu Menjiplak Karya Orang?* Penulis dengan akun "Penulis UGM" itu mengungkapkan bahwa ada kesamaan redaksi dalam beberapa paragraf dan substansi tulisan Anggito dengan tulisan yang terlebih dulu dimuat di *Kompas*.

Kesimpulan itu diperoleh setelah membandingkan artikel opini Anggito berjudul "Gagasan Asuransi Bencana" (*Kompas*, 10 Februari 2014) dan tulisan Hatbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul "Menggagas Asuransi Bencana" (*Kompas*, 21 Juli 2006). Setelah kasusnya ramai diberitakan di media, Anggito pun menggelar konferensi pers. Intinya, Anggito mengakui telah berbuat khilaf karena mengutip tulisan orang tanpa menunjukkan referensi yang jelas. Sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan, Anggito pun memutuskan untuk mundur dari profesi sebagai dosen di UGM.

Keputusan ini memang terasa berat, tetapi harus diambil demi menjaga integritas seluruh sivitas dan institusi UGM. Sangat disayangkan, Anggito harus mengakhiri karier sebagai akademisi karena kasus plagiarisme. Padahal jika melihat rekam jejaknya, kesalahan itu tidak seharusnya dilakukan orang sekaliber Anggito. Sebelum terkena kasus plagiarisme, Anggito termasuk akademisi andal. Anggito begitu dicintai mahasiswanya. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak kolega yang kaget dengan kasus yang dialami Anggito. Tak terkecuali Rektor UGM Profesor Pratikno.

Beliau mengatakan bahwa Anggito adalah aset UGM yang sungguh luar biasa. Tetapi, Pak Rektor lantas memungkasi pernyataan dengan mengatakan bahwa kejujuran akademik juga menjadi aset yang luar biasa bagi UGM. Pernyataan ini terasa sangat tepat karena kejujuran akademik (*academic honesty*) bagi perguruan tinggi adalah segala-galanya. Bayangkan, jika ada perguruan tinggi divonis *stakeholders*-nya sebagai tidak berintegritas, runtuhlah kewibawaan

dan kehormatan (*marwah*) kampus tersebut.

Memang sempat muncul dugaan bahwa yang menulis artikel opini itu bukan Anggito, melainkan anak buahnya. Dugaan ini berdasarkan kebiasaan pejabat publik yang selalu menggunakan jasa penulis (*ghost writer*). Melalui jasa penulis inilah pejabat publik selalu menulis di media untuk mencitrakan dirinya intelek dan berpendidikan (*well educated*). Tetapi, dugaan itu ditepis Anggito.

Kasus yang dialami Anggito seharusnya menjadi pelajaran bagi siapa pun. Jangan karena terdorong untuk mencitrakan diri sebagai penulis produktif, lalu mengindahkan nilai-nilai moral kejujuran. Apalagi jika sampai melakukan praktik plagiarisme. Dalam kaitan ini plagiarisme atau plagiat dapat diartikan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan atau pendapat sendiri.

Dengan demikian, plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Karena itulah, plagiarisme harus menjadi perhatian seluruh sivitas akademika, terutama di perguruan tinggi. Kasus plagiarisme tidak boleh terus-menerus terjadi. Rasanya sudah waktunya setiap perguruan tinggi menggunakan *software* untuk mencegah plagiarisme. Tetapi, jika memang belum ada *software* yang memadai, cara efektif untuk mencegah plagiarisme adalah mendorong sivitas akademika untuk memublikasikan hasil karyanya.

Publikasi buku, hasil penelitian, artikel jurnal, opini koran, apalagi jika dilakukan secara *online*, pasti efektif untuk mencegah plagiarisme. Jika ada seseorang yang tidak jujur misalnya mengambil artikel melalui bantuan "Mbah Google" dan menganggap itu tulisannya, dengan mudah akan diketahui karena banyak orang yang mengakses. Satu lagi yang juga sangat mendasar adalah mengandalkan moral keilmuan dari setiap akademisi. Doktrin utama yang harus ditanamkan pada akademisi adalah sebagai pribadi yang memiliki keterbatasan boleh saja ia melakukan kesalahan.

Yang tidak boleh adalah melakukan kebohongan. Itu berarti, bisa saja seorang akademisi melakukan kesalahan dalam menganalisis dan menyimpulkan. Yang penting semua data dan fakta dikemukakan secara jujur dan apa adanya. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa, harus menyadari bahwa kejujuran itu jauh lebih penting dari segalanya. Bahkan gelar keserjanaan (S-1, S-2, dan S-3) dan gelar tertinggi akademik (profesor)

tidak akan bermanfaat jika ditempuh dengan cara yang tidak jujur.

Karena itu, mari mencegah praktik plagiarisme dengan mengandalkan moral kejujuran. Tidak usah menunggu orang lain untuk berbuat jujur. Marilah mulai dari diri sendiri dengan menjadi akademisi yang berintegritas.

Intelektual dan Kekuasaan

Dinamika politik nasional dan lokal telah menghadirkan fenomena yang menarik berupa polarisasi kaum intelektual dalam berbagai kelompok kepentingan. Kaum intelektual ini umumnya bergabung sebagai aktivis partai, tim sukses calon, konsultan politik, dan tenaga profesional untuk survei. Karena itu tidak mengherankan jika kini menjamur beberapa lembaga survei yang siap dimanfaatkan calon presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif, untuk mengetahui tingkat popularitas dan akseptabilitasnya.

Bukan hanya untuk kepentingan personal calon, lembaga-lembaga survei itu juga dapat dimanfaatkan untuk melihat popularitas partai politik (parpol) yang akan *running* dalam Pemilu 2014. Parpol dan para calon dalam kaitan ini jelas membutuhkan masukan dari komunitas akademik berkaitan dengan isu yang harus diwacanakan agar dapat diterima publik. Variabel akseptabilitas ini penting karena sekaligus dapat digunakan untuk mengukur popularitas partai dan calon.

Sementara masukan mengenai isu yang akan diwacanakan jelas bermanfaat bagi parpol dan calon agar dapat menawarkan program sesuai kondisi sosial budaya masyarakat masing-masing. Keterlibatan kaum intelektual tentu menarik diamati karena terjadi dalam setiap pemilu, terutama sepanjang era reformasi. Kaum intelektual dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk mempertajam visi, misi, serta program parpol dan para calon. Pelibatan kaum intelektual ini jelas dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Kaum intelektual di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga profesional untuk melakukan kajian mengenai kondisi masyarakat dan harapan yang diinginkan. Melalui kegiatan inilah parpol dan para calon mendapatkan gambaran mengenai kondisi riil di lapangan serta strategi yang tepat untuk menarik simpati dan membangun kepercayaan masyarakat.

Di samping itu, data riil di lapangan jelas bermanfaat bagi tim sukses untuk diolah menjadi isu menarik yang akan disampaikan dalam kampanye. Hampir dapat dipastikan jika kondisi masyarakat setiap daerah sangat berbeda. Keragaman kondisi masyarakat jelas membutuhkan strategi yang berbeda. Karena itulah substansi isu kampanye dan strategi menyampaikannya pun harus dikemas dengan cara yang berbeda.

Sebagai contoh, isu tentang banjir dan penanggulangannya barangkali menarik dijadikan bahan kampanye di daerah tertentu. Tetapi isu banjir pasti tidak relevan disampaikan di daerah yang tidak rawan banjir. Isu tentang kemacetan juga bisa relevan untuk daerah tertentu dan tidak relevan untuk daerah lain. Demikian juga isu tentang *good governance* dan pemberantasan korupsi. Dua isu ini jelas sangat elitis sehingga hanya cocok disosialisasikan pada kelompok yang terbatas dan terdidik.

Sementara untuk rakyat kebanyakan akan sangat bergairah jika ditawarkan program pendidikan dan kesehatan gratis, kemudahan memperoleh bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, kesempatan mendapat pekerjaan, dan peningkatan pelayanan sosial lainnya. Persoalannya, dengan melibatkan diri dalam pertarungan bersama masing-masing parpol dan calon tertentu, apakah kaum intelektual tidak dapat dikatakan telah melakukan pengkhianatan?

Sebutan pengkhianatan intelektual pernah dikemukakan Julien Benda dalam *The Betrayal of the Intellectuals*. Melalui karya ini, Benda mengkritik tajam kaum intelektual Prancis yang mendukung

Perang Dunia I dan II. Karena itulah Benda tidak mau menyebut dirinya sebagai kaum intelektual. Dalam konteks keindonesiaan, kaum intelektual dari berbagai latar belakang juga melibatkan diri dalam kegiatan partai dan turut menyukseskan calon tertentu.

Bahkan bisnis yang laris manis di era politik yang mengandalkan popularitas ini adalah konsultan politik dan survei. Bisnis yang dikelola kaum intelektual ini pasti menghadirkan keuntungan ekonomi yang luar biasa. Pelibatan kaum intelektual dalam politik memang sensitif karena selama ini dunia intelektual sangat identik dengan kebebasan dan independensi. Pertanyaannya, apakah dengan menjadi aktivis partai, tim sukses, konsultan, tim survei, untuk kepentingan partai dan calon tertentu tidak mengebiri kemandirian kaum intelektual?

Pertanyaan ini biasanya muncul dari kelompok intelektual idealis. Mereka yang berpandangan idealis umumnya ingin menunjukkan diri sebagai kelompok intelektual yang selalu berada di menara gading, tanpa mau melihat realitas di lapangan. Sementara itu, ada kelompok lain yang berpandangan bahwa kaum intelektual tidak boleh terus-menerus berada di menara gading. Kaum intelektual harus segera keluar dengan menjadi aktivis untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya.

Karena persoalan politik berkaitan dengan kepentingan publik, maka berarti kaum intelektual juga harus melibatkan diri. Hanya dengan cara inilah kaum intelektual dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk turut mempengaruhi kebijakan agar partai penguasa dan calon pemimpin menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Memahami keberadaan kaum intelektual yang demikian penting, tidak mengherankan jika parpol dan para calon yang akan *running* dalam pemilu melibatkan mereka.

Terlepas dari kontroversi pelibatan kaum intelektual dalam politik praktis, keberadaan mereka dirasa sangat penting. Kaum intelektual dapat dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku calon pemilih (*voting behaviour*). Dalam perspektif teori sosial, pelibatan kaum intelektual ini juga dapat dipahami sebagai cara elit parpol dan calon penguasa untuk melakukan hegemoni pada masyarakat.

Setidaknya pada tingkat tertentu masyarakat akan memersepsi bahwa elit parpol dan calon penguasa telah didukung oleh sederetan kaum intelektual sehingga bersifat *well educated*. Akhirnya, semoga

kaum intelektual yang terlibat dalam proses politik di negeri ini atau yang telah dekat dengan kekuasaan tetap menjaga integritas moral dan intelektualnya sehingga tidak larut dalam berbagai kepentingan praktis-pragmatis.

Susahnya Menjadi Bangsa yang Jujur

Jika menyimak pemberitaan beberapa kasus besar yang terjadi di negeri ini maka terasa sekali bahwa ada misteri yang harus diungkap secara jujur. Kasus suap impor daging sapi dapat menjadi salah satu contoh. Kasus yang menyeret sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menempatkan Ahmad Fathanah (AF) sebagai lakon. Juga ada nama mantan presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq (LHI) dan Menteri Pertanian Suswono, yang juga kader PKS. Meski saling mengenal, namun saat diminta kesaksian di pengadilan mereka memberikan keterangan yang berbelit dan tidak nyambung. Fakta ini menunjukkan bahwa ada ketakjujuran diantara mereka.

Tidak jelas, siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dalam kasus tersebut. Yang pasti publik harus menahan kesabaran untuk menanti akhir dari drama kasus suap impor daging sapi. Apalagi dalam percakapan yang diputar di pengadilan antara AF dan LHI ternyata banyak menggunakan kata sandi seperti *Pustun*, *Jawa Syarqiyah*, *Daging Busuk*, dan *Arba'in*. Bahkan sebagian percakapan AF dan LHI dilakukan dalam bahasa Arab. Penggunaan kata sandi

dan bahasa Arab itu semakin menambah misteri kasus tersebut.

Ketidakjujuran ternyata bukan hanya terjadi dalam persidangan kasus suap impor daging sapi. Dalam kasus mega skandal proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang dan kasus suap cek perjalanan yang menyertai pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom, publik juga mendapati penjelasan yang saling bertolak belakang dari masing-masing oknum. Fenomena itu jelas menjadi pekerjaan rumah bagi aparat untuk mengungkap siapa yang memberikan kesaksian palsu.

Daftar kasus besar yang hingga kini masih misterius adalah pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjarn, Nasrudin Zulkarnaen. Kasus ini tergolong heboh karena melibatkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Berdasarkan bukti-bukti selama persidangan, Antasari telah diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara. Tetapi karena merasa dihukum melalui proses pengadilan yang menyesatkan, Antasari terus berikhtiar untuk mencari keadilan.

Penyelesaian kasus Bank Century juga belum menunjukkan perkembangan. Padahal dana trilyunan rupiah telah digelontorkan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century. Banyak dugaan menyertai kasus Bank Century. Tetapi sayang sekali, sejauh ini publik belum mendapat kejelasan dari kasus yang begitu menguras energi. Kasus lain yang juga menarik ditunggu adalah dugaan korupsi simulator SIM yang menyeret beberapa jenderal di lingkungan Mabes Polri.

Dari beberapa kasus yang menghebohkan tersebut tampak bahwa ada ketidakjujuran yang dilakukan masing-masing oknum. Bahkan terasa ada sutradara dibalik rekayasa sejumlah kasus besar tersebut. Dengan skenario yang dirancang, untuk sementara waktu sang sutradara berhasil memainkan emosi publik. Sehingga tanpa disadari, publik masuk dalam alur cerita yang menyesatkan.

Ibarat sebuah permainan, sang sutradara dapat dikatakan sedang bermain api. Sang sutradara mungkin tidak menyadari bahwa ada hukum tak terelakkan; "Barang siapa yang bermain api maka pasti akan terbakar." Itu berarti bahwa siapa yang berbohong dalam kasus-kasus besar tersebut pasti akan ketahuan belangnya. Kalau tidak hari ini, mungkin esok, atau kapan pun waktunya. Sejarah yang akan menjawab dengan pasti kapan kebohongan itu terungkap. Yang jelas, cepat atau lambat kejujuran pasti akan mengalahkan

kebohongan.

Dalam agama diajarkan bahwa kejujuran itu adalah sifat yang sejalan dengan hati nurani. Sebaliknya, kebohongan digambarkan sebagai sifat yang bertentangan dengan hati nurani. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa kejujuran itu akan menghadirkan ketenangan, sementara kebohongan membuat pelakunya senantiasa ragu-ragu (HR. Tirmidzi). Sabda Nabi yang mengaitkan kebohongan dan keragu-raguan menarik dicermati. Itu berarti orang yang selalu ragu dalam mengambil keputusan rasanya ia patut diduga melakukan ketakjujuran.

Karena itulah kita harus menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi dalam membangun kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dalam kaitan ini layak direnungkan pernyataan Abraham Lincoln, Bapak Kemerdekaan dan Presiden Amerika Serikat ke-16. Beliau pernah berujar; *You can make fool all people for some time, some people for all time, but not all people for all time* (anda dapat menipu semua orang untuk sementara waktu, sebagian orang untuk sepanjang waktu, tetapi anda tidak mungkin menipu semua orang untuk sepanjang waktu).

Pernyataan itu memberikan pelajaran bahwa sejatinya tidak ada ruang yang aman untuk menyimpan kebohongan. Pada saatnya kebohongan pasti akan terbongkar sehingga kita mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Rasanya publik sudah muak dengan semua ketakjujuran yang terjadi di negeri tercinta ini.

Saat Akil (Makan) *Kemaruk*

Seorang kolega yang juga guru besar tafsir di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel pernah berseloroh. Ia mengatakan bahwa Akil Mochtar ditangkap basah KPK dalam dugaan kasus suap disebabkan salah nama. Hal itu karena menurut pakar tafsir ini, kata *akil* dalam bahasa Arab jika dieja dengan huruf alif, kaf, lam, berarti makan atau memakan.

Berbeda dengan kata '*aqil* dengan ejaan 'ain, qaf, lam. Kata terakhir ini ('*aqil*) berarti orang yang berakal, berpikir, dan bernalar dengan jernih. Saya meyakini, tatkala orang tua memberi nama anaknya dengan kata 'akil', sejatinya yang dimaksud adalah 'aqil. Dengan nama 'aqil, orang tua pasti menginginkan agar pada saatnya nanti anaknya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas sehingga mampu menggunakan akal pikirannya. Bukankah akal merupakan anugerah terbesar dari Tuhan?

Bahkan akal pikiran menjadi pembeda yang jelas antara manusia dan hewan. Dengan akal pikiran yang jernih maka seseorang senantiasa akan berhati-hati dalam bertutur kata, bersikap, dan

bertindak. Jadi, kata 'akil' yang melekat pada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, semestinya tidak bermakna memakan. Apalagi memakan apa saja yang dapat dimakan. Jadi, Akil Mochtar itu semestinya bukan pemakan apa saja (kemaruk), sehingga tidak peduli halal atau haram. Apalagi beliau adalah pejabat tinggi negara yang terhormat.

Tetapi jika melihat perkembangan kasus Akil Mochtar tampaknya guyonan guru besar tafsir itu ada benarnya. Akil Mochtar seakan ingin memanfaatkan jabatannya sebagai ketua MK untuk memperkaya diri dan keluarganya dengan jalan yang tidak sah. Tumpukan kasus sengketa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) telah membuka pikiran jahat Akil. Dengan sangat vulgar, Akil memainkan begitu rupa kasus sengketa yang melibatkan pasangan calon dalam pilkada sebagai mesin uang.

Tidak tanggung-tanggung, rumah dinas pejabat tinggi negara pun disulap menjadi tempat bisnis keputusan sengketa pilkada. Kesaksian Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainuddin Amali, yang mengaku pernah dihubungi melalui pesan *BlackBerry Messenger* (BBM) semakin menunjukkan belang Akil. Melalui komunikasi BBM, dengan tanpa tedeng aling-aling, Akil minta disiapkan uang Rp10 miliar untuk menjamin kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam pemilihan gubernur Jatim. Kebetulan saat itu pesaing terkuat Karsa, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja, mengajukan gugatan di MK.

Untungnya permintaan itu tidak digubris pasangan Karsa hingga Akil ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas pada 2 Oktober 2013. Jika semua yang dipersangkakan KPK benar, maka dapat dibayangkan berapa banyak keuntungan Akil dari bisnis keputusan MK. Hal itu karena tumpukan kasus sengketa pilkada di Tanah Air sungguh luar biasa. Hingga dapat dipahami kalau Akil tidak memiliki tempat yang layak untuk menyimpan uang.

Uang Akil pun disimpan di ruang karaoke, kompleks perumahan dinas MK. Mantan Ketua MK Mahfud MD pun menyamakan perilaku Akil dengan Presiden Tunisia Ben Ali yang menyimpan uang di ruang perpustakaan. Sebagai pejabat tinggi negara, Akil sejatinya sudah banyak memperoleh fasilitas seperti gaji tinggi, mobil mewah, rumah dinas, dan sejumlah tunjangan. Jika tidak terlalu banyak makan dan berpolah, penghasilan Akil sebagai pejabat

tinggi negara sudah lebih dari cukup untuk menikmati hidup.

Tetapi tabiat kekuasaan memang selalu menghadirkan godaan. Penguasa yang tahan menghadapi godaan pasti akan selamat. Sebaliknya, yang tidak tahan godaan pasti akan tergelincir. Akil termasuk pejabat yang tidak tahan godaan. Karena itulah Ibnu Khaldun dalam *The Muqaddimah an Introduction to History* (1989), mengingatkan bahwa kekuasaan itu jika tidak dijalankan dengan amanah pasti akan membawa kerusakan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tabiat kekuasaan itu selalu menghendaki berada di satu tangan, *the royal authority, by its very nature, must claim all glory for it self.*

Tabiat kekuasaan juga selalu menghendaki kemewahan, *the royal authority, by its very nature, requires luxury.* Sedangkan kemewahan pada saatnya merusak akhlak pejabat dan menyebabkan kehancuran negara. Peringatan senada juga dikemukakan Lord Acton tatkala menulis surat pada Bishop Mandell Creighton. Dalam surat itu, Acton menulis ungkapan yang terkenal hingga kini, yakni *Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.* Orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.

Peringatan Ibnu Khaldun dan Acton layak dijadikan pengingat bagi pemegang kekuasaan agar tidak salah jalan. Tingkah polah Akil memang mengundang emosi publik. Bukan saja orang awam yang kecewa. Mahfud MD juga dibuat berang. Akibat perilaku Akil, kewibawaan MK seakan runtuh. MK terus menjadi pergunjangan publik. Mereka yang pernah beperkara di MK bahkan menuntut agar putusan kasus sengketa pilkada yang melibatkan Akil dibuka kembali.

KPK pun terus menyelidiki modus kejahatan Akil. Hasilnya sungguh luar biasa. Akil diketahui memiliki harta kekayaan yang melimpah berupa rumah, kendaraan, uang, dan properti lainnya. Semua properti Akil disita KPK karena diduga diperoleh dari jalan yang tidak benar. Kasus yang menimpa Akil harus menjadi pelajaran bagi pejabat publik di negeri ini. Bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kekuasaan pasti akan berhadapan dengan aparat.

Apalagi jika kekuasaan itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Siapa pun yang menjabat harus menyadari bahwa jabatan itu adalah amanah. Amanah berupa kekuasaan pasti silih berganti,

datang dan pergi (QS. Ali 'Imran: 26). Itulah hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan menjabat dan berkuasa terus-menerus. Karena itu, pejabat harus menggunakan kesempatan saat menjabat dengan bekerja sepenuh hati. Hal ini penting agar saat turun dari tahta, seorang pejabat tidak memiliki persoalan hukum.

Romli *Effect* untuk Integritas Kemenag

Akhir tahun 2013, negeri ini digegerkan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agama dengan aktor utamanya Romli. Romli adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri yang dijerat kasus gratifikasi berupa penerimaan honor jasa kepenghuluan. Modusnya, Romli memungut biaya melebihi tarif resmi pernikahan. Padahal, tarif resmi yang ditetapkan pemerintah hanya Rp. 30.000 untuk setiap pernikahan. Selama setahun (Januari-Desember 2012) bertugas sebagai kepala KUA, Romli diduga menerima gratifikasi jasa kepenghuluan hingga Rp. 42 juta.

Sejawat lewat Forum Komunikasi Kepala KUA di Jawa Timur menilai, perlakuan terhadap Romli tersebut merupakan bentuk kriminalisasi profesi kepenghuluan. Para penghulu pun memutuskan untuk mogok. Para petugas negara yang biasanya siap siaga melayani pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja tersebut tidak lagi bersedia memenuhi undangan keluarga mempelai.

Dampaknya, pencatatan nikah harus dilaksanakan pada jam kerja di KUA mulai Januari 2014. Selain patut disayangkan, ancaman

itu bisa disebut “keangkuhan profesi”, layaknya kasus mogok dokter dan mogok guru. Sebab, sebagai pemegang “monopoli” pencatatan pernikahan, semestinya mereka mengimbangi dengan pelayanan yang berstandar baik.

Layanan pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja sejauh ini telah membudaya. Biaya pencatatan nikah pun berlipat tatkala mengundang petugas pencatat nikah (P2N) di luar kantor dan jam kerja. Namun, berapa pun tarifnya pasti akan dibayar keluarga mempelai. Buktinya, dalam penyelidikan Kejari Banyuwangi terhadap KUA Glenmore, pungli itu mencapai Rp. 300 ribu sampai Rp. 5 juta.

Pernikahan merupakan saat-saat yang membahagiakan sehingga tidak terasa jika harus mengeluarkan banyak uang, termasuk untuk jasa kepenghuluan. Tetapi, persoalannya, pemberian “salam tempel” tersebut bisa memberatkan mempelai yang tidak mampu. Karena itulah, Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Mohammad Jasin menegaskan bahwa uang yang diberikan sebagai jasa kepenghuluan di luar kantor dan jam kerja yang melebihi tarif resmi merupakan gratifikasi. Itu berarti, tindak pidana.

Idealnya, masyarakat harus mencatatkan pernikahan di KUA pada jam kerja agar tidak mengeluarkan biaya lebih. Tetapi, realitas menunjukkan, kebanyakan merasa lebih nyaman jika pencatatan pernikahan dilakukan di luar kantor dan jam kerja. Misalnya, di rumah atau masjid. Inilah dilemanya.

Para penghulu bisa juga beralasan bahwa keluarga mempelai memberikan uang transpor secara sukarela. Sebagai ungkapan rasa syukur, keluarga mempelai memberikan amplop (berisi uang, tentu). Tetapi, praktik “salam tempel” itu bisa menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan transparansi serta akuntabilitas dana jasa kepenghuluan.

Karena itu, jangan heran jika dalam praktiknya, seperti diakui Romli, uang jasa kepenghuluan tersebut dibagikan ke mana-mana. Sebagian masuk kas KUA berdasar tarif resmi. Sebagian lagi dinikmati P2N yang melaksanakan tugas kepenghuluan. Yang menarik adalah pengakuan Romli bahwa ada setoran kepada pejabat terkait di lingkungan Kemenag. Romli bahkan menyatakan, praktik memberikan upeti kepada pejabat Kemenag itu sudah membudaya di seluruh Nusantara. Terang saja pernyataan Romli itu menjadi tamparan bagi pejabat Kemenag di kabupaten/kota dan provinsi.

Kasus gratifikasi jasa kepenghuluan ternyata sangat memengaruhi rapor integritas Kemenag. Dalam survei integritas oleh KPK pada November 2011, Kemenag diposisikan di nomor buncit. Salah satu indikatornya adalah maraknya kasus gratifikasi jasa kepenghuluan yang melibatkan P2N di KUA. Mestinya itu mencoreng Kemenag. Bermoto "Ikhlās Beramal", Kemenag semestinya menjadi benteng kebobrokan moral bangsa.

Kasus yang dialami Romli bisa jadi merupakan fenomena gunung es. Karena itu, kejadian tersebut harus dijadikan pintu masuk untuk mewujudkan budaya berintegritas. Sudah saatnya Kemenag merumuskan sistem yang terukur untuk mengatur biaya pencatatan nikah di luar kantor dan jam kerja seperti yang diminta Gubernur Jatim Soekarwo. Selain sudah menjadi kebiasaan, fasilitas di banyak KUA sangat terbatas dan memprihatinkan.

Kepastian regulasi tersebut mutlak dibutuhkan sebagai ikhtiar untuk membangun budaya berintegritas setiap pegawai Kemenag, termasuk para penghulu. Kemenag harus menjaga *marwah* profesi penghulu. Semoga pegawai dan institusi Kemenag semakin berintegritas hingga layak disebut departemen "suci". Pendapatan pegawainya pun *halalan thayiban*.

Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan

Praktik korupsi di negeri ini telah begitu rupa sehingga mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kian rapuh. Indikatornya, meski satu persatu kasus korupsi berhasil diungkap aparat penegak hukum, namun kasus serupa justru bermunculan. Ibarat satu kasus berhasil diselesaikan, seribu kasus lain menunggu proses pengadilan. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak mantan pejabat dan pejabat yang masih aktif dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditangkap dan ditahan akibat melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik adalah penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pusat olahraga Hambalang. Penetapan Andi oleh KPK ini layak diapresiasi. Itu karena saat ditetapkan sebagai tersangka posisi Andi adalah menteri yang masih aktif di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Di samping itu, Andi dikenal sebagai salah seorang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. Andi juga tercatat sebagai sekretaris

Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Adapun ketua Dewan Pembinanya tidak lain Presiden SBY. Fakta ini menunjukkan betapa dekat hubungan personal dan profesional Presiden SBY dan Andi. Publik layak berharap agar perkembangan kasus korupsi proyek Hambalang tidak berhenti di sini.

Penetapan Andi sebagai tersangka harus menjadi *entry point* bagi aparat untuk mengungkap lebih jauh praktik korupsi dalam kasus lain yang selama ini telah menjadi perhatian publik. Jika aparat pengadilan mampu membuktikan dugaan yang dipersangkakan, meminjam istilah Lord Acton, maka itu berarti Andi telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dua abad silam, dalam surat yang ditulis pada Bishop Mandell Creighton, Lord Acton pernah menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan korupsi dan kekuasaan. Acton berkata jelas sekali: *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Ungkapan ini berarti bahwa orang yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut pasti akan menyalahgunakannya.

Karena praktik korupsi telah begitu rupa menggerogoti bangsa ini, maka semangat memberantas korupsi harus terus dikobarkan. Para pejuang antikorupsi tidak boleh pesimistis hanya karena melihat begitu banyak kasus korupsi. Ini berarti perang melawan korupsi harus tetap menjadi agenda besar bangsa. Sebab, korupsi merupakan salah satu penyakit peradaban yang dapat melumpuhkan bangunan sebuah bangsa dan negara.

Harus ada kesepahaman di kalangan pejuang antikorupsi bahwa korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan bangsa. Agar keinginan untuk memberantas korupsi tercapai maka yang harus dilakukan para pejuang antikorupsi adalah menggunakan ilmu dan strategi yang tepat. Senada dengan itu, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan pernah mengingatkan bahwa memerangi korupsi tidak cukup jika hanya ditempuh dengan cara menggelorakan gemuruh perlawanan dan pekik antikorupsi.

Peringatan Anies ini penting dikemukakan karena salah satu faktor yang sangat mungkin memengaruhi lambatnya kinerja lembaga-lembaga antikorupsi adalah belum menggunakan strategi yang tepat. Salah satu pilihan strategi yang dapat dijadikan alternatif untuk memberantas korupsi adalah melalui pendidikan. Ada tiga

alasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini. *Pertama*, lembaga pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan (*knowledge*) untuk memberikan pencerahan terhadap kesalahan dalam pemberantasan praktik korupsi. Sejauh ini definisi korupsi baru dipahami sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal.

Sementara praktik korupsi dalam berbagai bentuk telah tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat mulai tingkat atas hingga rakyat jelata pun mengenal praktik korupsi dalam berbagai budaya. Dalam konteks budaya yang beragam, masyarakat bahkan menyamakan praktik korupsi dengan beberapa istilah. Seperti dikemukakan Mochtar Lubis (1988), ekspresi korupsi telah mewujud dalam praktik pemberian uang sogokan, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar atau pelumas, dan parsel lebaran.

Bahkan untuk mengelabui hukum, pemberian imbalan terkadang tidak langsung diberikan pada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya. Berkaitan dengan budaya ini lembaga pendidikan dapat menekankan agar pejabat publik dan masyarakat berhati-hati dengan ekspresi korupsi yang terselubung.

Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi sebagai gerakan yang bersifat massif. Apalagi jika dalam gerakan tersebut seluruh sumber daya institusi pendidikan dapat dilibatkan mulai pimpinan, dosen/guru, mahasiswa/ siswa, karyawan, dan *stakeholders* yang ada. Dengan gerakan yang massif diharapkan pada saatnya nanti bangsa ini dapat keluar dari problem korupsi.

Ketiga, jika dilihat secara jujur sejatinya praktik korupsi di negeri ini banyak melibatkan kalangan terdidik. Mereka umumnya alumni dari satuan lembaga pendidikan. Bahkan di antara mereka juga pernah mengenyam pendidikan tinggi. Kasus yang menimpa Andi seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi dunia pendidikan. Orang dengan latar belakang pendidikan mapan sekalipun dapat diduga terlibat praktik korupsi. Itu bisa jadi karena sistem di negeri ini sudah sangat korup.

Akibatnya, siapa pun yang masuk sistem pasti akan sulit menghindari budaya korupsi. Andi dan kalangan terdidik lain yang ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan yang telah dinyatakan

bersalah dalam kasus korupsi bisa jadi merupakan korban dari sistem administrasi negara yang tidak pernah dikuasainya dengan baik. Itu karena tatkala kalangan terdidik belajar di lembaga pendidikan, belum mendapat materi tentang tindakan yang termasuk kategori korupsi.

Jika hipotesis ini benar, berarti ikhtiar untuk memasukkan materi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan mutlak dilakukan. Ikhtiar untuk mengembangkan materi pemberantasan korupsi di setiap satuan pendidikan ini harus didukung agar lembaga pendidikan tidak dikatakan turut memproduksi koruptor.

Cendekiawan Pejuang Antikorupsi

Jika mengamati kasus korupsi di negeri ini, tampak sekali bahwa sebagian besar pelakunya kalangan terdidik. Rata-rata mereka adalah alumni pendidikan tinggi bergelar sarjana (S-1), master (S-2), dan doktor (S-3). Bahkan ada pelaku korupsi yang bergelar guru besar. Padahal pada saat berstatus akademisi di kampus, sang guru besar dikenal memiliki rekam jejak hebat.

Fenomena kasus korupsi yang melibatkan kalangan terdidik jelas menjadi ironi bagi dunia pendidikan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa pelaku korupsi kini tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI Polri, dan pengusaha. Kalangan akademisi dari kampus pun berpotensi menjadi pelaku korupsi. Pertanyaannya, mengapa mereka terseret dalam pusaran kasus korupsi?

Padahal mereka termasuk kelompok terdidik. Mereka bahkan dikenal memiliki rekam jejak yang hebat tatkala masih aktif sebagai pendidik. Jawabnya, karena mereka terlalu jauh bersinggungan dengan kekuasaan. Di samping itu, mereka juga tidak siap tatkala

berurusan dengan birokrasi dan segala aturan administrasinya. Karena itulah, Julien Benda dalam *The Betrayal of the Intellectuals* (Pengkhiatanan Kaum Intelektual, 1980) berpesan agar kaum cendekiawan berhati-hati jika bersinggungan dengan kekuasaan.

Pesan Julien tersebut penting agar kalangan terdidik tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Peringatan yang sama sebenarnya juga diutarakan Lord Acton ketika menulis surat pada Bishop Mandell Creighton. Dalam surat itu dia menulis ungkapan yang terkenal hingga kini, yaitu *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Artinya, orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.

Karena itulah, Julien mengingatkan agar kaum cendekiawan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saat bersinggungan dengan kekuasaan. Modal yang juga sangat penting dimiliki kaum cendekiawan adalah moral atau akhlak. Modal berupa akhlak ini terasa bersifat universal karena berlaku bagi siapa saja. Persoalan akhlak penting karena berkaitan dengan integritas seseorang.

Buya Syafi'i Maarif, mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa perspektif moral dapat digunakan untuk menilai apakah seorang yang terdidik telah berkhianat, terpeleset, tertipu, khilaf, naif, atau tidak paham dengan medan pergaulan sehingga salah dalam mengambil langkah. Dalam konteks inilah masyarakat dapat menilai moralitas mereka yang terdidik, tetapi tersandung kasus korupsi. Apakah mereka sekedar khilaf ataukah benar-benar terlena dengan godaan politik dan kekuasaan.

Dengan ilmu yang dimiliki, kalangan cendekiawan perguruan tinggi seharusnya tampil sebagai pahlawan antikorupsi. Tetapi, sayang sekali, realitas justru berkata lain. Seakan menyadari bahwa ada begitu banyak kalangan terdidik yang terlibat kasus korupsi kini dikembangkan pendidikan antikorupsi. Di beberapa perguruan tinggi, kurikulum pendidikan antikorupsi pun didisain dengan cara yang beragam.

Ada yang menjadikan mata kuliah mandiri. Ada juga yang menyisipkan (*inserting*) materi antikorupsi pada beberapa mata kuliah yang telah ada. Pengembangan materi pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menjadikan kalangan terdidik sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas. Agar dampaknya lebih massif, kurikulum

pendidikan antikorupsi seharusnya tidak hanya dikembangkan di tingkat pendidikan tinggi. Materi pendidikan antikorupsi juga harus dikembangkan di pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Dengan mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, diharapkan budaya berperilaku jujur tertanam dalam diri kalangan terdidik. Pelibatan lembaga pendidikan untuk mendorong munculnya cendekiawan sekaligus pahlawan antikorupsi melalui pengembangan pendidikan integritas penting dilakukan. Paling tidak ada dua modal yang telah dimiliki sehingga lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam gerakan mewujudkan anak-anak bangsa yang berintegritas.

Pertama, lembaga pendidikan memiliki sumber daya dengan seperangkat pengetahuan (*knowledge*) yang sangat memadai. *Kedua*, lembaga pendidikan memiliki jaringan (*networking*) yang kuat dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jika dua modal ini dimaksimalkan, akan muncul gerakan pemberantasan korupsi yang massif.

Bangsa ini jelas banyak berharap pada dunia pendidikan. Bukankah mereka yang sedang belajar di sekolah dan PT merupakan calon pemimpin negeri ini di masa mendatang? Jika kini kalangan cendekiawan sudah banyak yang belepotan dengan noda korupsi, pada siapa lagi bangsa ini berharap? Pertanyaan ini layak direnungkan.

Pahlawan yang telah gugur mendahului kita jelas tidak ingin melihat generasi penerusnya terpeleset berulang kali dalam pusaran kasus korupsi dengan berbagai ekspresi budayanya. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kalangan cendekiawan harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Para pahlawan yang telah gugur pasti tidak menuntut kita mengangkat senjata dan mempertaruhkan nyawa.

Yang diminta hanya kobarkan terus perjuangan melawan korupsi dan antek-anteknya. Bebaskan negeri ini dari kasus korupsi sehingga lebih bermartabat. Itulah cara terbaik untuk membahagiakan para pahlawan di alam baka sana.

Mendengar Koreksi RUU Ormas

Polemik mengenai rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU Ormas) terus menggelinding. Hal itu tampak dari pernyataan sikap sejumlah Ormas dalam keputusan resmi organisasi, diskusi publik, dan demonstrasi. Desakan agar pasal-pasal kontroversial segera direvisi begitu kuat. Bila tidak, begitu disahkan jadi UU Ormas, Ormas-ormas itu telah berancang-ancang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah dan legislatif selayaknya mendengar suara kritis ini.

Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal termasuk yang telah bersikap tegas menolak RUU ormas. Sikap itu diambil karena menurut hasil telaah Muhammadiyah, RUU ormas yang dibahas di DPR dapat membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpotensi menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politik. Dalam pertemuan di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setidaknya ada 96 ormas lain yang juga menolak.

Sementara, PB NU mengusulkan pembahasan RUU ditunda terlebih dulu hingga ada titik temu, terutama terkait pasal-pasal

yang masih diperdebatkan. Sikap beberapa ormas tersebut dapat dipahami karena mereka ingin memastikan bahwa RUU Ormas tidak menjadi pemasung. Apalagi, ormas sekelas Muhammadiyah dan NU yang telah banyak berkiprah dan berusia jauh lebih tua dari negeri ini.

Ormas ingin RUU itu menjamin kebebasan berserikat, sementara pemerintah berkepentingan mengendalikan Ormas. Dalam perspektif pemerintah, UU No 8/1985 tentang Ormas dianggap tidak lagi mampu mengikuti perkembangan. Itu karena perkembangan ormas, terutama pada masa reformasi, terasa sangat dinamis dan meriah.

Alasan lain yang dimajukan pemerintah adalah keberadaan Ormas anarkistis yang sering mengganggu masyarakat dan merongrong kewibawaan pemerintah. Dalam aksinya ormas anarkistis telah memanfaatkan simbol-simbol agama atau simbol negara. Padahal, Jalaluddin al-Suyuthi, ulama besar dan mujadid Islam, menyatakan bahwa tidak semua orang dapat melaksanakan tugas tersebut. Menurut al-Suyuthi, hanya ulama dan penguasa yang dapat bertugas amar ma'ruf nahi munkar. Ulama mengembang tugas itu karena memiliki ilmu, sedangkan penguasa memiliki kekuasaan.

RUU Ormas juga dirancang untuk mengatur keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik yang didirikan WNI maupun warga asing. Dalam penilaian pemerintah, keberadaan LSM harus diatur agar kiprahnya dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional. LSM yang dikelola orang asing pun harus menunjukkan komitmen untuk kepentingan nasional dan turut menjaga keutuhan NKRI. Regulasi ini dinilai penting, karena diduga kuat banyak LSM yang bekerja tidak untuk kepentingan nasional, melainkan untuk *funding agency* asing.

Jika dicermati secara mendalam dari RUU ormas, paling tidak ada tiga poin yang penting diperhatikan. *Pertama*, RUU Ormas berpotensi menggeneralisasi semua lembaga sosial kemasyarakatan. Itu berarti posisi ormas yang telah berkontribusi luar biasa bagi perjuangan kemerdekaan dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, seperti Muhammadiyah dan NU, tak berbeda dengan LSM baru.

Berkaitan dengan persoalan ini, RUU ormas harus membedakan secara tegas peraturan untuk ormas dan LSM, apalagi ormas asing. Poin ini penting diperhatikan karena Muhammadiyah dan NU

dengan ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial lainnya memiliki jaringan yang luas mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Itu berbeda dengan LSM yang hanya menekankan pekerjaan di satu bidang dan bersifat elitis. Karena itu, penyamaan ormas dan LSM jelas sebuah kesalahan yang mendasar.

Kedua, RUU ormas membuka peluang munculnya otoritarianisme baru. Apalagi, dalam RUU itu ada ketentuan bahwa Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) dapat mencabut izin ormas. Jika itu yang terjadi, akan muncul budaya represif atas nama undang-undang. Padahal, kebebasan berserikat dan berkumpul jelas diatur dalam konstitusi. Apalagi, konteks pembuatan UU No 8/1985 dan RUU Ormas jauh berbeda. UU No 8/1985 dibuat suasana rezim otoritarian Orde Baru. Sementara RUU Ormas kini disusun dalam suasana demokratis. Karena itu, RUU Ormas seharusnya menjamin Ormas untuk menampilkan kekhasan asal tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan nasional NKRI.

Ketiga, RUU ormas mewajibkan pencantuman Pancasila sebagai asas bagi setiap Ormas. Eloknya, RUU Ormas memberikan kelonggaran bagi Ormas yang ingin menggunakan asas lain, dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila. Jika itu yang dilakukan, Ormas berbasis agama tidak harus mengganti asasnya dengan Pancasila. Jangan korek lagi trauma sosial dan politik asas tunggal era Orde Baru yang justru menyempitkan keterbukaan ideologi Pancasila. Tak perlu ada tafsir tunggal atas Pancasila dengan menafikan indahnyanya pelangi keragaman yang membentuk Indonesia tercinta.

Jika beberapa hal yang berpotensi memicu pertentangan itu kembali didialogkan, rasanya masing-masing pihak, yakni pemerintah, legislatif, dan ormas yang menjadi sasaran RUU, pasti menemukan jalan keluar.

Memperkuat Pilar *Civil Society*

Konsep *civil society* umumnya dipahami sebagai kehidupan sosial yang bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang disepakati warga. Itu berarti nilai-nilai *civil society* sesungguhnya sangat penting untuk mewujudkan sikap dan tindakan yang bebas dari kepentingan negara atau partai politik.

Pendek kata, *civil society* menekankan pentingnya ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai media komunikasi antarwarga. Mengingat begitu pentingnya keberadaan *civil society* dalam kehidupan berbangsa maka sejak pertengahan 1990-an konsep ini menjadi salah satu tema yang paling banyak dibicarakan umat. Konsep *civil society* pun dicarikan padanan istilah agar lebih membumi, bernuansa Islami, dan selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan.

Beberapa pemikir kemudian menyandingkan *civil society* dengan konsep masyarakat madani (Dato Seri Anwar Ibrahim), masyarakat

sipil (Mansour Fakih), serta masyarakat kewargaan (Ryas Rasyid dan Riswanda Immawan). Meski berbeda-beda, beberapa istilah tersebut secara substantif bermuara pada perlunya penguatan peranan masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Kehadiran *civil society* sangat bermanfaat untuk mengontrol kebijakan negara atau partai politik yang cenderung memosisikan rakyat sebagai subyek yang lemah.

Sebagai kekuatan pengontrol kebijakan pemerintah dan partai politik, *civil society* dituntut untuk mandiri. Tetapi sangat disayangkan, pilar-pilar *civil society* belum sepenuhnya mandiri tatkala berhadapan dengan kepentingan negara dan partai. Elemen *civil society* masih menunjukkan ketergantungan pada negara, terutama bantuan pendanaan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin *civil society* dapat berdiri tegak sekaligus kritis terhadap kebijakan pemerintah jika dalam setiap menyelenggarakan kegiatan selalu meminta belas kasihan?

Dalam kondisi bergantung pada pemerintah maka pasti muncul sikap “ewuh pakewuh” tatkala harus mengkritisi berbagai kebijakan yang kurang mencerminkan rasa keadilan. Padahal kemandirian mutlak diperlukan untuk menjamin independensi pandangan, sikap, dan tindakan. Konteks sosial politik terkini, jelas sekali membutuhkan kiprah *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang dan pengontrol.

Eksistensi *civil society* diharapkan dapat memainkan peran strategis di tengah kegaduhan situasi politik Tanah Air. Apalagi kini partai pendukung pemerintahan baru yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sedang berhadap-hadapan dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Partai-partai yang tergabung dalam KIH merupakan pendukung pasangan pemenang pilpres, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sementara partai-partai yang tergabung dalam KMP adalah pendukung pasangan yang kalah dalam pilpres, Prabowo-Hatta.

Persaingan KIH versus KMP tentu sangat berpengaruh pada hubungan kerja pemerintahan yang baru dengan parlemen. Apalagi KMP kini berkuasa penuh di parlemen karena sukses menguasai paket pimpinan DPR dan MPR. Dinamika politik di parlemen ini jelas membuat rakyat dan dunia usaha sangat khawatir. Dapat dibayangkan panasnya hubungan presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK, dengan KMP yang menguasai DPR dan MPR.

Dalam suasana politik yang diwarnai persaingan itulah kiprah *civil society* mutlak diperlukan. Jika hubungan antarlembaga negara

terus memanas, yang menjadi korban adalah rakyat. Itu karena rakyat pasti tidak dapat merasakan perubahan ke arah yang lebih baik sebagai konsekuensi pergantian kepemimpinan nasional. Untuk itulah pilar-pilar *civil society* harus menampilkan diri sebagai penengah sekaligus penyambung kepentingan rakyat.

Kita berharap ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU tampil sebagai kekuatan *civil society* yang sebenarnya. Dua ormas terbesar yang jejak kejuangannya telah teruji ini pasti dapat menekan anggota legislatif agar bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hebat dan bermartabat. Bersama dengan kekuatan *civil society* lain, Muhammadiyah dan NU juga dapat menjalankan fungsi *check and balances* pada pemerintahan yang baru. Semua ini harus dilakukan pilar-pilar *civil society* agar pohon demokrasi yang tumbuh subur tidak layu.

Selain mengandalkan kekuatan ormas, kita juga berharap pada media massa. Kekuatan media cetak dan elektronik sejauh ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi kontrol. Di luar ormas dan media massa kita juga dapat mengandalkan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Demikian juga dengan asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok *civic forum* yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semua kelompok ini dapat bersinergi demi tegaknya *civil society* yang kuat.

Jika menengok kasus-kasus masa lalu yang menjadi perhatian publik, pilar-pilar *civil society* di negeri ini layak berbangga. Itu karena kekuatan *civil society* pernah menunjukkan kiprah luar biasa dalam kasus yang menimpa mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dalam kasus yang populer disebut “Cicak versus Buaya”, kekuatan *civil society* sukses memberikan tekanan pada kejaksaan dan kepolisian. Demikian juga kasus “Gerakan Koin untuk Prita” dalam rangka membantu Prita Mulyasari untuk lepas dari jeratan hukum.

Dua kejadian itu membuktikan betapa kesadaran masyarakat sudah demikian tinggi. Yang patut dibanggakan, ternyata dukungan berbagai kelompok *civil society* bersifat lintas agama, budaya, etnis, dan generasi. Kini dunia politik nasional sedang dilanda prahara hebat seiring dengan penetapan paket perundang-undangan yang terus memicu kontroversi. Misalnya, penetaan revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang populer

disebut UU MD3. Yang tidak kalah heboh adalah perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan DPR, dari pilihan rakyat secara langsung menjadi pilihan DPRD setempat.

Dua peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses politik di DPR harus menjadi perhatian *civil society*. Dalam konteks inilah *civil society* dapat menjadi kekuatan untuk memberikan daya dobrak (*the striking force*) pada parlemen agar melahirkan kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyat. Bukankah anggota dewan yang terhormat merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung?

BAB II

Beragama Minus Kesalehan

Memoderasi Pemikiran Islam

Diakui atau tidak, wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini telah diwarnai dialektika pemikiran yang melibatkan kelompok liberal dan fundamental. Jika dilihat mundur, pergumulan kelompok Islam liberal dan Islam fundamental bahkan telah terjadi sejak 1970-an.

Saat itu Nurcholish Madjid (Cak Nur), tokoh sentral pembaruan pemikiran Islam, terlibat perdebatan sengit dengan kelompok Islam fundamental. Beberapa gagasan Cak Nur pun menjadi perdebatan hangat seperti sekularisasi, Islam yes partai Islam no, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), ide tentang kemajuan (*the idea of progress*), dan pentingnya sikap terbuka (*inklusivisme*).

Meski tidak menggunakan istilah Islam liberal dalam karyanya, melihat substansi pemikiran yang dikembangkan, tampaknya Cak Nur layak dijadikan rujukan kelompok Islam liberal. Menurut Charles Kurzman dalam *Liberal Islam: A Sourcebook* (1998), umumnya tema yang diwacanakan kelompok Islam liberal meliputi menolak teokrasi, demokrasi, relasi agama dan negara, pluralisme, hak-hak perempuan, dan kebebasan berpikir.

Sementara kelompok Islam fundamental melalui beberapa tokoh dan jaringan institusinya juga tidak mau kalah. Mereka terus mengampanyekan penolakan terhadap gagasan kelompok Islam liberal. Meski bernaung dalam organisasi yang berbeda-beda, menurut Dekmejian dalam *Islamic Revival* (1988), kelompok ini umumnya mewacanakan pemikiran tentang; Islam sebagai totalitas ajaran yang meliputi agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*), anjuran kembali kepada Alquran dan Sunnah, puritanisme dan keadilan sosial (*puritanism and social justic*), kedaulatan hanya ada pada Allah dan kekuasaan tunduk pada syariah (*Allah's sovereignty and the rule syari'ah*), serta jihad sebagai sarana perjuangan untuk mencapai tujuan.

Kelompok Islam fundamental juga terus berusaha untuk menanamkan pengaruh baik melalui perjuangan politik maupun kultural. Dengan didorong keinginan untuk keluar dari apa yang mereka sebut sebagai krisis multidimensi di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, spiritual, dan militer, kelompok ini terus berusaha bangkit. Seiring dengan meningkatnya peran kelompok Islam fundamental tampak sekali bahwa kelompok Islam liberal kurang dapat memberikan pengaruh.

Kelompok Islam liberal bahkan tampak lebih sering menjadi korban ketimbang pemenang. Selanjutnya Dekmejian menjelaskan karakter kelompok Islam fundamental meliputi: merata (*pervasiveness*), memiliki banyak pusat (*polycentrism*), dan berjuang secara terus-menerus (*persistence*). Seperti dapat kita amati, gerakan Islam fundamental yang menonjolkan simbol-simbol keagamaan merupakan fenomena yang merata hampir seluruh kota besar di Tanah Air.

Gerakan ini bahkan dapat dikatakan bersifat transnasional, menembus batas wilayah negara. Sementara karakter *polycentrism* berarti bahwa dalam rangka memperjuangkan ideologinya, kelompok Islam fundamental telah menggunakan banyak organisasi. Setiap organisasi bertumpu pada seorang pemimpin kharismatik. Menariknya, meski yang diperjuangkan relatif sama, di antara mereka ternyata tidak saling berhubungan secara organisatoris.

Berkaitan dengan karakter *polycentrism* ini peranan pemimpin lokal menjadi sangat menonjol dalam melakukan rekrutmen dan indoktrinasi terhadap anggota baru. Sementara karakter *persistence* tampak dalam perjuangan kelompok Islam fundamental yang tidak

pernah mengenal lelah. Bahkan terkadang perjuangan itu dilakukan dengan cara-cara radikal seperti yang ditempuh anggota jaringan gerakan terorisme.

Karena itu, dapat dipahami mengapa terorisme di Tanah Air terasa sulit dilumpuhkan meski banyak tokohnya yang telah dihukum dan bahkan ditembak mati. Harus diakui, memang tidak semua kelompok Islam fundamental menempuh perjuangan dengan kekerasan. Tetapi, protes dengan melibatkan massa dalam jumlah yang besar secara terus-menerus setidaknya telah menunjukkan betapa kelompok tersebut bersifat sangat reaksioner dalam merespons situasi yang berkembang.

Jika melihat tren yang berkembang akhir-akhir ini, besar kemungkinan kelompok Islam fundamental akan tetap memberikan pengaruh yang signifikan. Apalagi jika melihat kecenderungan Islam fundamental yang kini sedang mengalami peningkatan syahwat politik. Karena itu, penting direnungkan hipotesis William Liddle, Indonesianis asal Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa semakin demokratis sebuah negara, semakin besar kemungkinan munculnya gerakan fundamental.

Sebaliknya, semakin otoriter suatu negara, semakin kecil pula kemungkinan munculnya gerakan fundamentalis. Agar dialektika pemikiran Islam tidak saling berhadapan, rasanya setiap kelompok perlu bergerak menuju ke tengah sehingga lebih moderat. Langkah ini penting karena setiap kelompok memiliki kelemahan mendasar. Kelompok Islam liberal, meminjam istilah Kuntowijoyo (2001), tampak mengalami gejala "sawan kekanakkanan".

Fenomena kekanak-kanakan ditunjukkan melalui cara berpikir yang "sok liberal" atau "kekiri-kirian (sok radikal)." Wacana yang dikemukakan juga bukan sesuatu yang baru, bahkan terkadang kurang mendalam, parsial, dan terputus dari khazanah masa lampau. Sementara Islam fundamental yang kerap menampilkan wajah pemikiran radikal jelas kurang relevan jika dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial keagamaan era kontemporer.

Sebagai upaya untuk memoderasi pemikiran Islam, yang pertama harus dilakukan adalah menganggap pemikiran itu sebagai khazanah sehingga tidak perlu disakralkan. Langkah ini penting agar tidak terjadi penyakralan terhadap pemikiran keagamaan (*taqdis al-afkar al-diniy*). Dengan menempatkan produk pemikiran sebagai khazanah berarti akan menghilangkan sebagian "beban" sejarah sehingga kita

dapat lebih kritis memberikan koreksi.

Langkah kedua adalah menampilkan corak pemikiran Islam yang menggabungkan aspek modernitas dan tradisionalitas, yang dalam bahasa pesantren dikatakan; *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Sikap ini penting agar pembaruan pemikiran memiliki kesinambungan sejarah dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

Langkah ketiga adalah dengan memperbanyak dialog pemikiran. Dialog pemikiran yang tulus dengan disertai kesediaan untuk menerima kritik mutlak dilakukan supaya tidak ada prasangka antarkelompok. Agar tidak terkesan formal, dialog juga dapat diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat informal seperti pentas budaya, seni, musik, dan olahraga. Melalui dialog pemikiran dan pertemuan-pertemuan informal inilah, kita dapat keluar dari dua ekstremitas pemikiran; liberal dan fundamental.

Berdamai dengan Perbedaan

Ungkapan penuh kegembiraan sudah seharusnya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Itu karena kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Umat Islam pun menyambut Ramadan dengan ungkapan; *marhaban ya Ramadan*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap pribadi harus menyiapkan diri dengan hati yang lapang untuk ditaburi benih-benih kebaikan dari Ramadan. Bagi setiap muslim, Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk mengasah dan mengasuh jiwa sehingga bersih dan suci dari segala kekhilafan.

Meski seringkali ada perbedaan dalam menentukan awal Ramadan, umat tetap menyambut bulan penuh berkah dengan suka cita. Seperti diketahui, Muhammadiyah jauh hari telah menetapkan awal Ramadan 1435 Hijriah satu hari lebih dulu dari pemerintah dan NU. Bahkan beberapa kelompok keagamaan seperti tarekat Naqsyabandiyah, jamaah al-Nadhir, dan Aliran Rabo Wage (Abohe), juga menentukan awal dan akhir Ramadan berbeda dari pemerintah. Semua perbedaan itu ternyata tidak mengurangi

sambutan umat terhadap datangnya tamu agung Ramadan.

Setiap ormas dan faham keagamaan pasti memiliki hitung-hitungan tatkala menentukan awal dan akhir Ramadan. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat pluralitas pandangan umat dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Karena pluralitas pandangan merupakan suatu keniscayaan, maka harus disiapkan sikap untuk berdamai dengan perbedaan. Umat harus diingatkan bahwa sejarah agama-agama juga lahir dalam suasana budaya masyarakat yang plural.

Karena itu tidak mengherankan jika dalam kitab suci ditegaskan bahwa pluralitas merupakan rencana Tuhan (*sunnatullah*). Dalam situasi budaya masyarakat yang plural itulah setiap pribadi harus bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Sikap ini penting karena tidak mungkin memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan kita. Jika perbedaan dipahami secara positif maka itu justru menjadi ujian bagi setiap pribadi. Pada saat itulah kita akan menyaksikan siapa yang paling banyak memberikan kontribusi bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam Alqur'an ditekankan bahwa setiap penganut agama dan paham keagamaan harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik (QS. Al-Maidah: 48). Kalam Ilahi ini penting dijadikan kerangka etik untuk mengimplementasikan ajaran tentang persaudaraan (*ukhuwah*). Karena itu perbincangan mengenai ukhuwah harus terus digelorakan seiring terjadinya beragam konflik sosial berlatar belakang perbedaan agama dan paham keagamaan.

Mengingat pentingnya ajaran tentang ukhuwah maka kita harus mempersaudarakan berbagai paham keagamaan. Sejarah Islam yang dihitamkan oleh peperangan bersaudara dan sikap saling mengkafirkan, terutama oleh kaum Khawarij, harus dijadikan pelajaran berharga. Dengan pikiran yang jernih kita harus merumuskan sikap agar berdamai dengan perbedaan. Termasuk perbedaan dalam menentukan awal dan akhir Ramadan.

Dalam sebuah pernyataan yang penuh hikmah dikatakan bahwa perbedaan di kalangan umat (yang berilmu) adalah rahmat. Kita juga sering mendengar slogan yang menyatakan bahwa perbedaan itu indah. Karena itu kita harus tetap bersatu dalam keragaman (*unity in diversity*). Meski realitas bangsa kita menunjukkan "ber-Bhinneka", namun harus tetap "Tunggal Ika". Itu berarti perbedaan seharusnya tidak menghalangi kita untuk bersatu sehingga kehidupan

terasa penuh rahmat dan indah.

Selain perbedaan dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, bulan penuh berkah ini juga masih sering diwarnai aksi *sweeping* oleh ormas keagamaan tertentu. Tindakan *sweeping* biasanya dilakukan di sejumlah rumah hiburan umum (RHU) karena dianggap sumber kemaksiatan. Restoran dan warung yang buka pada siang hari juga tidak luput dari *sweeping*. Tindakan *sweeping* ini pun dikemas dalam konteks dakwah amar makruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran).

Tindakan *sweeping*, apalagi disertai kekerasan, yang dikatakan merupakan implementasi ajaran dakwah amar makruf nahi munkar jelas tidak dapat dibenarkan. Itu karena menurut pembaru Islam, Jalaluddin al-Suyuti, yang berhak melaksanakan tugas amar makruf nahi munkar hanyalah ulama dan pemerintah. Menurut al-Suyuti, ulama memiliki otoritas untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar karena memiliki ilmu. Sementara pemerintah memiliki seperangkat kekuasaan untuk memaksa rakyat menaati peraturan dan menindak setiap perbuatan yang melanggar hukum.

Itu berarti jika ada perbuatan yang dianggap menodai kesucian Ramadan, masyarakat harus segera melaporkan pada aparat. Hal ini penting ditekankan untuk menghindari kekerasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pengelola RHU, restoran, dan warung, juga wajib diingatkan untuk menaati peraturan demi menjaga kekhusyukan umat beribadah selama Ramadan.

Kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan hingga kini masih menyisakan persoalan. Hal itu setidaknya dapat diamati dari berbagai kasus kekerasan sosial bernuansa perbedaan paham keagamaan. Salah satu contohnya adalah kekerasan yang terjadi pada penganut Syi'ah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Akibat konflik tersebut kelompok Syi'ah harus terusir dari kampung halamannya. Kasus ini menjadi indikator ketidaksiapan kelompok-kelompok yang berbeda untuk hidup bersama.

Untuk melaksanakan ajaran agama yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, rasanya menarik disimak kisah pendiri Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, yang pernah tidak membaca qunut saat shalat subuh karena ingin menghormati makam pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, yang berada tidak jauh dari tempatnya shalat. Teladan Imam Syafi'i itu penting

dikemukakan sebagai pelajaran betapa tokoh-tokoh mazhab fikih saling menghormati.

Sering dikatakan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia merupakan penganut Mazhab Syafi'i . Karena itu, mestinya kisah inspiratif Imam Syafi'i dijadikan teladan dalam menyikapi perbedaan. Bahkan seharusnya semua tradisi keberagamaan dikembalikan pada Tuhan. Sebab, hanya Tuhan yang berotoritas untuk memutuskan persoalan perbedaan paham keagamaan.

Itu berarti kita tidak boleh mengambil alih otoritas Tuhan dengan cara apa pun, termasuk memberikan fatwa yang tidak menghargai perbedaan di kalangan umat. Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang berbeda dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan. Justru yang harus dikembangkan adalah menghormati perbedaan. Karena itu mari kita gelorakan semangat untuk merayakan dan menghormati perbedaan (*celebrate and respect diversity*).

Menjauhi Paradoks Ramadan

Sebagai umat Islam, kita terus bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan. Meski penentuannya terkadang berbeda, umat selalu mengucapkan salam kepada bulan yang penuh rahmat dan ampunan dengan ungkapan: *marhaban ya Ramadan*. Ungkapan penuh kegembiraan itu menunjukkan bahwa setiap pribadi telah menyiapkan diri dengan hati yang lapang untuk ditaburi benih-benih kebaikan dari Ramadan. Hal itu karena bagi setiap Muslim Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk mengasah dan mengasuh jiwa sehingga bersih dan suci dari segala kekhilafan.

Seiring dengan datangnya Ramadan, umat Islam terutama yang berada di perantauan pasti disibukkan dengan persiapan mudik ke kampung halaman. Tradisi mudik dipastikan semakin meningkat saat menjelang lebaran. Hal itu dapat diamati dari membludaknya pesanan tiket menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tiket pesawat, kereta api, dan bus antar kota, telah ludes habis terjual. Jelang akhir Ramadan juga memberikan kesibukan pada mereka yang hendak

pulang ke kampung halaman dengan menggunakan kendaraan pribadi. Meski perjalanan terasa berat dengan biaya yang tidak murah, namun semua itu dijalani dengan penuh kegembiraan.

Uniknya tradisi mudik seakan menjadi ritual bagi semua kalangan. Tidak peduli kelas sosial atas, menengah, atau rakyat jelata. Berbagai motivasi pun turut menyertai pemudik, seperti rindu kampung halaman, sungkem orang tua, silaturahmi dengan saudara, *nyekar* anggota keluarga yang telah meninggal dunia, dan keinginan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Karena itulah tidak berlebihan jika Andre Moller dalam *Ramadan di Jawa: Pandangan dari Luar* (2002) mengatakan bahwa fenomena mudik merupakan aktivitas keagamaan yang khas dan unik di Nusantara untuk menyambut Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Perlu ditekankan bahwa yang harus dipersiapkan untuk menyambut Ramadan adalah menata hati. Hal itu penting agar kita mampu memanfaatkannya sebagai momentum untuk memperbanyak ibadah. Di samping untuk memperbanyak ibadah, Ramadan sejatinya dapat digunakan sebagai momentum untuk mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengotori hati. Banyak pelajaran berharga yang dapat diperoleh selama menjalani puasa Ramadan seperti nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, solidaritas sosial, serta pengharapan pada pahala dan kenikmatan yang dijanjikan Allah SWT.

Sayang sekali tidak semua orang mampu menuai hasil dari *training* Ramadan. Bahkan ada sebagian umat yang perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai Ramadan. Perilaku mereka ini dapat dikategorikan sebagai paradoks Ramadan. Paling tidak ada tiga jenis perilaku yang disadari atau tidak dapat merusak nilai-nilai puasa Ramadan.

Pertama, perilaku boros dan konsumtif. Perilaku boros ini dapat diamati melalui kebiasaan umat yang suka berbelanja secara berlebihan saat Ramadan. Pola hidup boros dan konsumtif semakin meningkat saat jelang lebaran. Karena berperilaku konsumtif maka mereka pun menyambut Ramadan dengan ungkapan; *marhaban ya bulan belanja*. Anekdote ini menunjukkan betapa budaya konsumtif telah menjadi gaya hidup sebagian umat selama Ramadan. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selalu ada persaingan yang cukup sengit antara masjid dan pusat perbelanjaan. Itu terjadi terutama saat pertengahan Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Budaya

konsumtif jelas menjadi paradoks Ramadan yang mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan.

Kedua, perilaku tidak sabar. Hal itu dapat diamati dari kegiatan sebagian organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang suka menempuh jalan anarkistis dengan alasan ingin menjaga suasana Ramadan. Dengan mengatasnamakan dakwah untuk memerintah kebaikan dan melarang kemunkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*), mereka tindak segan melakukan *sweeping* dan tindak kekerasan. Padahal prinsip dalam berdakwah semestinya mengajak dan merangkul. Nabi SAW pun berpesan agar dalam berdakwah selalu berpegang pada prinsip mempermudah dan tidak mempersulit, mengembirakan dan tidak menakut-nakuti.

Ramadan jelas mengajarkan nilai-nilai kesabaran seperti tampak dalam ajaran untuk menjaga diri dari tindakan yang dapat membatalkan dan merusak ibadah puasa. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang berpuasa tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun dan atas nama apa pun. Justru sikap berempati pada orang lain yang harus dikedepankan. Pihak-pihak yang berpotensi merusak suasana Ramadan juga harus menunjukkan sikap berempati pada orang yang berpuasa. Pada konteks inilah para pengelola hiburan malam, rumah makan, dan warung tegal (warteg), harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ketiga, perilaku bermalas-malasan. Jika sifat bermalas-malasan menjadi budaya selama Ramadan maka produktivitas kerja umat akan menurun drastis. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi berpuasa dapat menimbulkan daya tahan tubuh menurun. Tetapi itu jelas bukan alasan untuk mengurangi produktivitas. Harus selalu diingat bahwa sifat malas merupakan paradoks Ramadan sehingga harus dijauhi.

Spirit bekerja keras terasa sejalan dengan pernyataan Ilahi bahwa Allah terus berada dalam kesibukan (QS. Al-Rahman: 29). Melalui kerja keras itulah kita menyaksikan banyak karya besar Nabi Muhammad dan sahabatnya pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, kemenangan pasukan Muslim dalam Perang Badar dan penaklukan kota Makkah. Sejarah keemasan Islam juga diwarnai prestasi hebat yang diukir pada bulan Ramadan seperti keberhasilan menaklukkan Spanyol dan kemenangan dalam Perang Salib. Bahkan pernyataan kemerdekaan RI juga diproklamasikan pada bulan Ramadan.

Berbagai peristiwa itu menunjukkan bahwa Ramadan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kerja keras dan produktivitas. Bukankah Ramadan secara bahasa berarti membakar? Yang harus dibakar adalah sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai Ramadan. Karena itu, mari jauhi perilaku yang menjadi paradoks Ramadan.

Mudik ke Kampung Rohani

Dalam setiap bulan Ramadan, seluruh umat Islam berlomba-lomba mencari pahala sebesar-besarnya dari Allah SWT. Tidak hanya menjalankan ibadah puasa, banyak umat Islam yang tidak ingin menyalahkan waktu untuk beribadah, baik membaca Alquran, menjalankan shalat sunah, shalat berjamaah, mengikuti ceramah-ceramah dari para mubalig, maupun berbuat kebaikan seperti bersedekah. Kedekatan diri terhadap sang khalik pun semakin terasa begitu mendalam.

Dalam perspektif tasawuf, perasaan dekat dengan Allah itu disebut dengan *muraqabah*. Merasa dekat dengan Allah itulah sesungguhnya esensi nilai-nilai ketakwaan yang menjadi tujuan puasa (QS. Al-Baqarah: 183). Puasa telah mengajarkan makna kehadiran Allah dalam hidup. Dengan kata lain, melalui puasa kita merasakan Allah benar-benar bersifat *omnipresent*. Kesadaran itu membuat orang yang berpuasa mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa.

Tantangan kita selanjutnya adalah menjaga amalan baik yang telah dilakukan selama Ramadan untuk dibudayakan sepanjang tahun. Namun, dalam proses kedekatan diri kepada Allah tersebut, terdapat fenomena yang khas dan unik di seantero Nusantara saat mendekati pengujung Ramadan. Fenomena itu adalah tradisi mudik Lebaran.

Tradisi mudik Lebaran seakan menjadi ritual bagi seluruh kalangan. Baik kalangan ekonomi menengah ke bawah maupun ke atas ikut menikmati tradisi tersebut. Hawa kampung halaman dan berkumpul keluarga terasa sangat kental. Dalam budaya Jawa ada istilah *sangkan paraning dumadi*. *Sangkan paran* berarti asal mula tujuan atau arah dan *dumadi* berarti kejadian atau yang terjadi. Seseorang harus berusaha menggapai kesadaran hidup. "Tujuanmu apa? Untuk apa? Dan ke mana?"

Sedangkan mudik (menuju udik) atau pulang ke kampung halaman/desa, dari hilir (perantauan) kembali ke hulu (kampung halaman), memiliki berbagai motivasi yang menyertai para pemudik. Misalnya, rindu kampung halaman, sungkem orang tua, silaturahmi dengan saudara, nyekar anggota keluarga yang telah meninggal dunia, dan bahkan ada yang ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama.

Itu sebabnya rata-rata pemudik rela mengeluarkan banyak biaya, bersusah payah, berdesak-desakan, dan terkadang tidak memedulikan keselamatan diri. Fenomena seperti itu bisa dilihat di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Di sepanjang jalan seorang pemudik mengendarai sepeda motor berboncengan dengan membawa barang-barang yang sangat banyak. Itulah tradisi unik yang tidak pernah lepas dari Nusantara ini.

Bahkan, tradisi mudik tersebut juga berpengaruh pada pergerakan perekonomian di pedesaan. Mayoritas mereka pasti mudik ke desa. Keterkaitan mudik dengan pertumbuhan ekonomi di desa bisa diamati melalui kebiasaan pemudik yang pulang kampung dengan membawa hasil kerja di perantauan berupa uang dan barang dalam jumlah besar. Mereka yang datang dengan berbagai latar belakang sosial biasanya membagikan bingkisan Lebaran kepada keluarga dan tetangga terdekat.

Tradisi berbagi yang dilakukan pemudik itu merupakan implementasi ajaran agama yang menekankan pentingnya memberi (*religious giving*). Para pemudik juga mendapat spirit dari ajaran Nabi

Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tangan di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan di bawah (peminta).

Tetapi, ada yang lebih penting dari mudik ke kampung halaman, yaitu mudik ke kampung rohani. Secara spiritual, mudik dalam Alquran berarti kembali kepada ampunan Allah. Dalam konteks itu, Allah berfirman: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Ali ‘Imran: 133).”

Firman Allah tersebut berbicara mengenai perintah agar kita segera “mudik” dengan cara kembali kepada ampunan Tuhan. Jika dalam tradisi mudik Idul Fitri kita harus mempersiapkan bekal yang begitu banyak, untuk kembali kepada Allah jelas dibutuhkan bekal yang lebih banyak lagi. Derajat ketakwaan sebagai hasil ibadah puasa bisa dijadikan bekal yang sangat berharga untuk kembali kepada Allah.

Sayang, kita diingatkan Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa tidak semua orang yang berpuasa mampu mencapai derajat ketakwaan karena gagal menangkap pesan puasa. Salah satu pesan ibadah puasa adalah kita menjadi hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Aktualisasi sifat itu bisa diwujudkan melalui sikap senantiasa berempati kepada fakir miskin. Selama berpuasa, kita juga telah berlatih untuk menahan lapar dan dahaga. Maka, di tengah situasi masyarakat miskin di pedesaan, pesan puasa tersebut rasanya bisa dijadikan spirit untuk membangun solidaritas sosial.

Melalui tradisi mudik, kita juga memperoleh pelajaran betapa pemudik telah mengamalkan pesan puasa dalam wujud yang sangat positif. Mereka datang dari tempat yang jauh karena didorong keinginan untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dengan keluarga dan tetangga. Mereka juga mengajarkan berbagi kebahagiaan dengan sesama melalui pemberian angpao, pakaian, dan bingkisan Lebaran lain. Di antara pemudik, memang ada yang konsumtif dalam menyambut Idul Fitri. Tentu saja budaya konsumtif itu sangat bertentangan dengan pesan puasa yang mengajarkan kesederhanaan.

Menurut ajaran agama, Idul Fitri tidak harus diwujudkan dalam bentuk berpakaian baru dan kebiasaan konsumtif lain. Perayaan Idul Fitri harus ditandai dengan peningkatan ketaatan kepada Allah. Hal tersebut sejalan dengan ajaran yang menyatakan, *laysa al-'id liman labisa aljadid wa lakinna all-'id liman taqwahu yazid*, yaitu

esensi Idul Fitri itu tidak terletak pada pakaian baru, melainkan ketakwaan yang terus bertambah. Semoga Ramadan menjadi bulan luar biasa yang mampu mengubah kultur hidup kita dari yang belum taat menjadi lebih taat kepada Allah.

Haji, Laksana Pertunjukan Akbar

Tokoh revolusioner Iran, Ali Shariati (1933-1977), dalam karyanya yang berjudul *Hajj (The Pilgrimage)*, mengilustrasikan ibadah haji laksana sebuah pertunjukan. Pernyataan Shariati itu jelas tidak berlebihan jika kita memperhatikan protokoler ibadah haji.

Jika diamati secara seksama, jelas sekali bahwa pelaksanaan rukun Islam kelima itu memang laksana sebuah pertunjukan. Tetapi, bukan pertunjukan biasa, melainkan pertunjukan akbar karena melibatkan jutaan orang. Dalam pertunjukan akbar itu, Allah SWT langsung bertindak sebagai sutradara. Tokoh-tokoh yang harus diperankan diantaranya Adam, Ibrahim, Hajar, dan setan.

Lokasi utamanya di sekitar Masjidharam, Masjid Nabawi, Tanah Haram, Kakbah, Shafa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan tempat bersejarah lain yang selalu mengundang jamaah haji untuk berziarah. Simbol-simbol yang penting diperhatikan adalah siang, malam, matahari terbit, matahari tergelincir, matahari terbenam, berkorban, tahallul (mencukur rambut), dan berhala.

Baju kebesaran yang harus dipakai adalah pakaian ihram. Dan, pemain utamanya adalah setiap jamaah haji itu. Karena ibadah haji itu laksana sebuah pertunjukan, setiap pemain dituntut untuk memainkan peran dengan penuh penghayatan. Untuk itulah, setiap jamaah haji harus membawa bekal yang terbaik saat berangkat ke Tanah Suci. Dalam sudut pandang Alquran dikatakan bahwa sebaik-baiknya bekal yang harus dibawa jamaah haji adalah takwa (QS. Al-Baqarah: 197).

Modal ketakwaan itulah yang akan menjamin setiap jamaah dapat meneladani karakter tokoh-tokoh yang diperankannya. Di samping itu, modal ketakwaan juga diperlukan untuk menata niat agar ibadah hajinya diterima Allah SWT. Apabila dihayati dengan baik, prosesi ibadah haji pasti dapat mengantarkan setiap pribadi dalam kehidupan yang diwarnai kesadaran mengenai keberadaan Allah. Rumah Allah (Baitullah, Kakbah) yang mengarah ke semua penjuru jelas melambangkan bahwa Allah berada di mana saja.

Tatkala kesadaran itu muncul, setiap jamaah haji termotivasi untuk mencium Hajar Aswad atau minimal melambaikan tangan ke arah Kakbah. Saat itulah setiap jamaah haji merasakan kedekatannya dengan Allah. Tanpa disadari air mata pun tumpah sebagai wujud syukur karena dapat memenuhi panggilan Allah untuk berkunjung ke Kakbah. Pertanyaannya, dapatkah jamaah haji menghayati peran yang dimainkannya? Menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah.

Tetapi, umumnya jamaah haji sukses memainkan peran dalam pertunjukan akbar itu. Salah satu indikatornya, tidak ada jamaah haji yang "kapok" berangkat ke Tanah Suci. Yang terjadi justru keinginan untuk senantiasa dipanggil sebagai tamu-tamu Allah. Itu setidaknya dapat diamati dari jumlah antrean calon jamaah haji (CJH) yang semakin mengular. Apalagi berdasarkan data Kemenag per-Juli 2013, jumlah antrean CJH telah mencapai 1.726.786 orang.

Padahal terhitung sejak 2013 kuota CJH Indonesia mengalami pemangkasan dari pemerintah Arab Saudi hingga mencapai 20 persen. Kebijakan itu diambil karena ada proyek renovasi Masjidilharam, yang menurut rencana berlangsung hingga 2016. Yang harus dilakukan Kemenag seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi adalah memberikan kepastian kepada CJH. Penentuan siapa yang berangkat dan siapa yang masuk daftar tunggu harus transparan. Hal itu penting untuk menghindari budaya potong

kompas sebagian CJH. Jika praktik potong kompas itu tidak diantisipasi, pasti akan timbul keresahan antar-CJH.

Di beberapa daerah antrean CJH kini mencapai 15 tahun. Artinya, jika ada orang mendaftar haji sekarang, ia harus menunggu 15 tahun lagi. Saat itulah ia baru berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Harus diakui bahwa rangkaian proses ibadah haji telah memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi jamaah. Tidak mengherankan jika selalu muncul kerinduan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Tetapi, harus diingat, kini ada jutaan orang yang sedang antre menjadi tamu Allah.

Karena itulah, orang yang sudah berhaji harus berempati dengan menahan ego spiritualitasnya guna memberikan kesempatan kepada saudaranya. Karena itu, kita harus mendukung ikhtiar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) yang terus mengampanyekan program beribadah haji cukup sekali dalam seumur hidup. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama harus terlibat dalam kampanye mulia ini.

Penting dikemukakan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga hanya berhaji sekali selama hayat beliau. Fakta sejarah itu penting untuk dijadikan teladan bagi setiap pribadi. Tetapi, harus diakui, tidak mudah untuk memahami umat bahwa ibadah haji itu cukup sekali. Itu sekali lagi disebabkan ibadah haji selalu menghadirkan pengalaman keagamaan yang sangat mendalam.

Apalagi Allah selalu memanggil setiap jamaah haji dengan sebutan yang sangat menyentuh hati nurani setiap jamaah yakni tamu-tamu Allah (*wafduallah*). Dengan panggilan itu, Allah yang akan menjadi tuan rumah. Karena itu, dikatakan bahwa jamaah haji berkunjung ke Baitullah. Sebagai tuan rumah, Allah yang akan menyambut, melayani, dan memberikan rasa aman bagi jamaah haji. Dalam beberapa Hadits, Rasulullah juga menekankan keutamaan ibadah haji. Misalnya, Nabi bersabda bahwa ibadah haji yang diterima Allah (*mabrur*) itu pahalanya tiada lain kecuali surga.

Karena janji yang diberikan Allah dan Rasulullah begitu rupa, motivasi umat untuk menjalankan ibadah haji terus bergelora. Setiap tamu Allah pasti selalu teringat saat melaksanakan prosesi ibadah haji. Selalu terbayang tatkala ia mengelilingi Kakbah (*tawaf*), berjalan mondar-mandir antara Bukit Shafa dan Marwah (*sai*), berkumpul di Arafah (*wukuf*), melontar dengan batu-batu kecil

(*jumrah*), bermalam (*mabit*) di Muzdalifah dan Mina, menggunting atau mencukur rambut (*tahallul*), dan mencium batu hitam (*Hajar Aswad*).

Khusus jamaah haji laki-laki juga ada ketentuan yang harus dipatuhi. Misalnya kewajiban menggunakan pakaian ihram, dua helai kain putih yang tidak berjahit. Pada saat tertentu juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki. Jika pakaian ihram telah dikenakan, tidak boleh lagi bersolek. Bersisir, menggunting kuku, dan mencabut bulu, apabila dilakukan saat berpakaian ihram, akan dikenai denda. Terlebih lagi jika bercumbu, membunuh binatang, dan mencabut tanaman. Semua larangan itu harus dijauhi karena Allah semata.

Hanya dengan menyerahkan diri secara bulat kepada Allah, para jamaah akan memahami peran yang dimainkan dalam keseluruhan prosesi ibadah haji. Rangkaian ibadah haji itu jelas memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi orang yang sudah berhaji. Akibatnya, kerinduan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci pun terus menggelora. Tetapi harus diingat, kini ada jutaan orang yang antre menjadi tamu Allah. Karena itu, bagi yang sudah berhaji harus menahan ego spiritualnya guna memberikan kesempatan kepada saudaranya. Bukankah Nabi telah memberikan teladan bahwa berhaji itu cukup sekali?

Berdakwah Seharusnya Nirkekerasan

Setelah berhasil menembak mati pelaku terorisme di Tulungagung, Jawa Timur, aparat kini dihadapkan pada tugas yang tak kalah berat. Yaitu menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap melakukan tindakan anarkistis. Untuk itulah, kasus bentrokan yang melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI) dengan kelompok masyarakat Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, harus segera dituntaskan aparat agar kejadian serupa tidak terulang.

Pentolan FPI beralasan bahwa razia atau *sweeping* selalu dilakukan dalam konteks dakwah islamiah. Strategi dakwah model FPI itu pun mengundang keprihatinan banyak kalangan. Tak ketinggalan, Presiden SBY saat itu juga menaruh keprihatinan yang mendalam. Saat menghadiri buka puasa bersama ribuan anak yatim di Jakarta International Expo Kemayoran, 21 Juli 2013, beliau menyatakan bahwa Islam tidak identik dengan kekerasan. Islam tidak identik dengan main hakim sendiri. Islam juga tidak identik dengan perusakan. Jika ada elemen melakukan itu dan mengatasnamakan agama, justru memalukan Islam.

Pernyataan SBY itu pun direaksi berlebihan oleh petinggi FPI. Presiden FPI Habieb Riziq bahkan keceplosan dengan menyebut SBY sebagai “pecundang”. Padahal jika dicermati, pernyataan SBY terasa tepat karena berdakwah seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan. Apalagi tindakan anarkistis itu dilakukan saat umat tengah khusyuk beribadah puasa. Bentrokan berawal saat rombongan FPI dari Temanggung, Magelang, dan Yogyakarta berniat untuk melakukan *sweeping* tempat hiburan di Kendal.

Warga yang tidak terima kemudian melakukan perlawanan. Bentrok massal pun tak terhindarkan hingga mengakibatkan jatuh korban jiwa dan kerusakan beberapa mobil milik anggota FPI. Anggota FPI bahkan sempat tersudut hingga menyelamatkan diri di Masjid Besar Sukorejo. Massa FPI baru bisa diselamatkan setelah polisi dan TNI mengerahkan personel untuk mengevakuasi.

Tindakan anarkistis yang melibatkan anggota FPI jelas bukan hanya kali ini. Setiap Ramadan anggota FPI selalu aktif melakukan *sweeping* di tempat yang potensial menjadi ajang berbuat maksiat. Ironisnya, tindakan anarkistis FPI itu dikatakan bagian dari dakwah untuk memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*). Pandangan ini jelas sikap yang berlebihan dalam menerjemahkan ajaran dakwah amar makruf nahi munkar.

Pandangan FPI yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mengambil tindakan hukum, apalagi bersifat anarkistis, jelas harus diluruskan. Apalagi tindakan itu dilakukan dengan mengatasnamakan amar makruf nahi munkar. Padahal tugas amar makruf nahi munkar tidak boleh dilakukan sembarang orang. Pembaru (mujadid) muslim ternama, Jalaluddin Al-Suyuthi, berpendapat bahwa tidak semua orang dapat menyuruh pada yang *ma'ruf* (apa saja yang dipandang baik dan diperintahkan syara') dan melarang yang *munkar* (apa saja yang dipandang buruk, diharamkan, dan dibenci syara').

Al-Suyuthi menegaskan bahwa hanya ulama dan penguasa yang berhak untuk menjalankan tugas amar makruf nahi munkar. Ulama berhak menjalankan tugas tersebut karena memiliki ilmu. Sedangkan penguasa dipandang dapat menunaikan tugas tersebut karena memiliki kekuasaan. Karena itu, penting ditekankan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah membawa bangsa ke arah kemuliaan dan menyelamatkannya dari kerusakan.

Tugas pemerintah ini akan semakin efektif jika disertai dengan integritas aparat penegak hukumnya. Dengan kekuasaan dan integritas yang dimiliki aparat, pemerintah pasti memiliki kewibawaan untuk memerintahkan yang baik serta melarang dan menghukum pelaku kemungkaran. Merujuk pada pendapat Al-Suyuthi tersebut, tugas mengajak pada kebaikan serta melarang dan menghukum pelaku kemungkaran hanya boleh dilakukan ulama dan pemerintah.

Dalam menjalankan tugas amar makruf nahi munkar tersebut bahkan harus tetap dikedepankan prinsip kasih sayang dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Itu berarti bahwa untuk menjalankan prinsip mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak boleh disertai dengan melakukan kemungkaran yang serupa. Tegasnya, dakwah seharusnya dilakukan dengan tanpa kekerasan (nirkekerasan). Bukankah prinsip dalam berdakwah semestinya mengajak dan merangkul?

Apalagi Nabi Muhammad SAW berpesan agar dalam berdakwah kita selalu berpegang pada prinsip untuk mempermudah dan tidak mempersulit, menggembirakan dan tidak menakut-nakuti. Spirit inilah yang perlu dikedepankan kelompok ormas radikal tatkala menerjemahkan ajaran Islam tentang amar makruf nahi munkar. Para pengemban misi dakwah Islam (mubalig/dai) harus menyadari bahwa beragama itu sebuah pergumulan yang tak pernah selesai.

Untuk menjadi pemeluk agama yang baik pasti membutuhkan waktu. Dalam pergumulan menjadi pemeluk agama yang baik itu, seseorang bahkan terkadang harus mengalami jalan berliku. Disadari atau tidak, pengalaman keagamaan yang panjang dan berliku pasti dialami setiap orang. Karena itulah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya keberagamaan seseorang selalu berproses (*becoming*). Pada konteks itulah setiap orang yang beragama harus menyadari bahwa dirinya sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik.

Karena perilaku keberagamaan itu berproses, yang penting dilakukan adalah memberikan pembinaan secara berkelanjutan agar seseorang mau berubah menjadi lebih baik. Termasuk yang perlu dibina dalam hal ini mereka yang belum terbuka hatinya untuk memanfaatkan Ramadan sebagai bulan beribadah. Mereka yang berpotensi merusak suasana Ramadan seperti pengelola hiburan malam, lokalisasi, rumah makan, dan warung tegal (*warteg*) juga harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Jika masih ada yang tidak menaati peraturan, jalan yang terbaik adalah menyerahkan pada aparat yang berwenang. Kita harus meyakini bahwa masih banyak aparat yang bekerja dengan penuh integritas. Dalam konteks penertiban ormas anarkistis itulah, masyarakat berharap pada aparat yang berintegritas. Sekali saja aparat tidak menunjukkan komitmen moral yang baik, itu berarti memberi peluang ormas radikal semacam FPI untuk bertindak sesuai caranya.

Semoga model dakwah anggota FPI yang cenderung anarkistis tidak terulang karena kita selalu merindukan kehidupan keberagaman yang ramah dan toleran.

Mewaspada Virus ISIS

Seruan berbagai komponen bangsa agar masyarakat tidak terprovokasi ajakan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) harus ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih konkret. Pemerintah bersama kekuatan *civil society* harus mengambil langkah-langkah antisipasi agar kelompok militan tersebut tidak menyebarkan virus radikalisme di Indonesia. Itu karena di negara asalnya, Irak dan Suriah, ISIS dikenal sebagai kelompok yang menempuh cara radikal dalam mewujudkan perjuangannya. Kelompok pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi ini juga selalu mengobarkan semangat jihad demi mewujudkan Negara Islam Terpadu yang melintas dari Irak hingga perbatasan Suriah.

Karena itu, tidak berlebihan jika *New York Times* dalam pemberitaannya menyebut ISIS sebagai kelompok militan yang harus diwaspadai. Sejak menguasai kota-kota penting di Irak dan Mosul di Tikrit, ISIS terus menjadi perbincangan dunia. Dalam edisi berbahasa Arab, ISIS diterjemahkan dengan *Al-Dawlah Al-*

Islamiyah fi Al-'Iraq wa Al-Sham. Kata *Al-Sham* merupakan nama klasik untuk Damaskus, pusat kekuasaan Islam semasa kekhalifahan Daulah Umayyah. Kini *Al-Sham* meliputi wilayah Suriah, Israel, Lebanon, dan bagian tenggara Turki.

Dengan demikian, cakupan wilayah Negara Islam Terpadu yang dicitakan ISIS melintasi batas negara-bangsa. Selain menggunakan strategi jihad yang disertai radikalisme, cita-cita ISIS untuk mewujudkan Negara Islam Terpadu bercorak kekhalifahan jelas bertabrakan dengan semangat nasionalisme yang digelorkan para pendiri bangsa. Ironisnya, beberapa kelompok fundamentalis di Tanah Air dikabarkan telah memberikan dukungan bagi perjuangan ISIS. Ini jelas dapat menjadi virus yang berbahaya bagi NKRI, gagasan nasionalisme, dan dakwah Islam yang moderat.

Embrio gagasan nasionalisme dapat dilacak dari spirit Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah kedokteran saat mendirikan Budi Utomo di Jakarta pada 20 Mei 1908. Tanggal pendirian Budi Utomo itu ditetapkan sebagai permulaan kebangkitan nasional atau gerakan kebangsaan. Sebagai gerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis-Jawa, Budi Utomo telah menunjukkan sifat terbuka. Itu dapat diamati melalui penerimaan anggota Budi Utomo terhadap kelompok dari luar. Penting juga dikemukakan hubungan baik tokoh-tokoh Budi Utomo dengan KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Dahlan bahkan berkesempatan untuk memberikan pelajaran agama pada anggota Budi Utomo. Saat Budi Utomo menyelenggarakan kongres pada 1917, Dahlan diundang secara khusus untuk memberikan ceramah. Hebatnya, kongres Budi Utomo itu diselenggarakan di rumah Dahlan. Peserta kongres ternyata sangat tertarik dengan ceramah Dahlan sehingga di antara mereka meminta untuk memberikan pengajian sekaligus membuka cabang Muhammadiyah di daerahnya.

Fakta ini penting dikemukakan untuk memberikan penegasan bahwa telah terjadi sinergi antara pelopor gerakan nasionalisme dan tokoh-tokoh Islam. Sinergi itu dimungkinkan karena di antara mereka memiliki kesamaan tujuan yakni mengantar bangsa menjadi lebih maju, berdaulat, dan terbebas dari segala penindasan. Pertemuan tokoh-tokoh nasionalis dan agamais juga menunjukkan bahwa cita-cita gerakan kebangsaan sejalan dengan ajaran agama. Melalui gerakan kebangsaan, tokoh-tokoh nasionalis berjuang dengan

sepenuh hati untuk mencapai kedaulatan bangsa.

Agama juga mengajarkan spirit yang senada dengan cita-cita bangsa seperti ajaran tentang kemerdekaan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), egalitarianisme (*al-musawa*), dan keberagaman (*al-tanawwu*). Nilai-nilai keagamaan itu sangat relevan dengan keinginan tokoh-tokoh pergerakan yang bercita-cita agar bangsa Indonesia terbebas dari kolonialisme sehingga berdaulat, berkeadilan, dan berkedudukan yang sama dengan bangsa lain.

Melalui kesamaan persepsi itulah, tokoh-tokoh pergerakan, baik yang berlatar belakang nasionalis maupun agamis, bersatu untuk mewujudkan organisasi politik yang dalam konteks modern disebut negara bangsa (*nation state*). Kesadaran untuk mewujudkan suatu bangsa jelas membutuhkan pengorbanan semua komponen. Apalagi jika berkaca pada realitas kemajemukan bangsa yang multietnik, agama, dan budaya.

Dalam konteks inilah kita perlu merenungkan pernyataan teoretikus Prancis, Ernest Renan (1823-1892), ketika mendefinisikan bangsa. Menurut Renan, bangsa adalah suatu perwujudan solidaritas tingkat tinggi yang dibangun oleh kesediaan berkorban pada masa lalu berikut kesiapan untuk menghadapi masa depan. Ungkapan Renan menegaskan bahwa untuk tetap menjadi suatu bangsa, yang dibutuhkan adalah kemampuan merawat solidaritas dan semangat rela berkorban. Untuk merawat nilai-nilai solidaritas dan pengorbanan yang menjadi ikatan suatu bangsa ternyata tidak mudah. Itu karena kini bermunculan gerakan keagamaan yang bercorak transnasional.

Salah satunya ISIS yang saat ini mengundang perhatian dunia. Meski gerakan keagamaan transnasional terkadang bervariasi, umumnya mereka memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah agama dan negara merupakan satu kesatuan. Ajaran Islam dipahami mencakup persoalan agama dan negara sekaligus (*al-din wa al-dawlah*).

Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga harus dilaksanakan di segala waktu dan tempat. Bagi gerakan keagamaan fundamentalis, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Kelompok fundamental juga berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode awal yakni pada masa Nabi dan sahabat. Cita-cita kelompok Islam politik ini

kemudian diwujudkan melalui perjuangan yang berorientasi pada gerakan transnasional.

Kelompok ini pun berpandangan bahwa sistem khilafah merupakan solusi yang paling tepat untuk menegakkan cita-cita politik umat. Dengan mencitakan dunia yang dipimpin seorang khalifah berarti tidak ada tempat bagi nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan nasionalisme juga mengakui eksistensi keragaman etnik, agama, budaya, dan bahasa sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sementara cita-cita politik gerakan transnasional bersifat lintas batas dan didasarkan kesamaan agama. Kini tugas kita adalah mengajak berbagai elemen, terutama pemuda, agar tidak teracuni virus yang diwacanakan ISIS dan kelompok transnasionalisme lainnya. Apalagi sudah jelas bahwa dalam menempuh setiap perjuangannya, mereka selalu menghalalkan segala cara.

Kampus dan Deradikalisasi

Awalnya banyak pihak menduga bahwa pemberitaan tentang Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) merupakan pengalihan perhatian umat terhadap serangan Israel ke Palestina. Dugaan itu dapat dimaklumi karena berita media cetak dan elektronik tentang pembantaian warga sipil di Gaza, Palestina oleh pasukan Israel telah mengundang perhatian dunia. Namun, dugaan itu berubah seiring dengan semakin terkuaknya ISIS sebagai gerakan politik yang radikal.

ISIS memang lebih tepat disebut gerakan politik, karena konteks kelahirannya merupakan reaksi terhadap situasi sosial politik di Irak dan Suriah. Sebagai gerakan politik yang mengatasnamakan Islam untuk merebut kekuasaan di Irak dan Suriah, ISIS tampak sangat cerdas tatkala mengampanyekan wacana negara Islam, khilafah, dan semangat anti Barat. Dampaknya, kelompok-kelompok fundamental yang sudah sekian lama bercita-cita mendirikan negara Islam menjadi terpesona. Karena itulah, kita harus memosisikan ISIS sebagai gerakan politik, bukan gerakan Islam.

Apalagi dalam mencapai tujuannya, ISIS telah menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara radikal yang dibumbui dengan spirit jihad. Padahal, substansi ajaran jihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan sebagaimana diperintahkan syariat. Bahkan tokoh Muhammadiyah, Buya A. R. Sutan Mansur, memaknai jihad dalam arti bekerja dengan sepenuh hati. Perspektif ini penting dikembangkan karena sama sekali tidak mengaitkan jihad dengan perang.

Dalam banyak kasus radikalisme bernuansa agama di Tanah Air, jelas sekali kaum muda selalu menjadi sasaran kaderisasi. Dari banyak pengakuan tersangka ISIS maupun kasus terorisme lainnya, mereka mengaku sangat aktif merekrut kader-kader muda terutama dari kampus. Kaum muda yang sedang menuntut ilmu di kampus sengaja disasar karena mereka umumnya masih dalam proses menemukan jati dirinya (*becoming*). Di tengah proses "menjadi" itulah, mereka sering kali terpesona dengan ideologi politik yang dikemas dengan simbol-simbol keislaman.

Karena kampus telah menjadi sasaran kelompok radikal, sivitas perguruan tinggi (PT) harus waspada. Pimpinan PT harus menyelamatkan mahasiswanya dengan menanamkan pendidikan tentang nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Langkah ini penting karena ada peningkatan radikalisme di PT, seperti ditunjukkan dalam berbagai kasus tawuran antarmahasiswa, demonstrasi anarkistis, serta keterlibatan sebagian mahasiswa dalam jaringan terorisme, Negara Islam Indonesia (NII), dan ISIS.

Untuk mencegah penyebaran virus radikalisme di kalangan kaum muda, terutama yang ada di kampus, mahasiswa harus diajak untuk mempelajari nilai-nilai kewarganegaraan. Tentu tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan (*civic knowledge*), mahasiswa harus didorong untuk mengaktualisasikan pengetahuan mengenai *civic values* hingga mewujud dalam sikap dan watak (*civic disposition*), serta perilaku keseharian (*civic skill*). Melalui cara itulah, nilai-nilai kewarganegaraan menjelma menjadi budaya dalam kehidupan kaum muda di kampus.

Agar nilai-nilai kewarganegaraan menjadi budaya, dibutuhkan "gerakan" dari seluruh sivitas. Langkah selanjutnya adalah mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam program deradikalisasi. Setiap mahasiswa dapat berfungsi sebagai pendidik untuk teman sebayanya (*peer teaching*), terkait dengan persoalan radikalisme. Fakta sejarah

telah menunjukkan bahwa sesungguhnya kaum muda (pelajar dan mahasiswa) selalu berperan dalam berbagai peristiwa yang menentukan perjalanan bangsa.

Itu dapat diamati dari berbagai peristiwa bersejarah yang menunjukkan peranan kaum muda sebagai pendorong perubahan, seperti Kebangkitan Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998). Kiprah kaum muda tersebut menunjukkan bahwa mereka sejatinya memiliki kultur keilmuan dan keterampilan berorganisasi yang hebat.

Mahasiswa seharusnya meneladani figur-figur penting yang berpengaruh dalam dunia pergerakan, diantaranya Ahmad Wahib, seorang mahasiswa yang terus bergulat dalam pencarian jati dirinya. Melalui pergulatannya itulah lahir karya monumental; *Pergolakan Pemikiran Islam* (1981). Juga ada Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang mewacanakan "Islam Yes, Partai Islam No". Gagasan itu merupakan bagian dari cita-cita besar Cak Nur untuk menyegarkan paham keagamaan umat. Pernyataan Cak Nur itu sekaligus menjadi kritik terhadap perilaku politisi muslim yang terhimpun dalam partai-partai Islam.

Kiprah Ahmad Wahib dan Cak Nur dapat menjadi inspirasi mahasiswa untuk mendialogkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Untuk itulah, mahasiswa perlu terlibat dalam program deradikalisasi di kampus. Pelibatan mahasiswa dapat dimulai dengan mengajak mereka mewacanakan tema-tema yang berkaitan dengan *civic values*, seperti Pancasila, demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme.

Tema demokrasi menarik dibahas terutama dalam kaitan dengan ajaran Islam dan Pancasila. Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi harus dipahami sebagai perwujudan ajaran Islam tentang musyawarah (*syura*). Karena itu, praktik demokrasi dengan segala kekurangannya harus terus disemai. Sementara pluralisme dan multikulturalisme, juga penting karena berkaitan dengan komitmen bangsa untuk bersatu dalam keragaman (*unity in diversity*). Dalam pernyataan penuh hikmah dikatakan bahwa perbedaan di kalangan umat (yang terdidik) adalah rahmat.

Kita juga sering mendengar slogan yang menyatakan bahwa perbedaan itu indah. Meski realitas bangsa menunjukkan "ber-Bhineka", namun harus tetap "Tunggal Ika". Itu berarti perbedaan

seharusnya tidak menghalangi kita untuk bersatu sehingga kehidupan terasa penuh rahmat dan indah. Dalam konteks program deradikalisasi di kampus itulah, mahasiswa dapat menjadi pelopor dialog lintas etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan.

Dialog tidak harus dipahami secara formal, melainkan juga dialog-dialog informal melalui berbagai media yang bisa “melupakan” status sosial, etnis, budaya, dan agama. Kini tugas mahasiswa adalah memperbanyak perjumpaan informal demi terwujudnya generasi masa depan bangsa yang terbuka, sehingga tidak mudah terpesona dengan ideologi baru yang radikal, militan, dan intoleran.

Start Surabaya Bebas Prostitusi

Pada hari Jum'at, bertepatan pada tanggal 21 Desember 2012, Pemkot Surabaya mulai mengambil langkah riil untuk membebaskan kota metropolis dari praktik prostitusi. Ikhtiar untuk membebaskan Surabaya dari praktik prostitusi dimulai dengan penutupan lokalisasi di kawasan Dupak Bangunsari. Selanjutnya, secara bertahap, Pemkot Surabaya akan menutup lokalisasi di kawasan Sememi, Klakah Rejo, Jarak, Tambak Asri, dan Dolly. Kebijakan ini akan membuat warga metropolis menyaksikan Kota Surabaya yang modern, berbudaya, dan religius. Itu berarti semakin menambah *branding* Surabaya yang sebelumnya dikenal sebagai kota yang bersih dan hijau.

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan, sudah tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Hal itu disebabkan praktik prostitusi di Surabaya telah begitu menyebar, berakar kuat, dan melibatkan jaringan antarkota, antarprovinsi, dan bahkan antarnegara. Selain itu, ada begitu banyak kepentingan, baik individu

maupun kelompok, yang memperoleh keuntungan dari keberadaan lokalisasi. Itu dapat diamati dari kepentingan mucikari, pekerja seks komersial (PSK), pelanggan, panti pijat, pemilik warung, penyedia jasa keamanan, dan tukang parkir. Karena itu, menjadi langkah yang tepat ketika pemerintah kota dan provinsi mengajak berbagai elemen bersinergi untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi.

Praktik prostitusi sejatinya merupakan tragedi kemanusiaan. Perbuatan itu melawan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi, dalam berbagai kasus, di antara PSK terkadang ada yang menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*). Mereka dengan terpaksa menjadi PSK. Karena telah masuk jaringan PSK, mereka pun tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari dunia hitam itu. Padahal, pada tingkat tertentu, mereka menyadari bahwa jenis pekerjaannya bertentangan dengan ajaran agama dan suara hati nuraninya. Karena itulah, selain pasrah, mereka tetap berjuang untuk keluar seraya menanti uluran tangan agar dapat menjalani kehidupan secara normal.

Berangkat dari problem riil tersebut, pemerintah dan elemen lain harus bersinergi untuk mengentas PSK. Salah satu elemen non pemerintah yang telah mengambil langkah solutif adalah Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin telah memimpin serangkaian kegiatan untuk menutup lokalisasi. Amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan di kawasan lokalisasi Dupak Bangunsari juga telah sekian lama digunakan untuk mendidik anak-anak dari keluarga PSK. Demikian juga halnya dengan masjid, musala, panti asuhan, dan klinik kesehatan. Pejuang kemanusiaan sekaligus aktivis Muhammadiyah kawasan Dupak Bangunsari berpatungan untuk membeli wisma yang dijadikan bisnis "esek-esek". Pembelian wisma itu merupakan strategi yang manjur untuk membebaskan Dupak Bangunsari dari prostitusi.

Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU pasti memiliki komitmen yang sama dalam melihat problem prostitusi. Sebagai organisasi berbasis sosial keagamaan, keduanya jelas memiliki sumber daya yang memadai untuk membantu pemerintah guna mewujudkan Surabaya terbebas dari prostitusi. Selain amal usaha bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan panti asuhan, dua ormas tersebut memiliki sumber daya manusia yang andal. Dengan demikian, fungsi keduanya dapat dioptimalkan untuk melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan yang berkaitan dengan penanganan

prostitusi.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah agama. Itu karena dalam ajaran moral keagamaan telah dikemukakan tuntunan agar setiap pemeluk agama berakhlak mulia. Misalnya, dikatakan bahwa kita harus menghindari seks bebas (perzinaan), menghindari konsumsi minuman atau makanan yang memabukkan (*khamr*, narkoba), dan larangan mencampakkan diri dalam kerusakan (QS. Al-Baqarah: 195, *wa la tulqu bi aydikum ila al-tahluqah*). Beberapa ajaran itu jika ditaati tentu sudah lebih dari cukup untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan seperti prostitusi.

Seorang doktor bidang psikologi dari Sudan, Malik Badri, mengatakan bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang secara total mampu menghilangkan hubungan seks ilegal. Tapi, itu bukan anjuran untuk pasrah. Pemerintah perlu mengajak semua komponen untuk mengawal dengan konsisten dan berkelanjutan program penutupan lokalisasi. Tidak cukup itu, pemerintah juga harus menggelontor dana sebagai bantuan modal bagi PSK untuk mentas dari dunia hitam.

Tetapi, ikhtiar pemerintah tersebut membutuhkan pendampingan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Untuk itu, perlu mengajak berbagai elemen guna bersinergi. Satu lagi yang penting dilakukan pemerintah ialah membuat regulasi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggan PSK. Semoga langkah besar Wali Kota Tri Risma Harini untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi diberkahi Allah SWT dan menjadi kabar bungah menjelang Hari Ibu yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember.

Amal Intelektualisme Buya Syafi'i

Purna tugas sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif banyak mencurahkan perhatian untuk kerja-kerja kemanusiaan melalui lembaga yang didirikannya, *Maarif Institute for Culture and Humanity*. Pada Mei 2013 lembaga tersebut berusia satu dasawarsa.

Saat aktif di Muhammadiyah, guru bangsa yang akrab disapa Buya Syafi'i itu dikenal sangat dekat dengan kaum muda progresif dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Bahkan, kelahiran JIMM juga bermula dari diskusi-diskusi di kantor Maarif Institute. Dengan dukungan tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Amin Abdullah, Moeslim Abdurrahman, dan tentu saja Buya Syafi'i, JIMM kian diperhitungkan.

Beberapa pentolan JIMM, seperti Raja Juli Antoni, Fajar Ziaul Haq, dan Ahmad Fuad Fanani, kini pun menjadi penggerak utama kegiatan Maarif Institute. Tak heran, dalam banyak kesempatan Buya Syafi'i tampil menjadi pembela nomor wahid terhadap berbagai kesalahpahaman pada JIMM. Bagi Buya Syafi'i, kaum muda yang

berpikiran progresif dapat menjadi sumber harapan bagi pembaruan (*tajdid*) pemikiran Muhammadiyah. Melalui *Maarif Institute*, Buya Syafi'i beberapa kali menyelenggarakan *workshop* pemikiran Islam yang diikuti kaum muda Muhammadiyah.

Ikhtiar Buya Syafi'i untuk menebar virus intelektualisme di kalangan kaum muda mulai menunjukkan hasil. Gairah intelektualisme di kalangan kaum muda Muhammadiyah terus menggeliat. Muncul beberapa intelektual muda yang produktif mengeluarkan pemikiran. Misalnya, Abd. Rohim Ghozali, Abd Mu'thi, Zuly Qodir, Sukidi, Ahmad Najib Burhani, Zakiyuddin Baidhawiy, dan Pradana Boy.

Selain mengulas pemikiran keislaman era kontemporer, mereka tak jarang memberikan kritik konstruktif terhadap gejala konservatisme di Muhammadiyah. Meski menimbulkan perdebatan, kemunculan kaum muda tersebut patut disyukuri. Spirit *tajdid* Muhammadiyah yang dianggap mulai meredup terlahir kembali.

Memang ada yang menganggap wacana kaum muda progresif telah dihindangi virus "sawan kekanak-kanakan", seperti sok liberal, sok radikal, dan kekiri-kirian. Beberapa tema yang diwacanakan, seperti Islam liberal, Islam proletar, Islam kiri, Islam borjuis, dan pendidikan yang membebaskan model Paulo Freire, dikritik habis. Dalam situasi itu, Buya Syafi'i hadir sekaligus memberikan pembelaan.

Buya Syafi'i berpesan agar warga Muhammadiyah tidak cepat marah dan menuduh mereka sesat. Menurut Buya Syafi'i, selama mereka masih menjalankan prinsip ajaran agama, misalnya shalat dan puasa, mereka tidak perlu dimusuhi. Beliau ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah intelektual dan tenda besar persemaian berbagai mazhab pemikiran (*school of thoughts*).

Buya Syafi'i patut bersyukur karena Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah apresiatif terhadap kiprah kaum muda. Din mengakui bahwa sering ada pertanyaan mengenai eksistensi komunitas yang berpandangan liberal di Muhammadiyah. Pertanyaan itu pun dijawab dengan menyatakan bahwa mereka sesungguhnya tidak "seseram" tuduhan banyak orang. Sebab, kenyataannya, mereka masih mendirikan shalat, berpuasa, dan bahkan dengan sangat lancar mengutip ayat Alquran, hadis, dan kitab-kitab klasik tatkala menyampaikan pandangannya. Karena

itu, menurut Din, kalau mereka masih shalat, puasa, dan meyakini kebenaran Alquran dan hadis, itu jelas bukan liberal.

Pembelaan Buya Syafi'i terhadap kaum muda yang berpandangan progresif jelas menunjukkan keinginan kuat untuk mendorong agar intelektualisme terus tumbuh dan berkembang. Intelektualisme itu penting untuk mengimbangi kecenderungan praksisme di lingkungan Muhammadiyah yang bisa berimplikasi pada kurangnya wawasan. Padahal, wawasan mutlak diperlukan untuk memberikan kesadaran menyeluruh pada kegiatan amaliah. Wawasan juga diperlukan sebagai sumber energi bagi pengembangan yang dinamis dan kreatif dari keseluruhan kegiatan amaliah.

Pada konteks itulah, penting ditekankan usaha untuk menyeimbangkan watak praksisme dan intelektualisme Muhammadiyah yang kini memasuki abad kedua. Dengan usia yang matang, Muhammadiyah tidak boleh terlihat renta sehingga menjadikan lamban dalam memberikan respons terhadap berbagai persoalan.

Akhirnya, diucapkan selamat berulang tahun ke-10 bagi *Maarif Institute*. Juga diucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada tokoh kelahiran 31 Mei 1939 asal Sumpur Kudus, Sawah Lunto, Sumatera Barat, itu. Semoga virus mulia intelektualisme yang telah ditularkan kepada kaum muda menjadi amal saleh Buya Syafi'i .

Bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwa *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya adalah amalan yang pahalanya akan terus mengalir? Dan, saya *hakulyakin* bahwa spirit intelektualisme yang telah diwariskan Buya Syafi'i masuk kategori amal saleh.

Menumbuhkan Kesadaran Multikulturalisme

Pada Mei 2013, keberadaan *Maarif Institute for Culture and Humanity* tanpa terasa sudah memasuki usia 10 tahun. Lembaga yang didirikan Ahmad Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini pun tetap konsisten menampilkan diri sebagai gerakan kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Tiga pilar ini tampak begitu berpengaruh dalam keseluruhan pemikiran dan tindakan guru bangsa yang akrab disapa Buya Syafi'i tersebut.

Salah satu keprihatinan Buya Syafi'i dalam kaitan dengan kehidupan keagamaan Indonesia era kontemporer adalah maraknya radikalisme bernuansa agama. Tidak jarang dalam radikalisme itu bahkan terjadi kasus bom bunuh diri. Fenomena itu pun mengundang kritik Buya Syafi'i. Dalam sebuah kesempatan Buya Syafi'i mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri sejatinya individu yang berani menghadapi kematian, tetapi takut dengan kehidupan.

Pada konteks radikalisme yang kian marak itulah Buya Syafi'i mengingatkan pentingnya kesadaran terhadap nilai-nilai

multikulturalisme. Kiprah Maarif Institute sejauh ini juga menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap multikulturalisme. Kesadaran terhadap multikulturalisme ini diperlukan karena terjadi banyak kasus radikalisme berlatar belakang perbedaan etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan. Umumnya radikalisme itu disebabkan ketidaksiapan individu atau kelompok untuk hidup dalam lingkungan yang plural.

Padahal pluralitas menurut Buya Syafi'i merupakan suatu keniscayaan. Dalam perspektif agama, pluralitas disebut bahkan bagian dari ketetapan Tuhan (*sunnatullah*). Multikulturalisme dapat dipahami sebagai paham yang mengajarkan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas budaya sehingga menumbuhkan kepedulian agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat. Multikulturalisme juga meniscayakan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas sehingga kekhasan identitas mereka tetap diakui (Will Kymlicka dalam *Multicultural Citizenship*, 1995).

Dengan demikian, arah multikulturalisme adalah menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik sehingga memungkinkan beragam komunitas berkembang sesuai kekhasan masing-masing. Menurut Haryatmoko (2007), ada tiga alasan yang menjadikan kesadaran multikulturalisme diperlukan. Pertama, ada fenomena penindasan atau penafian atas dasar etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan. Dikotomi antara kita (*minna*) dan mereka (*minhum*) seringkali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan.

Pelembagaan diskriminasi ini dapat kita amati di wilayah publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan politik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, kelompok minoritas terus ditekan sehingga kehilangan eksistensinya. Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memarginalkan kelompok tertentu dengan memberi label "tidak terlalu penting" dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri semakin terpatri dalam struktur kesadaran kelompok minoritas.

Pada konteks inilah multikulturalisme penting untuk menjawab kebutuhan mendasar dari kelompok minoritas. Mereka harus diberikan ruang untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya. Ketiga, kaum urban dan migran seringkali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh

kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak undang-undang otonomi daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah seringkali disalahartikan dengan pemihakan terhadap kepentingan warga asli (lokal) sehingga terjadi diskriminasi terhadap warga pendatang.

Rekrutmen pejabat publik pun tidak lagi didasarkan pada kompetensi, tapi asal daerah, golongan, dan afiliasi politik. Faktor dinamika politik lokal jelas sekali turut memengaruhi perspektif kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sebagai contoh, dalam kasus pemilihan kepala daerah dan penentuan pejabat publik di daerah selalu muncul alasan bahwa yang harus menduduki jabatan adalah representasi kelompok mayoritas. Perspektif ini jelas sangat berbahaya karena akan mengakibatkan penentuan jabatan-jabatan publik tidak lagi mempertimbangkan kapasitas dan *track record*.

Padahal sebagai bagian dari ruang publik, jabatan tersebut harus terbuka untuk setiap orang asal memiliki kompetensi dan integritas. Sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme, rasanya kita layak belajar pada pandangan filsuf Prancis, Emmanuel Levinas (1971). Dalam teori tentang penampakan wajah (*the face of the other*), Levinas mengatakan bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu berbeda dari aku. Kendati demikian, hubungan aku dan yang lain tidak akan melahirkan kekerasan.

Kehadiran yang lain bahkan akan membuahkan kedamaian dan menumbuhkan kultur positif dalam kehidupan. Melalui teori penampakan wajah akan tergambar wajah yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling menyapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Setiap orang akan dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang tampak akan mencair dalam afeksi sehingga tidak hanya berhenti pada persepsi, tapi juga mengkristal dalam kesadaran seseorang.

Teori Levinas jelas mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan nirkepentingan. Hubungan itu menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut balasan. Itu berarti tidak ada tuntutan timbal balik dan tiada pula

dominasi. Jika pandangan Lavinias itu mampu diterjemahkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, akan terasa sangat indah. Individu atau kelompok tidak akan mudah menghakimi, apalagi menyakiti, karena senantiasa tergambar dalam dirinya wajah orang lain.

Menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Bila kesadaran multikulturalisme dapat ditanamkan, kita selalu melihat pluralitas secara positif, toleran, dan optimistik. Sikap ini penting untuk melahirkan komitmen yang tulus sehingga kita terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya, etnis, agama, dan paham keagamaan. Jadi, jangan dihabiskan energi kita untuk memperdebatkan persoalan yang memang sudah jelas berbeda.

Spirit multikulturalisme itulah yang senantiasa dikembangkan Buya Syafi'i dan Maarif Institute. Pertanyaannya, maukah kita menjadi bagian dari gerakan kebudayaan untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme?

Oase Gerakan Filantropi

Orang terkaya ke-12 di Indonesia versi Majalah *Forbes*, Dato' Sri Prof Dr Tahir, menjadi buah bibir. Saat hadir di Universitas Kristen Petra Surabaya (14/5/2014), Chairman dan CEO Mayapada Group itu memberikan beasiswa pada mahasiswa sebesar Rp 2 miliar. Saat memberikan sambutan Tahir menyatakan bahwa uang yang disimpan di bank *is not the real wealth*. Menurutnya, justru uang yang disumbangkan untuk membantu orang itulah *the real wealth*. Pernyataan itu semakin menunjukkan posisi Tahir sebagai salah satu filantropis tanah air. Sebelumnya Tahir juga mendermakan hartanya sebesar 100 juta USD (Rp. 1,1 Trilyun) untuk kepentingan kemanusiaan.

Pada awal April 2014, Indonesia juga dikunjungi orang terkaya dunia dan pendiri *software* Microsoft, Bill Gates. Saat itu, Bill Gates memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya mempraktekkan ajaran "welas asih". Bersama sejumlah pengusaha nasional, Gates menaruh perhatian pada problem kesehatan. Ia menyadari betul bahwa pemerintah tidak mungkin mampu sendirian

menyiapkan layanan kesehatan berkualitas. Pemerintah pasti membutuhkan keterlibatan pihak swasta. Untuk itulah Gates menyumbang Rp 450 miliar. Donasi ini untuk mengatasi masalah kesehatan yang menjadi atensi pemerintah, yakni malaria, TBC, HIV/AIDS, keluarga berencana, dan polio.

Yang menarik, saat diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, Gates menceritakan pengalaman pribadinya sebagai filantropis dunia. Dengan senang hati ia mendonasikan sebagian hartanya untuk kepentingan kemanusiaan. Ia yakin tidak akan jatuh miskin hanya karena rajin menyumbang. Pengalaman hidupnya justru mengajarkan bahwa bisnis Microsoft-nya semakin berkembang. Karena itu, ia berpesan pada pengusaha tanah air agar tidak segan menyumbang. Sebab, dengan rajin menyumbang kekayaan akan semakin berlipat.

Teladan dua filantropis dunia itu penting direnungkan. Sepertinya kita harus membuka kembali ajaran agama mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Orang-orang kaya ini telah mengajarkan pada kita pentingnya mempraktekkan ajaran berderma atau *welas asih* pada sesama. Tidak hanya dengan ucapan, dua filantropis tersebut memberikan contoh melalui tindakan. Keduanya juga tidak perlu melihat latar belakang etnis, agama, dan budaya, orang-orang yang disumbang. Yang penting, donasi itu digunakan untuk kepentingan kemanusiaan.

Dalam perspektif sosiologi agama, tindakan para filantropis itu merupakan manifestasi corak keberagamaan yang menonjolkan amal (*a faith with action*). Inilah wujud pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan dengan amal nyata (*bi al-hal*). Di tengah situasi bangsa yang sedang dirundung banyak masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, kebodohan, dan keterbelakangan, terasa sekali bahwa kita membutuhkan lebih banyak lagi tokoh filantropis.

Ajaran agama sejatinya telah memberikan landasan teologis mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya dikatakan bahwa keimanan itu hanya absah jika diwujudkan dalam bentuk amal. Itulah sebabnya perintah beriman selalu diikuti dengan seruan untuk beramal (*amanu wa 'amilu al-shalihah*). Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda bahwa tidak sempurna iman diantara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri (HR. Bukhari dan Muslim). Sabda Nabi ini menegaskan bahwa

mencintai sesama merupakan tanda kesempurnaan iman.

Ajaran agama juga memerintahkan pemeluknya agar senang memberi (*religious giving*). Karena itu selalu dikatakan bahwa tangan di atas (pemberi) lebih baik dari tangan di bawah (peminta-minta). Dengan bahasa yang menyentuh nurani, Allah SWT juga mengatakan bahwa orang yang gemar berderma itu diumpamakan seperti menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir akan tumbuh seratus biji. Allah juga berjanji untuk melipatgandakan kekayaan orang-orang yang dikehendaki (QS. Al-Baqarah ayat 261).

Karena itu tepat sekali keyakinan yang menyatakan bahwa dengan banyak memberi maka harta akan semakin bertambah. Jika dipahami secara mendalam semua ajaran agama juga bertujuan untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, ibadah haji selalu diakhiri dengan perintah berkorban. Ibadah puasa diakhiri dengan perintah membayar zakat fitrah. Demikian juga ibadah salat yang diakhiri dengan mengucapkan salam. Itu semua menunjukkan bahwa tujuan akhir ibadah adalah mewajibkan pelakunya untuk beramal sosial.

Karena itu, jika ada orang yang rajin melakukan ibadah ritual sementara amal sosialnya buruk maka orang tersebut berarti kurang memahami substansi ajaran agama. Ini penting karena ada kalanya orang rajin salat tetapi juga rajin berbuat maksiat. Begitu juga ada orang yang rajin ibadah haji dan umroh, tetapi sepulang dari tanah suci kembali berbuat korup. Orang seperti ini pasti tidak memahami makna dari amaliah yang dilakukan.

Dalam perspektif psikologi, orang yang melaksanakan amalan baik dan buruk secara bersamaan berarti mengalami kepribadian terbelah (*split of personality*). Orang seperti ini sejatinya sedang sakit mental (*mental illness*). Agama apa pun pasti tidak mengajarkan pemeluknya berkepribadian ganda. Allah SWT menamakan orang yang berkepribadian ganda sebagai pendusta agama (QS. Al-Ma'un: 1-7).

Termasuk dalam kategori pendusta agama adalah mereka yang salat tetapi lalai. Mereka yang lalai itu adalah yang tidak tulus (*riya'*), tidak mau berderma, dan menimbun harta kekayaan. Peringatan ini layak direnungkan agar kita tidak termasuk kelompok yang mendustakan agama. Para pendusta agama itu adalah mereka yang tidak mampu menyelaraskan ibadah ritual dan amal sosial.

Seorang filsuf Barat, Rene Descartes, pernah mengajarkan prinsip *cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada). Pernyataan itulah yang kemudian menjadi basis ajaran filsafat eksistensialisme. Jika ajaran ini digunakan sebagai inspirasi, maka pernyataan Descartes dapat diubah menjadi *labora ergo sum* (aku beramal maka aku ada). Dengan demikian eksistensi seseorang, apa pun agamanya, sangat bergantung pada kualitas amalnya.

Itu berarti, selain beriman, yang dipentingkan dari keberagaman seseorang adalah amal sosialnya. Spirit beramal yang bermanfaat bagi orang lain itulah yang menjadi substansi ajaran agama. Semoga semangat berderma tokoh-tokoh filantropis dunia menumbuhkan gerakan filantropis untuk kepentingan kemanusiaan.

BAB III

Moralitas dalam Berpolitik

Takkala Ulama Terbelah

Pemilihan presiden (pilpres) yang baru lalu tidak saja membuat lembaga-lembaga survei terbelah. Elit agama atau ulama yang semestinya menjadi teladan umat juga terbelah. Para ulama terbelah sebagai dampak dari perbedaan sikap politik dukung-mendukung capres. Tetapi tidak usah heran karena dunia politik sangat akrab dengan perbedaan, bahkan perpecahan. Perjuangan melalui ranah politik selalu meniscayakan hukum bahwa perbedaan itu biasa. Bahkan di kalangan aktivis politik mengatakan bahwa yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan.

Seharusnya semua pihak melihat politik sebagai bagian dari persoalan duniawi belaka. Politik bukanlah persoalan hidup mati. Karena itu, tidak boleh saling memutlakkan pendapat dengan menganggap pilihan politiknya yang paling benar. Sementara pilihan politik orang lain yang berbeda dengan dirinya dianggap salah. Apalagi jika dalam menyampaikan pandangan dan sikap politik itu membawa simbol-simbol keagamaan. Pemaksaan simbol-simbol keagamaan dalam ranah politik jelas menodai ajaran agama yang

sejatinya sangat sakral.

Dalam suasana pilpres yang lalu terasa sekali ulama kita telah larut dalam persaingan antar capres. Bahkan diantara mereka ada yang terlibat menjadi tim sukses capres. Sebagai elit agama, mereka memang memiliki posisi yang sangat sentral sehingga dapat memengaruhi pilihan politik umat. Para capres pun tahu persis cara memanfaatkan mereka sebagai pendulang suara. Ironisnya, ulama kita pun banyak yang tergodanya sehingga mau memobilisasi suara umat untuk kepentingan politik capres tertentu.

Terbelahnya sikap ulama, apalagi disertai tindakan provokatif, mulai menjelang hingga pasca pilpres tentu sangat disayangkan. Karena sifat demikian jauh dari karakter ulama yang sesungguhnya. Dalam pengertian yang sudah dianggap baku, ulama merupakan kelompok orang yang ahli agama. Pengertian ini merujuk pada kalam ilahi dalam al-Quran (QS. Al-Syu'ara': 197 dan QS. Fathir: 28). Dalam Hadits Nabi SAW juga dikatakan posisi istimewa ulama sebagai pewaris para Nabi.

Dalam makna yang lebih luas, ulama juga mencakup kaum cendekiawan (*ulul albab*). Dengan demikian ulama sejatinya bukan hanya kelompok ahli agama, melainkan juga ahli pengetahuan pada umumnya. Itu berarti para ahli statistika yang mengawal lembaga-lembaga survei adalah juga ulama. Karena ulama (ahli agama dan ahli statistika) saat pilpres terbelah maka korban yang ditimbulkan sangat banyak.

Bukan hanya capres yang menjadi korban, publik juga mengalami sesat pikir dan dibuat bingung. Apalagi sesaat setelah pilpres, masing-masing capres mendeklarasikan diri sebagai pemenang. Hal itu dilakukan capres berdasar hitung cepat beberapa lembaga survei yang menampilkan hasil berbeda-beda. Semua itu terjadi karena kaum cendekiawan yang direpresentasikan sebagian ahli statistika masuk dalam kelompok berkepentingan.

Bahkan disinyalir ada lembaga survei dadakan yang dibentuk capres sesaat sebelum pilpres. Akibatnya dapat diduga, nilai-nilai kejujuran yang menjadi spirit dalam dunia akademik diabaikan. Demikian halnya dengan sebagian ulama yang terlalu jauh bermain dalam ranah politik praktis. Diduga kuat dukungan ulama dan cendekiawan itu tidak gratisan. Mereka mendukung bukan karena rekam jejak capres, melainkan karena adanya "sedekah politik". Jika dugaan itu benar, berarti kelompok ulama dan cendekiawan telah

melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keilmuan dan keagamaan.

Untuk itulah Julien Benda dalam *The Betrayal of the Intellectuals* (1980), berpesan agar kaum cendekiawan berhati-hati jika bersinggungan dengan politik kekuasaan. Julien juga mengingatkan agar kaum cendekiawan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saat bersinggungan dengan politik kekuasaan. Yang tidak boleh hilang dari kaum cendekiawan adalah akhlak. Pesan ini penting agar kaum cendekiawan selalu menjadikan akhlak sebagai panglima dalam bertindak.

Peran yang tidak kalah penting juga harus dimainkan ulama. Sebagai pemimpin informal, ulama diharapkan kembali pada jalur yang benar. Praktek memobilisasi massa untuk kepentingan politik capres tidak boleh terulang kembali. Ulama harus benar-benar memosisikan diri sebagai penjaga akhlak umat. Ulama juga harus tetap memainkan tugas utamanya, yakni *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (memerintah yang baik dan mencegah yang munkar).

Pembaru muslim, Jalaluddin Al-Suyuthi, menegaskan pentingnya tugas tersebut bagi ulama. Lebih jauh al-Suyuthi mengatakan bahwa tugas amar makruf nahi munkar tidak boleh dijalankan sembarang orang. Ditegaskannya, hanya ulama dan umara (pemerintah) yang boleh menjalankan tugas tersebut. Ulama memiliki otoritas karena memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Sementara pemerintah memiliki kekuasaan dan aparat. Dengan kekuasaan dan aparatnya, pemerintah diharapkan dapat menjamin pelaksanaan nilai-nilai kebaikan dan mencegah kerusakan.

Imajinasi Politik Islam

Saat melintas di depan Gedung Grahadi, kantor gubernur Jatim, saya menyaksikan sekumpulan anak muda berdemonstrasi bersamaan dengan hari pertama kampanye (16 Maret 2014). Selain berorasi, mereka membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap demokrasi dan pemilu. Bagi mereka sistem demokrasi merupakan produk Barat sehingga harus ditolak. Solusi yang ditawarkan adalah kembali pada syariah dan khilafah. Dengan penuh keyakinan mereka menyatakan bahwa segala persoalan di negeri ini akan selesai dengan syariah dan khilafah.

Demonstrasi dengan tema tersebut tentu sering kita jumpai. Karena itu, bagi sebagian orang demo tersebut mungkin tidak menarik. Tetapi, jika ditelisik lebih jauh, kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan sosial keislaman yang bercorak lintas batas (transnasional) terus menunjukkan perkembangan. Gerakan ini merata di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim maupun minoritas muslim.

Meski gerakan tersebut sangat bervariasi, umumnya memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa Islam mengajarkan kesatuan agama dan negara (*al-Islam din wa al-daulah*). Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga dapat dilaksanakan di segala waktu dan tempat (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Bagi penganut Islam fundamental, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Karena itu, kelompok Islam fundamental berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode Nabi Muhammad dan sahabat.

Bagi kelompok Islam fundamental, sistem khilafah dianggap satu-satunya solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat. Dengan mencitakan dunia Islam dipimpin seorang khalifah, berarti tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan pada kesamaan tujuan dalam kehidupan bernegara. Gagasan nasionalisme jelas mengakui eksistensi keragaman budaya, etnik, agama, dan bahasa, sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sementara, gerakan Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama sehingga mengabaikan batas negara-bangsa (*nation state*). Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam politik itulah, umat harus menunjukkan ajaran yang lebih substantif. Yang lebih penting adalah menjalankan pemerintahan dengan dasar moral keagamaan. Hal ini penting karena gagasan mendirikan negara Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas tidak memiliki tempat. Gagasan tersebut menurut sebagian pemikir juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama juga tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membangun pemerintahan dengan bentuk tertentu. Karena itulah, sepeninggal beliau terjadi mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pergantian khalifah. Setiap khalifah dipilih dengan mekanisme yang berbeda; pemilihan langsung (Abu Bakar), penunjukan khalifah (Umar bin Khaththab), tim formatur (Utsman bin Affan), serta diangkat kaum pemberontak (Ali bin Abu Thalib).

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya landasan moral yang harus dipatuhi

pemimpin dan rakyatnya. Nilai-nilai moral keagamaan yang ditekankan Nabi adalah keadilan (*al'adalah*), musyawarah (*al-syura*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawa*), dan semangat menghargai pluralitas keberagaman (*al-ta'addud al-diniyyah*). Dengan demikian, tugas pemimpin negara adalah menjamin pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik kenegaraan. Karena itulah, perdebatan yang menguras energi mengenai bentuk negara harus diakhiri. Semua komponen bangsa harus berpandangan bahwa NKRI merupakan rumusan final sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa (*the founding fathers*).

Hal itu berarti gagasan mewujudkan negara Islam dapat dikatakan tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam tataran normatif maupun historis. Bahkan, dalam konteks kekinian cita-cita mendirikan negara Islam sebagai negara ideologis dapat dikatakan tidak kompatibel dengan dunia modern. Apalagi, realitas menunjukkan bahwa cita-cita membangun sistem politik yang bercorak transnasional selalu mengalami kegagalan. Cita-cita gerakan Islam politik di banyak negara juga belum berhasil diwujudkan.

Karena itulah, Oliver Roy (1994) menyebut bahwa cita-cita gerakan Islam politik sebagai *Islamic political imagination* (imajinasi politik Islam). Pernyataan ini relevan dengan realitas politik di dunia Islam. Kondisi politik Indonesia juga menunjukkan gejala yang sama. Elit partai berasas Islam yang tergabung dalam PKS, PPP, dan PBB juga belum menunjukkan diri sebagai figur yang berintegritas. Demikian juga elit partai berbasis ormas keislaman seperti PKB dan PAN. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian elit partai tersebut terjerat dalam kasus korupsi dan perempuan.

Dampaknya, partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman selalu gagal menjadi partai besar. Itu dapat dilihat dari hasil pemilu sejak era reformasi. Hasil survei beberapa lembaga juga menunjukkan bahwa nasib partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman tidak kunjung membaik dalam Pemilu 2014.

Justru partai berideologi nasionalis yang menunjukkan kejayaannya. Realitas politik tersebut jelas tidak sejalan dengan data statistika yang menunjukkan jumlah umat Islam yang mayoritas. Karena itu, harus diakui bahwa politik aliran di negeri ini benar-benar telah tamat. Pilihan politik umat kian mencair dan otonom, tidak lagi terkotak-kotak berdasar perbedaan budaya, etnik, dan agama.

Seharusnya realitas politik tersebut menjadi pelajaran bagi elit muslim, baik yang berkiprah di jalur politik maupun kultural. Kini sudah tidak eranya lagi mewacanakan simbol-simbol keagamaan, seperti menegakkan syariat dan mewujudkan khilafah. Kini, umat semakin cerdas memilih siapa yang memiliki rekam jejak baik sehingga pantas dipilih.

Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam

Konflik terbuka antarelit PPP semakin memanas pada pertengahan September 2014. Puncaknya, terjadi saling pecat antarkader partai berlambang Kakbah tersebut. Seakan tidak terima dirinya dilengserkan secara tidak terhormat dari posisi ketua umum, Suryadharma Ali (SDA) balik memecat sejumlah elit PPP. Tindakan SDA itu merupakan balasan terhadap kelompok M. Romahurmuzy, Emron Pangkapi, dan Suharso Monoarfa. Menurut SDA, tiga elit itulah yang terus merongrong posisinya. Oleh SDA, ketiganya tidak hanya diberhentikan dari jabatan mereka, melainkan juga dipecat dari keanggotaan sebagai PPP.

Kisruh PPP semakin menambah suram wajah partai-partai Islam. Sebelumnya, PKS yang digadang-gadang menjadi partai besar juga tersandung kasus korupsi. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kasus korupsi itu melibatkan presiden PKS. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sulit sekali mengharapkan kejayaan partai-partai Islam. Padahal, pada era Orde Lama, partai Islam yang direpresentasikan Masyumi dan NU mengalami masa kejayaan. Saat itu Partai Masyumi

dan NU mampu bersaing ketat dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dengan meminjam kategori yang dibuat Saiful Mujani, partai Islam dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, partai yang berbasis organisasi kemasyarakatan (Ormas) keislaman, seperti PKB dan PAN. *Kedua*, partai yang secara eksplisit menyebutkan Islam sebagai asas ideologi, seperti PKS, PPP, dan PBB. Sejauh ini partai-partai Islam tersebut belum menunjukkan kiprah yang menggembirakan. Data Pemilu 2014 menunjukkan, hanya PKB yang mengalami kenaikan suara signifikan dengan perolehan 9,04 persen.

Sementara itu, partai Islam lain menunjukkan perolehan suara yang kurang signifikan. Misalnya, PAN (7,59 persen), PKS (6,79 persen), PPP (6,53 persen), dan PBB (1,46 persen). Pertanyaannya, mengapa partai-partai Islam belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, padahal mayoritas bangsa ini beragama Islam? Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan belum berhasilnya partai-partai Islam.

Pertama, umat Islam yang suaranya diperebutkan partai-partai Islam adalah mereka yang tergabung dalam berbagai ormas keislaman. Polarisasi umat Islam dalam berbagai ormas keagamaan itu secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya penyebaran suara sehingga tidak dapat dimobilisasi untuk memilih partai Islam tertentu. Selalu ada alasan yang bersifat emosional dan ideologis sehingga suara umat tersebar ke beberapa partai.

Faktor *kedua*, perjalanan sejarah umat Islam Indonesia selalu diwarnai munculnya kecenderungan militerisasi. Akibatnya, umat Islam mengalami trauma politik karena harus berhadapan dengan kolaborasi kekuasaan dan kekuatan militer. Fenomena itu bisa diamati pada awal era Orde Baru hingga pertengahan 1980-an. Pada masa itu, banyak elit muslim yang menjadi korban politik kekuasaan Orde Baru melalui isu "komando jihad". Dampaknya, umat Islam tidak lagi menempatkan politik sebagai satu-satunya orientasi perjuangan.

Sebagian elit muslim mulai menempuh perjuangan melalui jalur kultural dengan mengembangkan institusi pendidikan, ekonomi-bisnis, dan berbagai jenis pelayanan sosial. Hasil perjuangan melalui jalur kultural tersebut kini mulai bisa dirasakan. Tengoklah berbagai lembaga pendidikan berkualitas yang siap mencetak generasi masa depan bangsa; lembaga ekonomi-bisnis yang mampu menjadi

tumpuan pemberdayaan potensi ekonomi umat; serta lembaga sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan yang siap memberikan pelayanan. Berjuang melalui jalur kultural ini seakan telah menghadirkan *blessing in disguise* (rahmat tersembunyi) bagi umat.

Faktor *ketiga*, dikarenakan tema yang wacanakan elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman banyak yang tidak berkaitan dengan persoalan riil rakyat. Tema seperti pemberlakuan syariat Islam, khilafah, dan pembentukan negara Islam, rasanya, sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Tema itu hanya melahirkan romantisme sejarah kejayaan masa silam dan tidak mampu menjawab persoalan yang kini dihadapi umat.

Faktor *keempat* berkaitan dengan performansi elit partai Islam. Sudah bukan rahasia lagi, betapa banyak elit partai berplatform Islam dan berbasis ormas keislaman yang tidak menunjukkan karakter sebagai politisi muslim sejati. Sebagian mereka bahkan menampilkan diri layaknya "politisi busuk" karena terlibat kasus suap, korupsi, dan perempuan.

Bandingkan dengan perilaku politisi berkarakter seperti M. Natsir yang juga ideolog Masyumi. Misalnya, Natsir pernah menolak untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan Mr Ali Sastroamijoyo (PNI) pada masa demokrasi liberal karena merasa ada perbedaan prinsipil dengan kebijakan pemerintah. Marilah kita bandingkan keteguhan Natsir dengan sikap politik yang ditunjukkan elit partai Islam masa kini.

Mereka yang pada saat kampanye berjanji memperjuangkan sesuatu yang dipandang ideal menurut ajaran Islam ternyata malah tunduk pada proses tawar-menawar politik. Itu dapat dilihat dari tarik-menarik kekuatan elit PPP dalam menentukan sikap terhadap pemerintah baru. Sebagian elit menghendaki tetap bersama Koalisi Merah Putih yang dipelopori partai pendukung pasangan Prabowo-Hatta. Sebagian lagi menginginkan untuk bergabung dengan kubu pemenang pilpres, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tampak sekali sebagian elit partai Islam ingin memosisikan diri sebagai oposisi kritis. Sementara itu, pada saat bersamaan sebagian elit tetap berkeinginan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Sikap mendua tersebut jelas menunjukkan buruknya performansi elit partai Islam. Dengan sikap itu, mereka sejatinya telah kehilangan idealisme dalam berpolitik.

Budaya Plutokrasi

Anda tentu masih ingat dua buku inspiratif karya Eko Prasetyo berjudul *Orang Miskin Dilarang Sekolah* dan *Orang Miskin Dilarang Sakit*. Dua buku tersebut merupakan sindiran yang pedas kepada pemerintah karena belum memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin. Sebab, kini telah terjadi fenomena komersialisasi pendidikan dan mahalanya biaya kesehatan di rumah sakit milik pemerintah.

Akibatnya, keluarga miskin pun kehilangan akses untuk memperoleh layanan terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal, konstitusi telah mengamanahkan agar dua bidang yang menjadi hajat hidup masyarakat tersebut disediakan dengan sebaik-baiknya. Ternyata perlakuan yang diskriminatif terhadap orang miskin tidak hanya terkait dengan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di bidang politik juga terjadi hambatan bagi orang miskin untuk dapat berkiprah. Sebab, untuk berkiprah di dunia politik seseorang harus menyediakan biaya yang superbesar. Biaya politik

yang tinggi (*high cost*) terutama terjadi sejak era pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara langsung, baik untuk anggota legislatif, kepala daerah, maupun presiden. Tentu saja, persoalan biaya yang besar tersebut dapat menjadi halangan bagi orang miskin untuk bisa terlibat dalam proses politik di legislatif dan eksekutif.

Pesan agar orang miskin tidak terjun di dunia politik lantaran biaya yang dibutuhkan sangat besar jelas tergambar dalam daftar bakal calon anggota legislatif (*bacaleg*) Pemilu 2014. *Bacaleg* yang didaftarkan partai politik peserta pemilu ke KPU umumnya adalah figur yang populer dan penuh "gizi". Mereka berasal dari kelompok artis, atlet, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Sebagian lagi tentu saja *bacaleg* dari internal partai. *Bacaleg* populer dipilih dengan tujuan mendongkrak perolehan suara partai. Sementara itu, *bacaleg* "bergizi" penting untuk membiayai ongkos politik dan kebutuhan logistik selama pemilu.

Sepanjang era reformasi ini, keberadaan *bacaleg* populer dan bergizi terasa sangat dominan. Bahkan, kader partai yang telah berpeluh keringat terkadang harus tersisih karena kalah bersaing dengan pendatang baru yang lebih populer dan bergizi. Kecenderungan partai merekrut *bacaleg* nonkader yang populer dan bergizi jelas menyisakan pertanyaan. Apalagi, fenomena itu tidak hanya terjadi dalam penentuan *bacaleg*. Pengusungan figur nonkader dalam pemilihan umum kepala daerah (*pilkada*) juga sering terjadi.

Dalam kaitan itu, publik pun berhak menanyakan sistem pengaderan partai. Pertanyaan tersebut wajar diajukan karena salah satu tugas partai semestinya ialah melakukan kaderisasi. Partai sejatinya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Untuk menjalankan tugas mulia itu, setiap partai telah digelontor anggaran yang cukup besar dari pemerintah. Tetapi, secara jujur harus diakui bahwa mayoritas partai hanya bekerja lima tahun sekali, yakni menjelang pelaksanaan pemilu.

Akibatnya, partai mengalami kebingungan tatkala penentuan *bacaleg* dan calon kepala daerah. Termasuk yang berkaitan dengan itu adalah pemenuhan kuota 30 persen untuk *bacaleg* perempuan. Berkaitan dengan pemenuhan kuota minimal untuk *bacaleg* perempuan itu dapat dikatakan bahwa hampir semua partai bermasalah. Hal itu menunjukkan bahwa program kaderisasi di

partai memang tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya.

Semangat mayoritas partai mengusung figur nonkader dalam pencalegan dan pilkada dengan pertimbangan popularitas dan "gizi" jelas dapat mengancam sistem demokrasi. Sebab, pada saatnya nanti, lembaga-lembaga publik di negeri ini, terutama legislatif dan eksekutif, pasti dikuasai oleh kelompok elit, populer, dan hartawan. Persoalan menjadi semakin kompleks jika mereka ternyata tidak memiliki kompetensi dan *track record* yang baik.

Kekhawatiran terhadap hal itu pernah dikemukakan Kevin Phillips dalam *Wealth and Democracy; A Political History of the American Rich* (2002). Dalam buku monumentalnya itu, Kevin menegaskan bahwa kini ada kecenderungan rezim politik dan kekuasaan digerakkan oleh kelompok orang kaya. Rezim politik dan kekuasaan pun dibangun dengan menggunakan logika *the rule of the rich*. Artinya, keberlangsungan suatu rezim didasarkan kepada keinginan orang-orang kaya.

Logika *the rule of the rich* meniscayakan bahwa orang yang tidak memiliki uang tidak boleh bermimpi menjadi pejabat publik. Hal itu terjadi karena untuk menjadi pejabat publik seseorang harus menyiapkan dana yang superbesar. Praktik politik yang mengandalkan kekuatan uang itulah yang dikatakan Kevin sebagai budaya plutokrasi. Dalam bahasa Yunani, kata plutokrasi terdiri atas *ploutos* (kekayaan) dan *kratos* (kekuasaan). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa plutokrasi merupakan praktik sistem pemerintahan yang digerakkan kelompok elit yang memiliki kekayaan. Kelompok itu telah membentuk budaya serbauang dalam menyelesaikan semua urusan, termasuk politik, kekuasaan, dan hukum.

Jika mengamati dinamika politik tanah air terkini, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa wajah politik kita telah diwarnai budaya plutokrasi. Bahkan, wajah politik masa depan, tampaknya, juga masih akan dipimpin rezim berbudaya plutokrasi. Apalagi jika kita membaca hasil survei mengenai figur-figur yang potensial dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014. Berdasar survei-survei itu, tampak sekali bahwa sebagian besar di antara mereka adalah jago-jago dari kelompok elit-kaya. Misalnya, ketua partai, pengusaha, raja media, tuan tanah, artis, atlet, serta pemimpin informal yang mapan secara sosial dan ekonomi.

Semestinya tidak ada yang salah dengan keterlibatan kaum elit-

kaya dalam politik. Sebab, semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk berpolitik sehingga dapat dicalonkan sebagai presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif. Yang menjadi masalah adalah tatkala uang menjadi panglima dalam proses-proses politik dan penentuan kebijakan. Persyaratan kemampuan minimal dana yang harus dimiliki bacaleg saat mendaftar ke partai peserta pemilu menjadi bukti betapa uang masih menjadi penentu. Begitu juga halnya dengan kewajiban membayar "mahar" kepada partai pengusung bagi calon yang hendak maju (*running*) dalam pilkada dan pemilihan presiden.

Budaya politik plutokrasi jelas semakin melapangkan jalan bagi pemilik modal untuk menjadi pejabat publik. Akibat budaya politik yang serbauang itu dapat diduga motivasi dari setiap calon tatkala berhasil meraih kursi kekuasaan. Hampir dapat dipastikan bahwa yang pertama dipikirkan tatkala kekuasaan di tangan ialah mengembalikan modal. Persoalan pemenuhan janji saat berkampanye untuk sementara waktu harus diabaikan selama modal belum kembali. Bermula dari pemikiran itulah budaya korup yang terjadi di lembaga-lembaga publik meningkat.

Jika budaya politik sudah demikian, pertanyaannya adalah masihkah kita akan memercayakan persoalan hajat hidup rakyat kepada figur-figur yang hanya mengandalkan popularitas dan uang? Rasanya sudah waktunya kita berubah menjadi pemilih yang cerdas. Karena itu, jangan mudah terpesona oleh popularitas. Jangan pula memilih karena uang. Kita harus berkomitmen untuk memilih calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang berkompeten lagi berintegritas. Jadi, mari kita waspadai munculnya budaya rezim plutokrasi.

Politik Dinasti dan Kisah Adam

Memasuki tahun 2014, fenomena politik dinasti terus menjadi perbincangan publik. Lakon utamanya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarga besarnya, yang menguasai sejumlah jabatan publik di Banten dan sekitarnya. Bukan hanya itu. Dinasti Atut juga menguasai sejumlah proyek di pemerintahan. Terbaru, Atut juga dikaitkan dengan kepemilikan dua pulau di Banten, yakni Pulau Popole dan Pulau Liwungan.

Jika mau jujur, sebenarnya bukan hanya Atut yang telah membangun politik dinasti. Banyak elit di negeri ini yang juga terobsesi untuk membangun politik dinasti. Tengoklah daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014. Jika ditelisik lebih jauh, ternyata sebagian di antara mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan elit partai dan penguasa di daerah.

Dalam praktiknya, modus politik dinasti dilakukan penguasa dengan menempatkan orang yang masih berhubungan darah, keturunan, atau kerabat, sebagai pejabat publik. Mekanisme ini

sangat berbahaya karena pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak.

Yang menyedihkan, politik dinasti sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural ini masyarakat seakan diberi peran. Tetapi, jika diamati, jelas sekali bahwa masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Hal itu karena calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang dimajukan sudah diskenario. Pemenangnya harus orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elit-penguasa.

Dalam perspektif Ibn Khaldun, politik dinasti ini dinamakan *ashabiyah*. Ibn Khaldun dalam *The Muqaddimah an Introduction to History* (1998) menyebut politik *ashabiyah* sebagai gejala yang bersifat alamiah. Hal itu karena umumnya penguasa di masa sebelum modern selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Namun, secara tegas dia menyatakan bahwa politik *ashabiyah* dapat menyebabkan kehancuran negara. Dalam konteks budaya modern, praktik politik *ashabiyah* jelas menjadi persoalan. Apalagi, jika politik *ashabiyah* itu dijalankan dalam suasana demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

Ada baiknya penguasa yang terobsesi untuk membangun politik dinasti membaca ulang kisah terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Mengapa Adam dan Hawa terusir dari surga yang penuh kenikmatan? Jawabnya, karena keduanya tergoda oleh bujuk rayu setan. Menurut bisikan jahat setan, jika Adam dan Hawa mau makan buah khuldi, keduanya akan merasakan kenikmatan surga dalam waktu lama dan memperoleh kekuasaan yang tidak pernah binasa.

Singkat kisah, Adam dan Hawa akhirnya tergoda bujuk rayu setan. Keduanya pun memakan buah khuldi. Akibatnya, keduanya harus menerima kenyataan sebagai hamba yang terhina dan terusir dari surga (QS. Thaha: 120-121). Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah pengusiran Adam dan Hawa? Paling tidak, ada dua pelajaran yang dapat diambil. *Pertama*, ternyata manusia sangat mudah tergoda kekuasaan yang dipersepsi dapat membawa kenikmatan hidup di dunia. Dan, orang yang memiliki syahwat politik tinggi akan selalu berusaha menikmati kekuasaan di dunia ini dalam waktu lama.

Kedua, keinginan orang untuk mempertahankan kekuasaan itu disebabkan tidak ingin kekuasaan yang diraih dengan susah payah

harus berpindah tangan. Karena itu, kekuasaan yang telah diraih harus dipertahankan selama mungkin. Jika kekuasaan harus berpindah tangan, diusahakan agar kekuasaan itu jatuh kepada istri/suami, anak, menantu, ipar, kerabat, dan teman dekatnya.

Selain untuk melanggengkan kekuasaan, strategi mencalonkan orang terdekat dalam pemilu atau pilkada adalah untuk menjamin dirinya selamat dari persoalan hukum pasca tidak berkuasa. Itu dapat dimaklumi karena ada banyak mantan pejabat publik yang berurusan dengan hukum setelah turun takhta.

Karena sangat berbahaya itulah, pemerintah dan legislatif harus merumuskan regulasi yang terukur agar politik dinasti tidak terus terjadi. Modal untuk membuat regulasi jelas sudah ada. Yakni, larangan terhadap seseorang untuk tampil sebagai kepala daerah lebih dari dua periode.

Sayangnya, peraturan ini masih disiasati beberapa kepala daerah yang tidak boleh mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode. Caranya, mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Berkaitan dengan problem ini, peraturan yang ada harus dipertegas sehingga tidak multitafsir. Misalnya, melarang kepala daerah yang sudah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah.

Idealnya, batasan maksimal dua periode juga berlaku untuk jabatan di legislatif. Juga penting diatur boleh tidaknya kerabat dekat maju dalam rekrutmen pejabat eksekutif dan legislatif. Peraturan ini penting untuk menghindari politik dinasti dan demi tegaknya fungsi *checks and balances* antarlembaga negara. Sebab, fungsi saling mengontrol pasti tidak maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar.

Karena politik dinasti tidak hanya dilakukan Atut, publik harus waspada. Untuk menghindari politik dinasti, penguasa negeri ini harus becermi pada kisah Adam. Meski kita ini anak cucu Adam, kita tidak boleh mengulangi kesalahannya. Jika kisah Adam berulang, lalu lahir Atut-Atut baru, negeri ini pasti kian hancur.

Bangun Koalisi Mengusung Figur Alternatif

Wacana membangun koalisi strategis untuk mendorong munculnya calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kuat, kompeten, dan bersih terus digelorakan. Beberapa strategi diwacanakan, seperti dorongan agar partai Islam dan partai berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman bergabung menjadi satu kekuatan. Tujuannya adalah agar dapat mengusung capres dan cawapres alternatif.

Tetapi harus diakui, untuk menyatukan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan politik tidaklah mudah. Apalagi jika melihat rekam jejak partai-partai Islam sepanjang sejarah perpolitikan di tanah air. Umumnya partai-partai Islam berbudaya saling membunuh. Kanibalisme antar partai Islam sangat terasa dalam setiap pemilu. Jika ada partai Islam memperoleh kenaikan suara signifikan maka korbannya adalah sesama partai Islam.

Karena itu, jika partai-partai Islam ingin membangun koalisi yang kuat maka harus melibatkan partai-partai berideologi nasionalis. Itu penting agar semangat koalisi yang dibangun tidak terkesan

primordialisme. Yang juga penting ditekankan, keinginan membangun koalisi harus didasarkan pada kepentingan bangsa yang multikultural.

Koalisi strategis ini penting karena berdasar hasil pemilu legislatif, tidak ada partai yang memperoleh suara lebih dari 20 persen. Itu berarti untuk mengusung capres dan wapres, partai harus berkoalisi dengan partai lain. Koalisi strategis dimaksudkan untuk memecah kebutuhan sehingga dapat dimunculkan figur alternatif di luar Jokowi (PDIP), Aburizal Bakrie (Golkar), dan Prabowo (Gerindra). Tiga capres ini disebut karena secara resmi diusung partai yang kebetulan menduduki posisi tiga besar dalam pemilu legislatif, 9 April lalu.

Di luar tiga nama tersebut ada sosok Dahlan Iskan, Mahfud MD, Jusuf Kalla, Wiranto, Muhaimin Iskandar, Hatta Rajasa, dan Hary Tanoesoedibjo. Mereka layak dijadikan figur alternatif karena memiliki kapasitas dan rekam jejak jelas. Dengan memunculkan figur alternatif berarti akan semakin banyak pilihan bagi rakyat pada pemilu presiden dan wakil presiden, 9 Juli 2014.

Usaha beberapa pihak untuk membangun koalisi strategis berpotensi menjadi kekuatan alternatif. Apalagi jika partai koalisi berhasil menyepakati figur yang kuat dan diterima semua pihak. Penentuan figur ini penting karena dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang dijual adalah ketokohan. Apalagi perilaku politik (*political behaviour*) masyarakat sangat dinamis sehingga sulit diprediksi.

Kondisi tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan penggagas koalisi. Tantangan penggagas koalisi terletak pada kemampuannya melakukan manajemen konflik partai politik pendukung. Sebab, sudah bukan rahasia, partai pendukung koalisi pasti menghendaki pembagian kekuasaan. Itu dapat dimaklumi karena dalam politik dikenal doktrin yang menyatakan bahwa politik adalah *who gets what, when, and how*. Pernyataan ini menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya.

Dalam politik juga dikenal hukum yang tak terelakkan, bahwa tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Di antara aktivis partai politik juga sering menyatakan bahwa perbedaan pendapat itu biasa. Yang menjadi masalah adalah jika terjadi perbedaan pendapatan. Akibatnya, dunia politik sangat rentan

dengan kultur “memecah” dan “berpecah”. Itulah yang menyebabkan partai politik tertentu keluar dari koalisi karena merasa tidak memperoleh pembagian kekuasaan sebagaimana yang diharapkan.

Tantangan lebih berat akan dirasakan penggagas koalisi ketika masuk tahap penentuan nama capres dan cawapres. Tahap ini dapat dikatakan sebagai fase yang paling krusial. Pengalaman politik partai-partai Islam dan partai-partai berbasis ormas keislaman dapat dijadikan pelajaran. Partai-partai ini biasanya mudah menyatukan visi dalam merumuskan bangunan masyarakat Islami. Tetapi partai-partai ini akan mudah berpecah ketika sampai pada tahap penentuan figur yang harus mengisi jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Persoalannya sekarang berpulang pada para penggagas koalisi. Figur manakah yang representatif diusung menjadi capres dan cawapres alternatif. Apalagi kini telah tersedia beberapa tokoh yang potensial dicalonkan. Jika figur alternatif telah berhasil disepakati, langkah penting yang lain adalah mencarikan “boarding pass” alias kendaraan politik. Untuk menentukan kendaraan politik ini yang perlu dipertimbangkan adalah membangun koalisi pelangi yang melibatkan sebanyak mungkin partai dari berbagai latar belakang ideologi.

Persoalan ideologi politik ini tampaknya masih menjadi variabel yang penting dipertimbangkan dalam menentukan koalisi strategis. Salah satu alternatif yang dapat dikemukakan adalah bahwa partai politik pendukung harus merepresentasikan gabungan ideologi nasionalis-religius. Politik representasi ideologi ini penting untuk mengakomodasi politik aliran yang masih menjadi kultur dalam sistem politik tanah air. Politik representasi sipil-militer dan Jawa-non Jawa juga penting dipertimbangkan. Karena itu perlu dicari figur yang dapat merepresentasikan perpaduan kekuatan ideologi, kedaerahan, dan sipil atau militer.

Yang juga penting diperhatikan penggagas koalisi adalah menyiapkan rancangan program strategis dan pragmatis yang pro rakyat. Penyiapan program ini penting agar figur yang disepakati menjadi capres dan cawapres alternatif tidak hanya berbekal cek kosong. Figur alternatif harus dibantu untuk menyiapkan *blue print* Indonesia lima tahun mendatang.

Itu berarti penggagas koalisi strategis perlu bekerja sama menentukan prioritas program yang akan ditawarkan dalam masa kampanye. Kemasan tema kampanye yang lebih menyentuh

kebutuhan riil masyarakat harus menjadi prioritas. Karena itu tema tentang penyediaan kebutuhan pokok yang murah, tersedianya lapangan pekerjaan, kemudahan akses pendidikan, dan layanan kesehatan, penting diutamakan.

Jika langkah-langkah ini yang dilakukan penggagas koalisi strategis, rasanya kemunculan figur alternatif akan menjadi kenyataan. Yang penting figur alternatif itu harus kuat, kompeten, segar, dan bersih dari “noda” masa lalu. Dengan sumber daya yang melimpah, rasanya tidak sulit menemukan pribadi-pribadi yang bertalenta sebagai pemimpin bangsa yang besar ini. Bangsa ini juga harus belajar dari kesalahan masa silam. Jangan memilih pemimpin hanya karena popularitas dan tampilan fisiknya, tanpa melihat rekam jeaknya.

Tiada Lawan Abadi dalam Politik

Mantan dosen Fisipol UGM, Profesor Idris Adrianata Kesuma, pernah mengatakan: *If a diplomat says yes, it means maybe. If a diplomat says maybe, it means no. A diplomat never says no.* Artinya, jika seorang diplomat berkata iya, itu berarti mungkin. Kalau ia mengatakan mungkin, itu berarti tidak. Seorang diplomat tidak pernah mengatakan tidak.

Karena posisi diplomat layaknya politisi maka pernyataan tersebut sesungguhnya juga berlaku bagi mereka yang berkecimpung dalam politik praktis. Jika dikaitkan dengan dinamika politik di Tanah Air saat pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), terasa sekali pernyataan tersebut relevan digunakan untuk menelaah perilaku elit dan partai politik (parpol). Perilaku elit dalam setiap perhelatan pilpres dan pilkada tampaknya sangat sulit diprediksi.

Tidak jarang mereka kemudian mengambil keputusan yang sulit dinalar publik. Salah satu indikatornya dapat diamati dari

dukungan elit dan parpol saat pengusungan calon presiden (capres), calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon wali kota. Mereka seakan tidak lagi memedulikan persoalan *platform* dan ideologi partai. Perbedaan visi antarpasangan calon yang maju dalam pilpres dan pilkada juga diabaikan.

Tengoklah yang terjadi pada pasangan capres dan cawapres dalam pilpres lalu. Menurut pengamatan publik, pasangan Prabowo-Hatta sejatinya memiliki perbedaan yang sangat fundamental. Visi pembangunan ekonomi Prabowo adalah kerakyatan. Sementara Hatta lebih dikenal figur yang pro pada ekonomi liberal. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) juga memiliki perbedaan dalam senioritas, pengalaman, dan pandangan mengenai beberapa persoalan kebangsaan.

Masih segar dalam ingatan publik bagaimana penilaian JK terhadap Jokowi saat didorong berbagai elemen untuk maju dalam pilpres. Dalam wawancara yang ditayang ulang beberapa televisi jelas sekali JK mengecilkan kapasitas Jokowi. Dengan sinis JK bahkan mengatakan negara ini bisa hancur jika dipimpin Jokowi. Tetapi, dinamika politik bergerak dengan cepat, JK yang sebelumnya mengkritik keras ternyata bersedia untuk berpasangan dengan Jokowi dalam pilpres lalu.

Pertanyaannya, apa makna di balik perubahan sikap dari elit politik tersebut? Jawabnya, semua bergantung pada kepentingan. Jika kepentingan masing-masing elit telah mencapai kata mufakat, perbedaan yang terjadi dapat diabaikan. Pudarnya kepentingan ideologi dalam proses menjalin kemitraan antarelit partai semakin menegaskan bahwa budaya kontrak politik masih didasarkan pada kepentingan pragmatis jangka pendek.

Ada kalanya kepentingan itu berupa *sharing* kekuasaan bila calon yang diusung memenangkan pilpres dan pilkada. Juga ada dugaan bahwa kekuatan uanglah yang memengaruhi keputusan politik dari kelompok elit. Jika faktor uang itu benar, rakyat selayaknya bersedih. Itu karena ideologi perjuangan elit dan partai politik telah berganti dengan uang. Budaya politik uang inilah yang telah mengikis nilai-nilai perjuangan para politisi.

Akibat itu, kini sangat sulit menemukan ideolog partai politik yang benar-benar berkarakter seperti Mohammad Natsir dan Mr Mohammad Roem. Partai pengusung pasangan calon dalam pilpres dan pilkada juga seringkali mengabaikan pertimbangan ideologi

parpol yang menjadi mitra koalisinya. Parpol yang secara ideologis tampak berseberangan ternyata justru menjalin berkoalisi.

Rekam jejak calon yang didukung juga diabaikan. Elit partai pendukung dan calon yang secara kasat mata berbeda ideologis pada saatnya dapat bersinergi untuk membangun kekuatan. Fenomena inilah yang menarik untuk diamati dari perkembangan politik Tanah Air. Perkembangan politik yang sangat dinamis memungkinkan seseorang yang tadinya berkawan menjadi berhadapan, begitu juga sebaliknya.

Apalagi budaya politik Tanah Air kini sedang berkembang pesat politik transaksional atau politik dagang sapi. Dalam politik transaksional itulah semua perbedaan dapat dicarikan jalan keluar. Persyaratannya, ada kepentingan yang sama dari mitra koalisi. Salah satu doktrin dalam politik mengajarkan prinsip *who gets what, how, and when*. Politik itu persoalan siapa memperoleh apa, bagaimana, dan kapan.

Karena itu, persoalan *sharing* kekuasaan menjadi variabel yang penting dalam menjelaskan dukungan politik dari elit dan parpol. Dalam budaya politik transaksional rasanya tidak mungkin dukungan diberikan tanpa syarat. Pasti ada kalkulasi politik yang disepakati antarelit dan parpol saat memberikan dukungan. Kalkulasi itu bisa berupa *sharing* kekuasaan atau imbalan dalam bentuk uang.

Itu berarti memang tidak ada yang gratis dalam dukungan elit dan parpol. Dalam politik juga berlaku doktrin bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan "pendapatan." Faktor perbedaan "pendapatan" itulah yang sering memicu persoalan sesama mitra koalisi. Jika dalam ilmu matematika dikenal ada sistem seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, sistem pembagian itulah yang paling krusial dalam politik.

Karena itu, jangan bermain-main dengan sistem pembagian dalam politik. Apalagi jika itu berkaitan dengan *sharing* kekuasaan dan pendapatan. Jika pembagiannya tidak adil, akan terjadi pecah kongsi. Itulah sebabnya dunia politik selalu diwarnai perpecahan. Politik juga selalu menghadirkan kejutan. Elit politik dan parpol yang sebelumnya tampak berseberangan bisa saling mendekat.

Mereka yang dulu menjadi lawan politik pada saatnya berubah menjadi mitra. Sebaliknya, mereka yang dulu menjadi mitra berubah menjadi lawan politik. Itu menunjukkan bahwa tidak ada lawan

atau kawan yang abadi dalam politik. Sekali lagi, yang abadi dalam politik adalah kepentingan. Selama ada kesamaan kepentingan, kemitraan akan berjalan baik dan begitu juga sebaliknya.

Dalam proses menjalin koalisi yang melibatkan elit dan parpol, kita mendambakan agar kepentingan jangka panjang yang diutamakan. Kepentingan itu adalah masa depan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Harus diakui, pemilu merupakan satu-satunya mekanisme yang dibenarkan konstitusi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Karena itu, elit dan parpol seharusnya tidak menggadaikan masa depan bangsa dengan kepentingan pragmatis dan jangka pendek.

Budaya Kontrak Politik

Perkembangan politik setelah pemilu legislatif terasa begitu dinamis. Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari sejumlah partai politik terus bergerak untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Elit partai politik yang lain juga beradu lari melakukan safari politik untuk menjajaki kemungkinan membangun koalisi. Tidak ketinggalan, sejumlah elit organisasi massa (ormas) keagamaan juga melakukan serangkaian pertemuan untuk menyamakan persepsi jelang pemilihan presiden (pilpres).

Usaha elit partai untuk membangun kesepahaman politik itulah yang kemudian populer disebut kontrak politik. Budaya kontrak politik menjadi tren sejak pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, caleg, serta calon dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada).

Jika ditengok ke belakang, budaya kontrak politik dimulai sejak Pemilu 2004. Kontrak politik juga mewarnai dinamika politik lokal seiring proses pilkada mulai provinsi, juga pilkada kabupaten dan

kota. Bukan hanya saat pilpres dan pilkada, kontrak politik juga dilakukan calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu legislatif lalu.

Modusnya, sebagian caleg melakukan kontrak politik dengan para calon pemilihnya. Misalnya, ada caleg yang berani menekan kontrak politik dengan janji memberikan seluruh gaji yang akan diperoleh pada rakyat jika terpilih sebagai legislator.

Juga ada kontrak bercorak money politics dengan menjanjikan imbalan uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan perolehan suara. Secara umum kontrak politik dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang melibatkan para elit partai koalisi, capres dan cawapres dengan partai pengusung, caleg dengan pemilih, dan rakyat dengan pemimpinnya.

Sayangnya dalam kontrak politik yang dilakukan elit, posisi rakyat sering hanya sebagai pemandu sorak (*cheer leaders*) dan sasaran mobilisasi. Dalam posisi ini rakyat tetap mengalami marginalisasi baik secara sosial maupun ekonomi. Bahkan secara politik rakyat mengalami tuna kuasa (*powerlessness*).

Di era reformasi ini semua orang berpeluang menjadi pelaku kontrak politik. Termasuk kalangan elit agama (kia) dan tokoh ormas keagamaan yang pada masa sebelumnya hanya berjuang di ranah kultural. Apalagi saat ini banyak elit agama dan ormas keagamaan yang menjadi pejabat publik di lembaga eksekutif dan legislatif. Kondisi ini tentu sangat memungkinkan mereka menjadi pemain dalam budaya kontrak politik.

Sebagian elit agama dan ormas keagamaan bahkan telah sedemikian jauh bermain dalam ranah politik praktis. Realitas inilah yang kemudian menyebabkan munculnya suara-suara sumbang pada hampir setiap ada kontrak politik. Dalam pandangan sebagian orang, kontrak politik sering dianggap permainan di tingkat elit. Itu berarti hanya kelompok elit yang diuntungkan dari budaya kontrak politik.

Dalam tradisi Islam, kontrak politik dapat disamakan dengan konsep baiat (*al-bay'ah*). Konsep ini dimaknai dalam konteks pembentukan sebuah negara. Negara dibentuk berdasarkan keinginan berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya membangun tatanan masyarakat yang tunduk dan patuh pada pimpinan. Untuk menjaga komitmen maka dibuatlah kontrak sosial (*al-'aqd al-ijtima'iy*) yang terjadi antara pemimpin dan rakyat dalam bentuk baiat.

Ibn Khaldun, sosiolog dan sejarawan muslim kenamaan, dalam

karya monumentalnya *The Muqaddimah an Introduction to History* (1998) menyatakan bahwa baiat adalah perjanjian atas dasar ikatan kesetiaan rakyat dengan pemimpinnya. Melalui mekanisme bai'at inilah pemimpin terpilih dilantik dan disumpah di hadapan rakyat.

Hampir sama dengan tradisi Islam, di Barat juga mengenal konsep kontrak sosial (*social contract*) seperti dikemukakan Jean Jacques Rousseau. Teori kontrak sosial Rousseau menekankan pentingnya perjanjian antarunsur masyarakat sehingga terwujud kebaikan bersama (*public good*).

Perbincangan mengenai kontrak politik berikut implikasinya dapat dijelaskan dengan meminjam kerangka pikir Peter Blau (1964) mengenai teori pertukaran sosial (*social exchange theory*). Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan.

Karena itu dapat dipahami jika dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Proses pertukaran sosial politik dimungkinkan karena ada pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang memberikan pertolongan. Di sinilah aspek kepentingan akan tampak menonjol. Maka, tidak mengherankan jika dalam budaya kontrak politik pembicaraan mengenai; *who gets what, how, and when* (siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan) menjadi perhatian utama.

Karena itu, publik sering mendengar ungkapan yang menyertai kontrak politik seperti politik dagang sapi, ongkos politik, dan bahkan "mahar" politik. Jadi tidak ada yang gratis dalam budaya kontrak politik yang melibatkan elit partai. Dengan penjelasan tersebut berarti upaya elit partai untuk membangun budaya kontrak politik harus dipahami dalam konteks teori pertukaran. Tetapi, kita tentu tidak boleh berburuk sangka terlebih dulu. Jika benar dalam kontrak politik terdapat kalkulasi sosial, ekonomi, dan politik, maka itu harus dipahami dalam konteks yang lebih proporsional.

Itu karena setiap kontrak politik meniscayakan adanya ongkos politik. Tentu saja akan lebih elegan jika tujuan kontrak politik adalah untuk memberikan jaminan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), kepastian hukum (*law enforcement*), dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu berarti orientasi kontrak politik seharusnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Persoalannya kini berpulang pada komitmen elit partai dan

tokoh agama yang sedang melakukan kontrak politik.

Adakah dalam kontrak politik itu dilandasi kepentingan pragmatis jangka pendek? Atau sebaliknya, motivasi melakukan kontrak politik adalah kepentingan jangka panjang dalam rangka membangun bangsa dan negara menjadi lebih sejahtera, terhormat, dan bermartabat.

Publik tentu akan terus mengikuti arah koalisi partai-partai politik yang kini sedang berproses. Untuk itu, kalangan elit harus diingatkan agar komitmen jangka panjang yang lebih diutamakan dalam budaya kontrak politik. Lebih dari itu, budaya kontrak politik juga harus dilakukan secara transparan, jujur, dan tanggung jawab.

Kaum Muda dan Siklus 20 Tahunan

Pemilu 2014 secara bertahap dilaksanakan pada 9 April dan 9 Juli. Pada 9 April kita memilih wakil-wakil rakyat di legislatif mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sementara pada 9 Juli dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dua hajatan ini jelas sangat bermakna bagi masa depan bangsa. Karena itulah sebagai warga bangsa kita harus menjadi pemilih yang bertanggung jawab.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah menetapkan daftar calon anggota legislatif (caleg). Daftar caleg yang disiapkan KPU itulah yang harus dipilih. Di antara caleg itu, sebagian merepresentasikan kaum muda yang masih segar dan bebas dari "beban noda" masa lampau, namun miskin pengalaman. Sebagian lagi diisi caleg kaum tua yang sarat pengalaman, meski terkadang penuh dengan "noda dan dosa" masa lampau.

Yang ideal tentu memilih caleg yang masih segar, bersih dari beban masa lampau, dan berpengalaman. Tetapi caleg ideal ini tentu tidak banyak jika kita mencermati "daftar menu" yang disiapkan

KPU. Itu karena sebagian besar caleg *incumbent* kembali bertarung. Berdasar realitas inilah, kita harus memilih caleg berdasarkan rekam jeaknya. Ingatlah, di ujung pilihan kita itu masa depan bangsa dipertaruhkan.

Jika berkaca pada sejarah, kita akan menemukan kiprah kaum muda dalam sejumlah gerakan kebangsaan. Kiprah kaum muda bermula dari pendirian Budi Utomo oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah dokter pada 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo ini menandai permulaan kebangkitan nasional. Fakta ini membuka kesadaran kita betapa kaum muda berperan dalam perjalanan bangsa.

Melalui teori siklus 20 tahunan, kita juga menyaksikan kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa. Itu dapat diamati melalui beberapa peristiwa yang menunjukkan peran kaum muda sebagai pendorong perubahan. Siklus 20 tahunan itu dimulai sejak era kebangkitan nasional (1908), sumpah pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), hingga reformasi (1998). Meski baru menunjukkan hasil pada 1998, kiprah kaum muda sesungguhnya telah dimulai pada pertengahan 1980-an.

Saat itu, kaum muda yang direpresentasikan kekuatan mahasiswa tidak pernah lelah memberikan koreksi dan kritik terhadap rezim Orde Baru. Era Reformasi yang menggantikan Orde Baru dalam konteks ini merupakan akumulasi dari berbagai koreksi dan kritik tersebut. Kiprah kaum muda yang tergambar dalam siklus 20 tahunan menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki kultur keilmuan serta keterampilan berorganisasi dan membangun jaringan yang hebat.

Sangat disayangkan, kultur tersebut tenggelam dalam hiruk-pikuk politik sepanjang era Reformasi. Bahkan, kita menyaksikan adanya penguatan interes politik di kalangan kaum muda. Kaum muda lebih menunjukkan minat dalam bidang politik dengan menjadi aktivis partai, anggota legislatif, dan tim sukses calon dalam pemilihan kepala daerah.

Keterlibatan kaum muda dalam politik menemukan momentum yang tepat seiring dengan kebijakan multipartai. Dinamika politik lokal juga memberikan ruang terbuka bagi kaum muda untuk berkiprah di jalur politik. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kini terjadi peningkatan "syahwat politik" di kalangan kaum muda. Peningkatan syahwat politik ini tidak hanya terjadi di daerah,

tetapi juga dalam skala nasional. Indikatornya adalah bergabungnya sebagian intelektual muda dalam kepengurusan partai politik. Padahal, mereka sebelumnya dikenal sebagai intelektual independen.

Elit partai seakan berlomba untuk mengajak kaum muda dengan memberikan jabatan penting. Targetnya, mereka dapat dijadikan sumber energi untuk menarik pemilih pemula. Sebagai konsekuensi adanya peningkatan syahwat politik kaum muda, kiprah dan perjuangan mereka banyak disalurkan melalui aktivitas politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian kaum muda telah tergoda dengan kehidupan politik yang dianggap lebih menjanjikan masa depan. Akibatnya, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi ruh perjuangan kaum muda terus tergerus.

Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal pada pimpinan partai. Peningkatan interest politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah akibat perbedaan pilihan politik. Perjuangan kaum muda pun tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, melainkan untuk tujuan pragmatis jangka pendek. Pilihan sebagian kaum muda berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan di ranah kultural tidak terlalu menonjol.

Padahal kalau dipikirkan, wilayah perjuangan di bidang politik jelas terbatas dengan peminat yang sangat banyak. Akibatnya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Sementara perjuangan di ranah kultural memiliki area yang luas dengan peminat sangat sedikit. Pilihan kaum muda untuk berkiprah di ranah politik jelas merupakan hak asasinya. Pilihan mereka untuk menjadi aktivis partai harus dipandang sebagai hak politiknya.

Namun, persoalan akan muncul jika pilihan kaum muda yang berkiprah di bidang politik menjadi terutama (*mainstream*). Pasalnya, dalam kondisi seperti ini perjalanan kaum muda akan selalu diwarnai intrik dan tarik menarik politik. Sebagian kaum muda juga berpikiran bahwa berkiprah melalui jalur politik dapat memberikan harapan yang instan untuk meraih kekuasaan, kemapanan, status sosial, dan kecukupan materi. Sementara berjuang melalui jalur kultural dianggap merupakan investasi jangka panjang yang melelahkan, penuh perjuangan, dan hasilnya baru dapat dinikmati kemudian.

Sebagian kaum muda yang *running* dalam pencalegan jelas harus dihargai. Demikian juga kaum muda yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Kita berutang budi pada mereka yang menjadi caleg dan capres/cawapres. Bangsa ini sedang membutuhkan pribadi-pribadi hebat, penuh dedikasi dan idealisme, sederhana, serta tahan godaan.

Kita akan sangat bersyukur jika sebagian besar dari kebutuhan bangsa ini diisi kaum muda. Karena itu, marilah kita dorong kaum muda untuk berkiprah melalui pemilu caleg dan capres/cawapres. Jika ini terjadi maka siklus 20 tahunan benar-benar menjadi kenyataan.

Selamatkan Peradaban Mesir

Republik Arab Mesir, atau lebih dikenal Mesir, merupakan negara yang memiliki sejarah hebat di bidang peradaban. Mesir merupakan pusat peradaban dunia, khususnya yang ada di belahan Timur, bersama China, India, dan Persia. Peradaban Barat yang ada di Yunani dan kemudian melahirkan begitu banyak filsuf ternama juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehebatan Mesir. Karena sejarah panjang itulah, negara yang berada di wilayah Afrika bagian timur laut ini termasuk negara maju di benua Afrika.

Bagi Indonesia, Mesir jelas memiliki posisi yang sangat penting. Itu karena Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa negara kita sejatinya berutang budi pada Mesir. Seperti Indonesia, Mesir juga berpenduduk mayoritas Islam. Karena itulah, terasa tepat sikap Presiden SBY saat itu yang mendesak agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah untuk menyelesaikan krisis di Mesir.

Bukti bahwa Mesir berkaitan erat dengan peradaban besar dunia dibuktikan dengan beberapa monumen kuno yang hingga kini masih berdiri megah. Beberapa peninggalan tersebut meliputi Piramid Giza, Kuil Karnak, Lembah Raja, dan Kuil Ramses. Di wilayah bagian selatan, tepatnya di Luxor, juga ditemukan peninggalan bersejarah yang mencakup sekitar 65 persen artefak kuno di seluruh dunia. Itulah yang menyebabkan Mesir hingga kini diakui sebagai pusat budaya dan politik wilayah Arab dan Timur Tengah.

Dunia Islam juga menempatkan Mesir sebagai negara terpenting setelah al-Haramain; Mekkah dan Madinah. Itu karena Mesir memiliki pusat pendidikan yang melegenda yakni Universitas Al-Azhar yang berada di Kairo. Nama Al-Azhar disandarkan pada sosok Sayyidah Fatimah al-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Salah satu universitas tertua yang selalu menjadi referensi umat Islam itu dibangun Dinasti Fatimiyah pada Ramadan (Oktober) 975 Masehi.

Dinasti Fatimiyah dikenal beraliran Syiah Ismailiyah. Dalam perkembangannya, Universitas Al-Azhar menjadi pusat pendidikan Islam bercorak Sunni. Al-Azhar kini menjadi ikon Mesir sekaligus simbol kemajuan pendidikan dunia Islam. Rasanya sudah tak terhitung betapa banyak lulusan Al-Azhar. Universitas ini pun telah melahirkan banyak pembaru yang tersebar di dunia Islam.

Sejarah kehidupan berbangsa di Mesir dimulai tatkala Napoleon Bonaparte melakukan ekspedisi pada 1798. Ekspedisi Napoleon ke Mesir diikuti rombongan yang terdiri atas ilmuwan dan teknolog dalam jumlah besar. Meski berlangsung hanya dua tahun, Napoleon telah membawa perubahan yang sangat penting bagi Mesir dan dunia Islam. Sebelum ekspedisi Napoleon, konsep kebangsaan di Mesir dan dunia Islam sangat kabur.

Paham kebangsaan hanya ditentukan melalui ajaran tentang persaudaraan (*ukhuwah*) berdasarkan kesamaan agama. Yang dikenal saat itu adalah konsep tentang umat (*ummah*) yang berarti persatuan universal berdasarkan ikatan keimanan. Praktiknya, seluruh umat dipersaudarakan berdasarkan kesamaan agama. Paham kebangsaan yang dibawa Napoleon kemudian menginspirasi banyak pemikir muslim.

Salah satunya al-Thahthawi, seorang pembaru Mesir, yang mengenalkan konsep cinta tanah air pada bangsanya. Gagasan cinta

tanah air itu kemudian mendorong suatu bangsa untuk membangun masyarakatnya. Sejak itulah dunia Islam yang berada dalam kekuasaan bangsa asing satu persatu membebaskan diri. Maka itu, konsep umat yang didasarkan pada kesamaan agama mulai bergeser pada kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu bangsa.

Sebagian pemikir muslim memang belum sepenuhnya menerima gagasan kebangsaan. Mereka masih terobsesi mewujudkan kesatuan umat berdasarkan kesamaan agama. Gagasan *Pan-Islamisme* al-Afghani dan *Jam'iyah Islamiyah* Rasyid Ridla dapat menjadi contoh. Dua gagasan ini memiliki keprihatinan yang sama yakni membangun solidaritas politik berdasarkan kesamaan aqidah. Gagasan ini awalnya dimaksudkan untuk menentang dominasi Barat terhadap dunia Islam.

Rasyid Ridla bahkan berkeinginan untuk membangun kembali sistem kekhalifahan seperti periode *al-Kulafa' al-Rasyidun*. Gagasan Ridla inilah yang menjadi inspirasi cita-cita politik tokoh Ikhwanul Muslimin. Namun, sejak Mesir diproklamasikan sebagai negara republik pada 15 Juni 1953, cita-cita politik Ikhwanul Muslimin tidak berhasil diwujudkan. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin hanya bergerak di bawah tanah.

Apalagi tatkala Mesir dipimpin Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun (1981-2011). Itu karena Mubarak dikenal pemimpin yang sangat represif. Sinar perubahan Mesir terasa terang benderang pascapengunduran diri Presiden Mubarak pada 11 Februari 2011. Euforia rakyat Mesir memuncak bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden baru.

Pemilu yang demokratis itu kemudian dimenangkan aktivis Ikhwanul Muslimin yang *hafidh* Alquran, Muhammad Mursi. Sayangnya, pemerintahan Presiden Mursi tidak berlangsung lama. Pada 3 Juli 2013, pemerintahan Mursi berakhir karena dikudeta angkatan bersenjata Mesir. Proses pengambilalihan pemerintahan dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata itu mengundang keprihatinan dunia. Tak ketinggalan ulama dan akademisi dari Universitas Al-Azhar.

Ulama kharismatik Syekh Yusuf al-Qaradhawi bahkan memfatwakan bahwa intervensi militer dalam penggulingan Presiden Mursi bertentangan dengan agama dan nilai-nilai demokrasi. Al-Qardhawi sempat menyarankan agar kekuatan angkatan bersenjata

mundur dari panggung politik. Angkatan bersenjata harus memberi kesempatan pada faksi-faksi politik untuk mencari solusi guna menyelamatkan hasil pemilu yang demokratis.

Tetapi, fatwa itu sama sekali tidak mengubah kondisi sosial politik Mesir. Kelompok pro dan kontra Presiden Mursi terus berhadapan. Akibat itu, ratusan korban pun meninggal karena tindakan represif pemerintah transisi yang didukung angkatan bersenjata. Sejumlah peninggalan bersejarah yang telah menjadi simbol kemajuan peradaban Mesir juga hancur lebur. Bangsa Mesir yang dulu dikenal sebagai pembangun peradaban kini berubah menjadi penghancur peradaban.

Capaian peradaban yang telah dibangun berabad-abad kini hampir tak tersisa. Alangkah nestapa nasib Mesir kini. Bukankah membunuh sesama dan merusak peradaban itu perilaku orang yang tidak beradab? Karena itu, mari kita ajak dunia untuk menyelamatkan peradaban Mesir.

Akhlaq Pemimpin Publik

Publik tentu masih ingat ilustrasi Amien Rais tentang Perang Badar saat menjelang pilpres lalu. Saat situasi politik sedang memanas akibat dukung-mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tokoh reformasi itu mengatakan bahwa ada partai politik tertentu yang berpe-rilaku laksana pasukan yang turut berperang dalam Perang Badar, tetapi bertujuan untuk memperoleh harta rampasan perang.

Analogi Perang Badar di tengah suasana politik yang memanas saat itu kemudian memicu kontroversi karena dianggap telah membawa ihwal yang bersifat primordial yakni agama dalam konteks pilpres yang notabene termasuk ranah politik. Kritik berbagai kalangan terhadap ilustrasi Amien Rais pun bertubi-tubi. Itu dapat dipahami karena Amien Rais adalah pendukung utama Prabowo-Hatta. Apalagi Perang Badar merupakan jihad suci yang melibatkan Rasulullah dan para sahabat.

Di luar perdebatan yang muncul akibat analogi Amien Rais tersebut, para pemimpin publik negeri ini seja-tinya dapat mengambil

pela-ajaran tentang kepemimpinan Rasulullah dalam Perang Badar. Apalagi jika para pemimpin becermin pada kondisi yang dihadapi bangsa ini, terutama saat memasuki transisi kepemimpinan nasional pascapilpres.

Persaingan dan dukung mendukung capres kini sudah usai. Yang dibutuhkan adalah semangat kebersamaan untuk membangun bangsa. Untuk itulah, para pemimpin perlu meneladani Rasul dan para sahabat tatkala menghadapi situasi yang sangat sulit waktu Perang Badar. Dikisahkan bahwa pada Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad memimpin pasukan yang berkekuatan 305 orang dengan 70 kendaraan unta.

Dengan sarana transportasi yang terbatas, Nabi dan pasukannya bergerak meninggalkan Madinah menuju Badar. Jarak perjalanan antara Madinah dan Badar diperkirakan 150 kilometer. Mengingat sulitnya medan dan terbatasnya sarana transportasi, setiap ekor unta dinaiki tiga atau empat orang secara bergantian. Nabi pun mendapatkan bagian yang sama dengan sahabat lain.

Selama perjalanan para sahabat beberapa kali menawari Nabi dengan kendaraan khusus satu ekor unta. Tetapi, tawaran itu ditolak Nabi dengan alasan bahwa pada masa sulit yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Rasanya inilah teladan yang perlu dijadikan spirit bagi setiap pemimpin dan pejabat publik. Pemenang pilpres sekaligus presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK, harus mengambil pelajaran dari keteladanan Nabi tatkala beliau memimpin pasukan dalam Perang Badar.

Pasangan Jokowi-JK harus meneladani perilaku Nabi Muhammad yang menunjukkan satunya kata dengan perbuatan. Nabi jelas sekali menunjukkan bahwa tidak sepantasnya seorang pemimpin meminta fasilitas saat rakyat sedang menghadapi kesulitan. Itu dilakukan Nabi dengan tulus untuk membangun kebersamaan, bukan sekadar pencitraan.

Bandingkan dengan realitas di negeri ini, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah. Juga saat pergantian anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Mereka umumnya meminta fasilitas yang serbarbar, termasuk mobil dinas yang mewah. Padahal mobil dinas yang lama masih layak pakai. Tentu saja perilaku demikian tidak menunjukkan sikap yang berempati pada rakyat.

Dalam Perang Badar juga diungkapkan betapa penting dukungan

rakyat pada pemimpin yang mau berjuang untuk kepentingan masa depan bangsa. Dikisahkan bahwa tatkala pasukan muslim telah berhadapan dengan pasukan Quraisy yang berkekuatan hampir 1000 orang dengan fasilitas transportasi unta yang berlimpah, Nabi sempat meminta pendapat pada sahabat. Beliau berseru dengan suara yang bergetar; "Wahai para sahabat, berikanlah padaku saran dan pertimbangan. Apakah kita terus maju melawan pasukan Quraisy atau sebaliknya?"

Seorang sahabat dari golongan Muhajirin bernama Miqdad bin Amir maju seraya berkata; "Rasulullah, teruskan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan tetap berjuang bersama tuan. Kami tidak akan bersikap seperti Bani Israil pada Nabi Musa yang mengatakan; Pergilah kamu sendiri bersama Tuhanmu dan berperanglah." Komitmen serupa juga ditegaskan Saad bin Muadz dari golongan Anshar.

Dukungan para sahabat terhadap Nabi ini penting dijadikan teladan bagi rakyat. Itu berarti semua elemen bangsa harus memberikan dukungan pada pemimpin yang telah dipilih rakyat melalui jalan demokrasi dengan segala kekurangannya. Syaratnya, pemimpin itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, kita harus mengingatkan pemimpin yang hanya berjuang untuk keluarga, kelompok, dan partai pendukungnya.

Karena itu, kita harus mengapresiasi gagasan Jokowi yang menghendaki anggota kabinetnya menanggalkan jabatan di partai politik. Sayang sekali, gagasan segar Jokowi itu sempat ditolak partai pendukungnya. Padahal gagasan itu penting untuk meningkatkan kinerja menteri sehingga benar-benar total bekerja sebagai pelayan rakyat.

Dengan bermodalkan dukungan yang kuat dari para sahabat, Nabi memimpin Perang Badar dengan penuh optimisme. Untuk menguatkan keyakinan dalam berjuang, sejenak Nabi menghadapkan wajah ke kiblat guna bermohon pada Allah agar diberi pertolongan.

Setelah merasa yakin doanya dikabulkan Allah, Nabi dan para sahabat maju ke medan laga dengan semangat berlipat. Dengan perjuangan dan bantuan Allah, Nabi dan para sahabat berhasil menaklukkan pasukan Quraisy yang berjumlah tiga kali lipat dari pasukan muslim (QS. Al-Anfal: 9).

Peristiwa dalam Perang Badar memberikan pelajaran bahwa untuk mengatasi problem yang dihadapi, yang harus dilakukan

pemimpin adalah selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kedekatan pada Tuhan ini penting karena dapat memberikan keyakinan dan energi yang luar biasa untuk keluar dari berbagai persoalan.

Bukankah saat ini kita sedang menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik yang tidak ringan? Jika kita tidak berhasil mengatasi problem tersebut, bangsa ini pasti akan berpotensi menjadi negara gagal (*failed state*). Karena itulah, kita berharap pemimpin publik negeri ini mengambil pelajaran dari akhlak Rasulullah tatkala memimpin Perang Badar. Semoga Jokowi-JK dapat menjalankan pemerintahan baru dengan semangat mengabdikan demi masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan bermartabat.

Hijrah dari Pencitraan ke Kerja

Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), telah dilantik. Yang patut disyukuri, pelantikan Jokowi-JK terlaksana dalam suasana penuh khidmat dan kehangatan. Hampir tidak ada kesan perseteruan antara partai-partai politik pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan kompetitor Jokowi-JK saat pilpres lalu, Prabowo- Hatta, juga hadir.

Tidak mengherankan jika pemimpin dunia, terutama dari negara-negara tetangga, menyambut pelantikan Jokowi-JK dengan penuh optimisme. Mereka berharap dapat menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Itu karena sebagai negara terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Pada konteks inilah visi internasional Presiden Jokowi benar-benar diuji.

Tidak ketinggalan, rakyat pun menyambut pelantikan Jokowi-JK dengan sangat antusias. Acara tasyakuran yang digelar Jokowi-JK bersama tim relawan di ibu kota negara tampak sangat meriah. Tidak hanya di ibu kota, berbagai lapisan masyarakat dari penjur

tanah air juga turut memeriahkan perayaan tasyakuran. Rangkaian kegiatan itu menunjukkan bahwa dunia dan rakyat di antero negeri menaruh harapan pada kepemimpinan Jokowi-JK.

Saat menyampaikan pidato kenegaraan yang pertama, Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Jokowi mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks. Jika semua elemen bersinergi maka Indonesia akan lebih hebat dan bermartabat. Kini kompetisi antarelite politik telah berakhir. Saatnya semua elemen bersatu untuk membangun negeri.

Pelantikan Jokowi-JK hampir bersamaan waktunya dengan perayaan tahun baru Islam, 1 Muharram 1436 Hijriah. Itu berarti Jokowi-JK dapat menjadikan spirit tahun baru Islam sebagai pemicu untuk bekerja dengan sepenuh hati. Untuk mewujudkan Indonesia lebih hebat dan bermartabat, kata kuncinya adalah mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Dengan spirit tahun baru Islam, elemen bangsa ini harus diajak menatap masa depan dengan optimistis.

Sejarah penentuan tahun baru Islam mengajarkan agar kita menjalani hidup dengan optimistis. Diceritakan bahwa penentuan tahun baru Islam bermula saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika itu wilayah kekuasaan Islam sangat luas. Para pemimpin di daerah kekuasaan Islam datang silih berganti untuk memberikan laporan pada khalifah. Umar melihat ada yang membingungkan dari laporan itu karena tidak disertai tanggal dan waktu. Umar pun mengundang para sahabat untuk menentukan kalender Islam.

Berbagai usulan disampaikan dalam pertemuan. Sebagian mengusulkan agar kalender Islam dimulai saat Muhammad SAW dilahirkan. Usulan ini ditolak karena saat seseorang dilahirkan pasti belum menunjukkan prestasi. Bahkan Muhammad belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kelahiran Muhammad dari segi peristiwa dan waktu juga tergolong biasa-biasa saja. Kelahiran Muhammad tidak seheboh Isa al-Masih yang lahir tanpa ayah. Jadi, tidak ada makna yang dapat memberi kesan mendalam dalam peristiwa kelahiran Muhammad.

Juga muncul usulan yang menghendaki agar wafatnya Muhammad dijadikan patokan penentuan kalender Islam. Usulan ini pun ditolak Umar karena kematian justru menandakan akhir perjalanan hidup seseorang. Dengan kata lain, kematian seseorang

sekaligus menjadi akhir dari capaian prestasinya. Karena itu kematian tidak layak untuk diperingati. Umar lantas mengajukan usulan agar kalender Islam dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi. Usulan itulah yang kemudian disepakati para sahabat.

Pilihan peristiwa hijrahnya Nabi sebagai patokan kalender Islam memberikan dua makna penting. Pertama, sebagai pengakuan terhadap prestasi Nabi dan sahabat. Kedua, untuk menumbuhkan spirit optimisme. Dikatakan pengakuan terhadap prestasi karena pada saat hijrah, Nabi dan para sahabat telah menunjukkan prestasi gemilang saat berdakwah di Makkah. Hijrahnya Nabi juga bermakna untuk menumbuhkan optimisme dalam diri sahabat setelah mengalami masa-masa sulit di Makkah. Dengan berhijrah ke Yatsrib (Madinah), berarti ada harapan bahwa Islam akan berkembang lebih baik.

Penentuan kalender Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah juga mengajarkan bahwa yang terpenting dalam hidup adalah berprestasi atau beramal (QS Al-Najm: 39-40). Rasanya ajaran tentang beramal inilah yang sangat fundamental dalam semua agama. Ajaran ini juga menegaskan bahwa keberadaan seseorang dinilai bukan berdasar prestise, status sosial, dan keturunan, melainkan prestasi atau kinerjanya.

Karena yang terpenting dari seseorang adalah prestasinya maka setiap pribadi dituntut untuk melahirkan amal yang bermanfaat. Melalui amal itulah seseorang akan dikenang meskipun telah meninggal dunia. Itulah yang terjadi pada pribadi-pribadi agung semacam Muhammad, Isa al-Masih, serta tokoh besar lainnya. Mereka dikenang karena telah membawa perubahan besar dalam sejarah peradaban umat.

Itu berarti jika Jokowi-JK ingin dikenang bangsa ini sebagai pemimpin pembawa perubahan, yang harus ditunjukkan adalah bekerja keras memperbaiki kondisi bangsa. Kini euforia dan harapan rakyat begitu tinggi pada Jokowi-JK. Jika Jokowi-JK sukses menunaikan janjinya, terutama mewujudkan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, dukungan rakyat pasti mengalir.

Sebaliknya, jika gagal memenuhi harapan rakyat, Jokowi-JK harus siap menerima kritik. Pendukung dan tim relawan juga harus legawa jika Jokowi-JK dikritik. Semua kritik itu harus dipahami sebagai wujud sayang rakyat pada pemimpinnya. Jokowi-JK harus membuktikan diri sebagai pemimpin yang lahir dari rakyat, bukan

sekedar pencitraan. Jokowi- JK juga harus menjauhi gaya kepemimpinan pemberi harapan palsu (PHP) atau pemberi angin surga (ansor).

Kini yang harus ditunjukkan Jokowi-JK adalah bersinergi untuk bekerja lebih baik, bukan sekedar pencitraan. Jika itu yang dilakukan maka sejarah pasti mencatat Jokowi-JK dengan tinta emas. Rakyat pasti akan mengenang presiden ketujuh RI layaknya pahlawan pembawa perubahan.

Karena itu Jokowi-JK harus menjadikan perayaan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk berhijrah dari politik pencitraan menjadi bekerja, bekerja, dan bekerja. Itu relevan dengan pernyataan Jokowi bahwa pencitraan akan muncul jika pemimpinnya mau bekerja keras.

Spirit Kemandirian Muhammadiyah

Ada pertanyaan yang terlontar di kalangan aktivis Muhammadiyah pasca pengumuman Kabinet Kerja pemerintahan baru, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pertanyaannya seputar tiadanya kader Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Pertanyaan ini wajar karena sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar semestinya Muhammadiyah dapat menitipkan kadernya untuk menjadi menteri. Apalagi jika melihat pengalaman Muhammadiyah yang telah teruji mengelola amal usaha, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Tetapi harus dipahami, bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik. Habitat Muhammadiyah adalah bergerak di bidang sosial keagamaan. Khitah Muhammadiyah juga menegaskan keinginan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Itu semua menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki budaya berpolitik. Penunjukan menteri juga keputusan politik sekaligus hak prerogatif presiden. Karena itu, semestinya warga Muhammadiyah menyikapi susunan kabinet Jokowi-JK dengan sewajarnya.

Justru dengan tidak masuk di kabinet, Muhammadiyah dapat memainkan politik adiluhung (*high politics*). Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai kekuatan kontrol di tengah budaya politik transaksional. Apalagi, tema yang digelorakan Muhammadiyah saat memasuki abad kedua adalah kemandirian. Berbagai kiat untuk membangun kemandirian juga telah dicanangkan. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan untuk memobilisasi potensi ekonomi amal usaha Muhammadiyah. Ikhtiar ini bertujuan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara persyarikatan dan perbankan.

Sebagai pilar *civil society*, Muhammadiyah harus tetap menunjukkan kiprahnya. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Laksana matahari, Muhammadiyah harus terus bersinar untuk mencerahkan kehidupan umat. Semangat memberi yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah juga harus terus ditumbuhkan melalui amal usahanya. Jika ini berhasil diwujudkan maka eksistensi Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan kehadirannya.

Sejauh ini Muhammadiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang mementingkan amal sosial. Karena itu, tidak berlebihan jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi yang menekankan pentingnya penghayatan ajaran agama dalam bentuk amalan (*a faith with action*). Karena itulah pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, selalu mengajak santrinya untuk mengkaji surah al-Ma'un (surat ke-107). Harapannya adalah agar santri mempraktikkan nilai-nilai surah al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman agama model Ahmad Dahlan tampaknya sangat membekas bagi warga Muhammadiyah. Nilai-nilai kedermawanan yang diteladankan Dahlan turut membentuk ajaran tolong-menolong (al-Maunisme). Keseriusan Dahlan selanjutnya diwujudkan dengan membentuk Majelis Penolong Kesejahteraan Umum (PKU). Tugas utama bidang ini adalah memperbaiki kesejahteraan umat.

Perspektif historis ini penting dikemukakan untuk mengingatkan kembali kiprah Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan filantropi. Sangat disayangkan, posisi sebagai gerakan filantropi ini belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan di bidang ekonomi.

Padahal untuk menjadi kekuatan *civil society* yang bebas dari konflik kepentingan, Muhammadiyah harus menjadi organisasi

yang kuat dan mandiri dalam aspek ekonomi. Pada konteks inilah, Muhammadiyah membutuhkan sebanyak mungkin kelompok saudagar untuk diajak berkiprah.

Kelompok saudagar ini perlu untuk memperkuat sektor ekonomi umat, terutama warga Muhammadiyah. Dengan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi, Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ini penting ditekankan karena sejauh ini posisi ormas umumnya kurang mampu menjalankan fungsi checks and balances pada pemerintah dan partai-partai politik.

Jika diselidik penyebabnya, dapat dikatakan bahwa ternyata ormas keagamaan masih banyak bergantung pada pemerintah dan partai-partai politik, terutama bantuan pendanaan. Yang ironis, ada ormas keagamaan yang merasa berkecil hati tatkala kegiatannya tidak dihadiri wakil pemerintah. Sikap ini jelas tidak sejalan dengan eksistensi ormas keagamaan yang sejatinya merupakan gerakan civil society.

Karena itulah, ormas keagamaan harus memperkuat posisi sosial-ekonomi agar dapat mandiri dan bebas dari kepentingan jangka pendek. Pada konteks inilah, Muhammadiyah harus menunjukkan kepeloporannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi tersebut harus diambil Muhammadiyah jika tidak ingin mengalami hambatan dalam menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar. Itu berarti Muhammadiyah harus membangun kembali kedai-kedai ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan umat.

Untuk mempercepat pertumbuhan kedai-kedai ekonomi Muhammadiyah diperlukan sebanyak mungkin kelompok saudagar. Aktivistik berlatar belakang saudagar dapat menumbuhkan spirit entrepreneur di kalangan warga Muhammadiyah. Pelibatan kelompok saudagar diharapkan dapat menghasilkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu membuat terobosan untuk menggerakkan perekonomian umat.

Yang harus selalu diingat, Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah adalah pelaku ekonomi kreatif sekaligus juru dakwah andal. Itu berarti sejarah Muhammadiyah sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kelompok saudagar. Kehadiran kelompok saudagar dapat memberikan energi yang besar bagi perkembangan Muhammadiyah di masa mendatang.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah tidak perlu galau dengan susunan kabinet Jokowi-JK. Berikan kesempatan para menteri untuk

bekerja dengan sepenuh hati. Jika kinerja pemerintah ini sesuai harapan rakyat, Muhammadiyah pasti mendukung sepenuhnya. Sebaliknya, jika tidak bekerja maksimal, Muhammadiyah bersama kekuatan civil society lain siap mengingatkan pemerintah.

Dari Purifikasi Agama ke Purifikasi Sosial

Hari ini, Selasa, 18 November 2014, Muhammadiyah genap berusia 102 tahun. Itu berarti usia Muhammadiyah telah melampaui satu abad. Dilihat dari usia, Muhammadiyah juga jauh lebih tua daripada negeri ini. Tentu banyak yang sudah dilakukan Muhammadiyah untuk membantu tugas pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Yang patut disyukuri, sejak didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, hingga kini Muhammadiyah tetap berkhidmat untuk berjuang melalui jalur kultural. Tidak sekali pun Muhammadiyah tergoda menjadi partai politik (parpol). Padahal, godaan untuk menjadi parpol selalu ada. Itu berarti habitat Muhammadiyah yang sesungguhnya adalah bidang sosial keagamaan.

Jika menyimak konteks kelahiran Muhammadiyah, tampak sekali pada awalnya organisasi ini didirikan untuk melakukan purifikasi bidang keagamaan. Tujuannya adalah memurnikan akidah dan ibadah umat dari praktik takhayul, bidah, dan churafat (TBC). Semangat yang digelorakan adalah mengembalikan praktik

keagamaan sesuai dengan ajaran Alquran dan sunah Nabi Muhammad SAW (*al-ruju' ila Alquran wa al-Sunnah*).

Setelah memasuki abad kedua, banyak pihak berharap jangkauan dakwah Muhammadiyah diperluas. Dakwah Muhammadiyah harus dikembangkan. Tidak sekadar melakukan purifikasi bidang keagamaan, tetapi juga purifikasi sosial. Dakwah memberantas TBC barangkali penting bagi aktivis Muhammadiyah. Tetapi, harus diingat, dakwah memberantas TBC membutuhkan pendekatan yang tepat.

Karena itu, mubalig Muhammadiyah harus mulai membiasakan penggunaan pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan penting untuk mengurangi resistansi di kalangan umat yang masih akrab dengan tradisi lokal. Melalui pendekatan kebudayaan, jangkauan dakwah Muhammadiyah pasti lebih luas. Pendekatan kebudayaan juga menjadikan dakwah Muhammadiyah dapat diterima kelompok abangan dan tradisional.

Hasil penelitian Mitsuo Nakamura (1976) dapat menjadi pelajaran bagi aktivis Muhammadiyah. Nakamura, misalnya, menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gejala perkotaan (*urban phenomenon*). Menurut Nakamura, dakwah Muhammadiyah sering kali hanya cocok untuk masyarakat kota, kelas menengah, dan kaum terdidik. Itu berarti aktivis Muhammadiyah harus selalu mengevaluasi metode dan kemasan materi dakwahnya.

Seakan menyadari pentingnya pendekatan kebudayaan, Muhammadiyah menggulirkan wacana dakwah kultural. Metode dakwah kultural menekankan pentingnya berdakwah melalui beragam budaya seperti pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Tetapi, sangat disayangkan, metode dakwah kultural ternyata belum mendapat respons positif. Orientasi dakwah sebagian besar mubalig Muhammadiyah masih bertema pemberantasan TBC. Padahal, persoalan yang dihadapi umat telah berkembang begitu pesat. Tantangan Muhammadiyah masa kini juga berbeda dengan saat didirikan dulu.

Aktivis Muhammadiyah juga harus membaca ulang hasil penelitian James L. Peacock (1986). Penelitian Peacock menyimpulkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan yang berorientasi untuk memurnikan ajaran Islam. Karena itu, Muhammadiyah memainkan peran yang penting sebagai gerakan purifikasi di bidang akidah dan ibadah. Kecenderungan dakwah untuk melakukan purifikasi agama juga disadari kalangan insider

Muhammadiyah seperti Muslim Abdurrahman (Kang Muslim).

Bahkan, Kang Muslim tidak segan melakukan otokritik. Dalam pandangan Kang Muslim, dakwah Muhammadiyah dianggap kurang berempati terhadap seni dan budaya lokal. Padahal, semestinya seni dan budaya lokal termasuk dalam wilayah muamalah duniawiah. Perspektif Muhammadiyah terhadap seni dan budaya juga sangat tegas, yakni *ibahah* (boleh) sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tetapi, selalu ada kecenderungan di kalangan aktivis Muhammadiyah untuk menafikan seni dan budaya lokal. Karena itulah, Kuntowijoyo (2001) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan tanpa kebudayaan. Kredo Muhammadiyah untuk kembali kepada Alquran dan sunah serta kehati-hatiannya dalam menyikapi budaya kadang-kadang terdengar seperti gerakan anti kebudayaan. Padahal, seharusnya Muhammadiyah menampilkan diri sebagai gerakan kebudayaan baru tanpa kebudayaan lama.

Terkait dengan harapan agar orientasi dakwah persyarikatan bergeser dari purifikasi ibadah ke purifikasi sosial, Muhammadiyah telah banyak melangkah. Materi dakwah Muhammadiyah tidak hanya berkaitan dengan persoalan akidah dan ibadah. Dakwah Muhammadiyah kini juga merambah berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Bahkan, di bidang politik Muhammadiyah telah mengembangkan dakwah melalui politik adiluhung (*high politic*). Muhammadiyah juga telah memelopori berbagai kegiatan dalam rangka jihad konstitusi. Hal itu ditunjukkan melalui kepeloporan Muhammadiyah saat mengajukan *judicial review* terhadap UU Migas, UU Rumah Sakit, dan UU Minerba. Dakwah di bidang politik dan jihad konstitusi merupakan wujud pengembangan purifikasi dalam kehidupan berbangsa.

Di bidang sosial Muhammadiyah juga terlibat dalam penanganan problem prostitusi. Hal itu ditunjukkan melalui kiprah pejuang kemanusiaan sekaligus aktivis Muhammadiyah di Kecamatan Krembangan, Surabaya. Mereka telah bersinergi dengan pemerintah kota untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi.

Tidak hanya dengan lisan, dakwah Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan kebudayaan. Misalnya, aktivis Muhammadiyah Krembangan secara sukarela urunan untuk membeli rumah-rumah bordil. Tujuannya adalah mempersempit ruang gerak

bisnis prostitusi.

Muhammadiyah Krembangan juga memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi PSK. Bahkan, hingga kini beberapa mantan PSK masih mendapat pendampingan agar tidak kembali ke dunia hitam. Teladan Muhammadiyah Krembangan harus menjadi inspirasi model dakwah dalam rangka purifikasi kehidupan sosial.

Akhirnya, semoga perayaan hari kelahiran (*milad*) ke-102 menjadi momentum untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah dari purifikasi agama ke purifikasi sosial. Itu berarti matahari Muhammadiyah harus menyinari seluruh bidang kehidupan. Jika itu dapat diwujudkan, kehadiran Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan umat.

Meneguhkan Ideologi Muhammadiyah

Pada 18 November 2014, Muhammadiyah merayakan hari kelahiran (*milad*) Ke-102. Yang patut disyukuri, sejak didirikan hingga memasuki abad kedua ini Muhammadiyah tetap konsisten berjuang di ranah kultural. Tidak sekalipun Muhammadiyah tergoda menjadi partai politik. Itu berarti habitat Muhammadiyah yang sesungguhnya adalah berkiprah di bidang sosial keagamaan. Tatkala merayakan *milad* ada baiknya aktivis Muhammadiyah membaca ulang testimoni Nurcholish Madjid (Cak Nur).

Menurut Cak Nur, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang terbesar di dunia, lebih besar dari organisasi mana pun di dunia Islam. Dilihat dari segi kelembagaannya, Muhammadiyah juga sangat mengesankan, lebih dari organisasi Islam di mana pun dan kapan pun. Muhammadiyah memiliki jaringan organisasi yang cukup teratur mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Karena itulah, Cak Nur menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu cerita sukses di kalangan organisasi Islam,

tidak saja secara nasional, tapi juga internasional. Pernyataan Cak Nur ini sebagian dari pandangan yang bernada memuji kiprah Muhammadiyah dalam panggung sejarah pergerakan organisasi Islam. Aktivis Muhammadiyah seharusnya menjadikan pernyataan positif Cak Nur sebagai penyemangat. Apalagi kini Muhammadiyah telah melampaui usia satu abad.

Selain menerima pujian, Muhammadiyah juga banyak dikritik. Di antara pernyataan bernada kritik dikemukakan Azyumardi Azra. Menurut Azra, Muhammadiyah memang layak disebut gerakan pembaru (*tajdid*), terutama di bidang amal usaha. Tetapi, dalam bidang pemikiran keagamaan, Muhammadiyah lebih tepat disebut gerakan salafiah. Itu karena tekanan ideologi gerakan Muhammadiyah adalah pemurnian (purifikasi) di bidang aqidah dan ibadah.

Cerminan dari usaha purifikasi Muhammadiyah tampak dalam kegiatan dakwah untuk memberantas takhayul, bidah, dan churafat (TBC). Pada level praksis, semua ahli sepakat mengatakan bahwa Muhammadiyah layak disebut gerakan pembaru. Melalui teologi *al-Ma'un* (*al-Ma'unisme*) Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekankan pentingnya amal saleh.

Dengan menekuni wilayah praksis sosial keagamaan berarti Muhammadiyah telah melaksanakan prinsip *a faith with action*. Dalam bahasa warga Muhammadiyah prinsip ini dikenal dengan dakwah *bil hal* (mengajak dengan amalan dan tindakan konkret). Muhammadiyah juga mempraktikkan ajaran sedikit berbicara banyak bekerja, berdisiplin, bekerja keras, dan tanggung jawab secara organisasi.

Khusus mengenai ajaran tanggung jawab pada organisasi ini barangkali dapat disebut sebagai yang orisinal dari Muhammadiyah. Saat Muhammadiyah didirikan Ahmad Dahlan, bentuk pertanggungjawaban umumnya dilakukan secara individual. Melalui pertanggungjawaban secara organisatoris itu Muhammadiyah akhirnya mendapat kepercayaan dari umat.

Hasilnya, Muhammadiyah mampu melahirkan banyak amal usaha, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lain. Tetapi, justru dengan amal usaha yang semakin banyak Muhammadiyah dihadapkan pada berbagai persoalan. Misalnya, energi Muhammadiyah nyaris habis hanya untuk kegiatan rutin mengurus amal usaha.

Dengan meminjam istilah beberapa intelektual muda, Muhammadiyah tampak seperti "gajah gemuk" yang semakin lamban dalam memberikan respons terhadap tantangan zaman. Akibat itu, kontribusi pemikiran Muhammadiyah di bidang sosial keagamaan terasa sangat kurang. Pada konteks inilah Muhammadiyah perlu melakukan revitalisasi ideologi agar mampu menampilkan diri sebagai gerakan amal sekaligus gerakan ilmu.

Buya Syafii Maarif merupakan salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan agar Muhammadiyah mampu menyanggah gerakan praksisme dan gerakan intelektualisme. Dengan menampilkan diri sebagai gerakan intelektual, di samping gerakan praksis, Muhammadiyah memasuki abad kedua secara cemerlang.

Itu karena intelektualisme dapat menjadi sumber energi yang luar biasa bagi Muhammadiyah, terutama dalam rangka memberikan pencerahan pada kehidupan keberagamaan di Nusantara. Diakui atau tidak wajah Islam Indonesia akhirakhir ini telah diwarnai persaingan yang sangat tajam kelompok Islam fundamentalis dan liberalis.

Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa. Misalnya, simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian berjubah, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Meski beberapa identitas keislaman ini memiliki rujukan dalam ajaran Islam, menyederhanakan Islam dengan ihwal yang bersifat kategoris seperti itu jelas melenceng dari substansi ajaran Islam.

Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga menimbulkan banyak kontroversi. Misalnya, kelompok Islam liberal dikatakan telah mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat Islam. Penerjemahan kalimat *thayyibah; la ilaha illallah* dengan tiada tuhan selain Tuhan, merupakan salah satu contoh kreasi para pembaru muslim yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan.

Menghadapi perdebatan dan persaingan dua mazhab pemikiran Islam yang senantiasa memutlakkan kebenaran kelompoknya, Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai mediator. Dalam hal ini Muhammadiyah dapat menjalankan fungsi *management of ideas* di antara berbagai mazhab pemikiran.

Yang perlu dilakukan Muhammadiyah pada berbagai mazhab

pemikiran (*school of thought*) adalah mengajak mereka untuk bergerak ke posisi tengah (*al-wasath*). Ajakan untuk bersikap moderat ini akan efektif jika ditempuh melalui dialog yang tulus dan tidak saling mengklaim kebenaran.

Jika dialog ini dilakukan secara berkelanjutan, pada saatnya kita akan menyaksikan wajah Islam Indonesia yang moderat dan toleran terhadap berbagai keragaman. Karena itulah, posisi tengah (*median position*) ini penting sebagai tempat berpijak berbagai mazhab pemikiran.

Jika Muhammadiyah berhasil menjadi mediator yang baik bagi berbagai mazhab pemikiran keagamaan, ini akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan Islam Indonesia. Untuk kepentingan ini, jelas dibutuhkan seperangkat ilmu. Karena itulah, Muhammadiyah harus meneguhkan ideologinya agar mampu menjadi gerakan praksis sekaligus gerakan intelektual.

Akhirnya diucapkan selamat *milad* bagi warga Muhammadiyah. Semoga dengan usia lebih dari satu abad, matahari Muhammadiyah bersinar semakin terang. Dengan demikian, Muhammadiyah mampu menjadi gerakan pencerahan (*al-harakah al-tanwiriyyah*) bagi umat, bangsa, dan negara.

BAB IV

Meniscayakan Pendidikan Holistik

PR Pendidikan Nasional

Anggaran pendidikan nasional ditaksir Rp. 371,2 triliun dari total Arancangan APBN 2014 yang mencapai Rp. 1.816,7 triliun. Itu berarti pada 2014 anggaran pendidikan mengalami kenaikan 7,5 persen dari APBN 2013 yang “hanya” Rp. 345,3 triliun. Dari anggaran tersebut, 65 persen (Rp. 241,2 triliun) di antaranya dialokasikan untuk gaji guru dan dosen.

Dilihat dari jumlah, angka itu tergolong fantastis jika dibandingkan alokasi untuk departemen lain. Tetapi, dalam implementasinya alokasi anggaran pendidikan ternyata sangat beragam. Semua bergantung pada pendapatan daerah dan komitmen kepala daerah. Ada daerah tertentu yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen. Sebaliknya, ada daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan jauh di bawah 20 persen.

Padahal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanahkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Persoalan lain yang krusial berkaitan dengan penganggaran bidang pendidikan adalah ketimpangan dalam

mengalokasikan anggaran antara satuan pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Akibat itu, selalu ada kesenjangan mutu antara pendidikan di bawah Kemendikbud dan Kemenag. Di samping itu juga terjadi ketimpangan anggaran yang diberikan pada sekolah yang dikelola pemerintah (negeri) dan yayasan atau organisasi kemasyarakatan (swasta). Faktor ketimpangan anggaran itulah yang mengakibatkan mutu pendidikan belum merata. Akibat itu, kesenjangan mutu pendidikan antar daerah kian melebar. Begitu juga dengan kesenjangan mutu pendidikan umum dan agama serta negeri dan swasta.

Rasanya sudah waktunya pemerintah mengakhiri politik penganggaran bidang pendidikan. Kemendikbud, Kemenag, pemerintah, dan swasta memiliki tugas yang sama-sama mulia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, Kemendikbud dan Kemenag serta pemerintah dan swasta harus sering “bertegur sapa” agar pendidikan nasional semakin bermutu. Besarnya anggaran untuk gaji guru dan dosen semestinya berbanding lurus dengan mutu pendidikan.

Karena faktanya belum terjadi, pemerintah harus membuat regulasi untuk memaksa guru dan dosen agar meningkatkan kinerja. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru dan dosen memiliki posisi yang sangat menentukan. Harus disadari bahwa jantung pendidikan itu ada di kelas. Guru dan dosen merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap situasi di kelas. Karena itulah, kita sangat berharap pada perbaikan kinerja guru dan dosen agar mutu pendidikan membaik.

Tetapi, gaji dan tunjangan yang menghabiskan anggaran negara begitu besar ternyata belum dimanfaatkan guru dan dosen untuk meningkatkan kompetensinya. Mendikbud Mohammad Nuh pun mensinyalir bahwa sebagian besar gaji dan tunjangan para pahlawan tanpa tanda jasa itu banyak dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif. Salah satu indikatornya dapat diamati dari belanja guru dan dosen tatkala menerima tunjangan sertifikasi.

Jadi, jangan heran jika tunjangan sertifikasi dirupakan perabotan rumah tangga, pagar rumah, kendaraan, dan barang-barang konsumtif lain. Tunjangan profesi yang diterima guru dan dosen pada setiap bulan jarang yang dimanfaatkan untuk kepentingan

membeli referensi mutakhir, laptop untuk menunjang pembelajaran, serta mengikuti pelatihan, dan forum-forum ilmiah guna meningkatkan kapasitasnya sebagai pendidik. Akibat itu, tambahan kesejahteraan berupa tunjangan profesi belum berdampak positif pada perbaikan mutu pendidikan nasional. Ini jelas menjadi ironi dari kebijakan pemerintah terkait tunjangan profesi pendidik.

Untuk melihat posisi pendidikan nasional, tengoklah hasil survei *Education for All (EFA) Global Monitoring Report* yang dipublikasikan UNESCO pada 1 Maret 2011. Survei itu menempatkan indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-69 dari 127 negara. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos. Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Sistem pendidikan yang dianggap terbaik di Asia ditempati Jepang. Sementara negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Finlandia. Hasil survei *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada 2012 juga mengonfirmasi rendahnya posisi pendidikan nasional. PISA menguji kemampuan siswa di tiga bidang yaitu matematika, membaca, dan sains. Survei PISA diikuti lebih dari 510.000 siswa usia 15 tahun di 65 negara.

Hasilnya, di bidang matematika, Indonesia menduduki peringkat ke-64 atau hanya lebih tinggi satu tingkat dari Peru. Di bidang membaca, Indonesia berada di peringkat ke-60 atau setingkat di bawah Malaysia. Sedangkan untuk bidang sains, Indonesia berada di urutan ke-64. Hasil survei ini semakin menegaskan posisi daya saing pendidikan nasional di level dunia.

Di samping persoalan mutu pendidikan yang masih tertinggal dari negara lain, pendidikan nasional juga dikritik karena belum mampu melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter. Sebaliknya justru banyak kasus ketidakjujuran saat ujian nasional (Unas), tawuran antarpelajar, *human trafficking*, narkoba, seks bebas, dan korupsi, yang melibatkan insan terpelajar.

Pendidikan juga direduksi sekadar sebagai tempat produksi ijazah (*diploma mills*). Padahal pendidikan seharusnya berorientasi untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Karena itulah, semua komponen bangsa harus bersinergi untuk menyiapkan generasi emas melalui pendidikan. Pendidikan harus terus dijadikan wacana setiap anak bangsa.

Profesi guru juga harus diperkuat agar semakin menjadi pilihan.

Cara inilah yang digunakan negara-negara maju untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Kita harus menyadari bahwa pelajar hari ini adalah pemimpin masa depan. Untuk itu, pemerintah harus membuat *roadmap* yang berdimensi jangka panjang menuju pendidikan bermutu.

Program jangka panjang pendidikan nasional harus dirumuskan dengan kajian yang mendalam dan berkelanjutan. Pelaksanaan Unas 2013 yang amburadul karena faktor mismanajemen harus menjadi pelajaran. Demikian juga kebijakan Kurikulum 2013 yang hingga tahap implementasinya masih menyimpan banyak masalah.

Semua itu harus menjadi introspeksi pemerintah demi masa depan pendidikan nasional. Bukankah alokasi anggaran pendidikan sudah demikian besar? Asal tidak bermain-main dengan politik dan kekuasaan, pendidikan nasional pasti kian berdaya saing.

Kurikulum Baru dan Guru Inspiratif

Tatkala memberikan tausiah dalam acara *Rembuk Nasional Pendidikan* yang diselenggarakan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim di Dome UMM (16/2), Profesor Din Syamsuddin menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak Kurikulum 2013. Muhammadiyah akan melaksanakan kurikulum baru dengan tetap menjaga kekhasan pendidikan di lingkungan persyarikatan.

Menurut beliau, saat ini yang jauh lebih penting adalah menyiapkan mutu guru sehingga dapat melaksanakan kurikulum dengan baik tanpa melupakan jati diri pendidikan Muhammadiyah. Itu berarti pendidikan Muhammadiyah tidak boleh memosisikan kurikulum baru sebagai sesuatu yang final, melainkan harus dilihat sebagai standar minimal yang terbuka untuk dikembangkan. Pada konteks inilah penting dipikirkan kekhasan pendidikan Muhammadiyah dibanding yang lain.

Pemerintah pun menetapkan disain implementasi kurikulum baru secara bertahap. Menurut rencana kurikulum baru mulai

diimplementasikan pada tahun ajaran 2013/2014. Sasaran kurikulum baru adalah siswa kelas I dan IV (SD), kelas VII (SMP), dan kelas X (SMA). Itu berarti guru pada kelas-kelas tersebut harus siap menjalankan kurikulum baru. Dalam perkembangannya, Kemendikbud kemudian mewajibkan semua jenjang pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum baru pada tahun ajaran 2014/2015.

Keputusan Kemendikbud itu menuai kontroversi karena menurut disain awal, implementasi kurikulum baru dilaksanakan secara bertahap hingga 2016. Tetapi dengan berseloroh Mendikbud Mohammad Nuh, menyamakan kelompok yang mengkritik, apalagi menolak kurikulum baru, laksana orang-orang yang enggan diajak naik kapal Nabi Nuh. Akibatnya mereka akan ditenggelamkan (QS. Hud: 42-43). Pernyataan Mendikbud semakin menguatkan keinginan untuk mengganti kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Tidak ada pilihan lain, Muhammadiyah harus melaksanakan kurikulum baru ini. Yang penting dipahami, karena ujung tombak kurikulum adalah guru maka para pejuang tanpa tanda jasa ini harus berkreasi agar dapat melampaui target minimal yang dibebankan kurikulum. Pada konteks inilah, penulis teringat istilah yang dipopulerkan Rhenald Kasali, Gurubesar Fakultas Ekonomi UI, mengenai guru kurikulum dan guru inspiratif.

Guru kurikulum digambarkan sebagai guru yang mengajarkan sesuatu yang standar dan biasa-biasa saja pada murid (*habitual thinking*). Sedang guru inspiratif adalah mereka yang selalu mengajak murid untuk berpikir kreatif dan inovatif dengan cara memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan Allah (*maximum thinking*). Menghadapi kurikulum baru Muhammadiyah jelas membutuhkan kehadiran sebanyak mungkin guru inspiratif.

Tetapi sangat disayangkan, sumber daya yang tersedia di sekolah mayoritas adalah guru kurikulum. Itu dapat diamati dari metode pembelajaran yang dikembangkan. Guru kurikulum biasanya terpaku dengan silabus, rencana praktik pembelajaran (RPP), dan buku teks. Hampir tidak ada ikhtiar dari mereka untuk melihat keluar dan membayangkan jika pembelajaran tidak menggunakan buku teks.

Dalam alam pemikiran guru kurikulum, kewajiban mereka sebatas mematuhi kurikulum. Mereka merasa berdosa jika tidak menuntaskan materi yang ada dalam kurikulum. Standar

keberhasilan pembelajaran guru kurikulum selalu diukur berdasarkan ketuntasan mereka menyampaikan materi pelajaran. Hasil akhirnya, murid sukses mengikuti ujian.

Sementara guru inspiratif tidak terlalu kaku dalam memahami kurikulum. Bagi mereka, kurikulum bukan kitab suci sehingga tidak harus selalu diikuti. Kurikulum harus dipahami sebagai sarana mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Karena itu model pembelajaran yang dikembangkan lebih kreatif. Buku teks bagi guru inspiratif juga bukan segalanya.

Buku teks hanya dijadikan salah satu sumber belajar. Masih banyak media yang dapat dijadikan sumber belajar. Dengan keyakinan yang kuat maka menjadi pantangan bagi guru inspiratif untuk menanggapi keadaan jika di sekolahnya tidak tersedia buku teks dan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Bagi guru inspiratif, alam sekitar merupakan laboratorium yang sangat bermanfaat untuk menunjang pembelajaran.

Seorang guru akan menginspirasi murid jika mampu keluar dari pakem pembelajaran yang dibebankan kurikulum. Itu berarti untuk menjadi guru inspiratif harus dimulai dengan melakukan perubahan metodologi pembelajaran. Menurut teori pendidikan, pembelajaran yang baik adalah yang menarik hati anak (*pull*).

Karena itu tepat jika dikatakan bahwa proses pendidikan adalah memberikan sebagian hati pada anak. Sebaliknya, pendidikan dianggap kurang berhasil jika melahirkan tekanan (*push*) pada anak. Akibatnya, anak tidak memiliki keberanian untuk mengembangkan daya imajinasinya. Padahal tugas utama guru adalah membantu anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Guru yang terlalu mengekang pasti akan mengakibatkan perasaan rendah diri pada anak. Itu sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perasaan rendah diri yang dialami orang dewasa selalu berkaitan dengan pola pembelajaran yang dialami orang itu tatkala belajar pada masa kecil. Bahkan pengaruhnya bisa mencapai 90 persen.

Hal itu menunjukkan betapa pembelajaran yang dikembangkan guru turut berpengaruh untuk membentuk karakter anak. Karena itulah keberadaan guru inspiratif sangat dibutuhkan, bukan saja untuk melaksanakan kurikulum baru, melainkan juga untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan.

Mengawal *Start* Kurikulum Kapal Nuh

Mendikbud Mohammad Nuh telah menetapkan sekolah sasaran Kurikulum 2013. Secara keseluruhan jumlah sekolah sasaran kurikulum baru untuk tahun 2013 mencapai 6.325 sekolah yang tersebar di seluruh provinsi dan 295 kabupaten/kota. Jika melihat jumlah sekolah sasaran yang berkisar hanya 5 persen dari seluruh sekolah di tanah air, maka sejatinya program ini lebih layak disebut uji coba atau *pilot project* kurikulum baru. Tetapi karena ingin menjaga kehormatan (*marwah*) pejabat publik, program ini pun tetap dinamakan implementasi kurikulum baru.

Sangat disayangkan, persiapan implementasi kurikulum baru jauh dari harapan. Sebagai contoh, training kepala sekolah dan guru bagi sekolah sasaran baru diadakan pada 8-13 Juli 2013. Sementara itu, tahun ajaran baru 2013/2014 sudah harus dimulai pada 15 Juli. Karena itulah dapat dibayangkan betapa repotnya persiapan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Padahal kepala sekolah dan guru sekolah sasaran belum memiliki

pemahaman yang utuh mengenai filosofi dan konten kurikulum baru.

Pertanyaannya, bagaimana mereka harus menjalankan kurikulum yang faktanya belum dipahami dengan baik? Seharusnya persiapan untuk melaksanakan kurikulum baru direncanakan secara matang dan berkelanjutan. Jadi, tidak boleh dikerjakan asal-asalan dan tergesa-gesa. Apalagi ini berkaitan dengan nasib pendidikan nasional di masa mendatang. Akibat pelaksanaan yang tergesa-gesa itulah kemudian muncul begitu banyak spekulasi.

Sebagian spekulasi mengaitkan program kurikulum baru dengan kebutuhan dana dari partai politik tertentu untuk menghadapi pemilu 2014. Ada juga spekulasi yang melihat pelaksanaan kurikulum baru semata-mata sebagai “proyek”. Dalam perspektif ini, semua program dilihat sebagai pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Diakui atau tidak, sebagian birokrat masih berpola pikir demikian.

Beberapa spekulasi tersebut memang tidak dapat dihindari. Sebab, kita memang sedang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mudah percaya pada orang lain (*low trust*). Akibatnya, program sebaik apa pun akan tetap dicurigai. Apalagi jika program itu tidak dirancang secara partisipatif dan transparan. Ditambah lagi dengan pelaksanaannya yang tergesa-gesa.

Program kurikulum baru sejauh ini juga masih menyisakan banyak pekerjaan. Sebagai contoh, banyak sekolah sasaran yang terlambat menerima “buku babon” dan “buku siswa” yang dijanjikan Kemendikbud untuk setiap mata pelajaran. Ketersediaan *master teacher* yang beranggotakan guru-guru inti dan terlatih sebagai ujung tombak implementasi kurikulum baru juga masih berjalan lambat.

Beberapa persoalan tersebut jelas dapat mengganggu persiapan dinas pendidikan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan sekolah sasaran. Dengan persiapan yang amburadul seperti itu rasanya tidak berlebihan jika sebagian pemerhati pendidikan menanyakan keseriusan pemerintah. Tetapi, Mendikbud selalu mengatakan bahwa pelaksanaan kurikulum baru tidak boleh ditunda. Apalagi skema implementasi kurikulum baru sudah terlanjur diumumkan. Dalam skema itu ditetapkan bahwa untuk tahap awal sasaran kurikulum baru adalah siswa kelas I dan IV (SD), kelas VII (SMP), dan kelas X (SMA/SMK).

Mendikbud menanggapi sejumlah kritik tentang implementasi kurikulum baru dengan santai. Bahkan dengan berseloroh

Mendikbud menyamakan kelompok yang selalu mengkritik dan menolak kurikulum baru laksana orang-orang yang enggan diajak naik kapal Nabi Nuh. Akibatnya, mereka pun ditenggelamkan Tuhan (QS. Hud: 42-43). Ilustrasi Mendikbud yang kebetulan punya nama “Nuh” itu sekaligus menjadi ancaman bagi penolak kurikulum baru.

Mendikbud pun tidak memberikan pilihan lain. Kurikulum baru harus dilaksanakan untuk menggantikan Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sekolah yang telah ditetapkan sebagai sasaran implementasi kurikulum harus menjalankan keputusan Mendikbud. Mendikbud sepertinya ingin mengatakan; “pemerintah *kok* dilawan”. Ibarat anjing menggonggong, kafilah pun tetap berlalu.

Persoalan krusial yang layak disorot dalam implementasi kurikulum baru adalah kesiapan guru. Hal itu penting karena ujung tombak pendidikan sejatinya guru. Pahlawan tanpa tanda jasa itulah yang akan menentukan kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan kurikulum baru. Sementara Mendikbud pasca pemilu 2014 harus berganti. Karena itu, beban yang ditanggung para guru sejatinya sangat berat. Mereka harus siap untuk disalahkan jika implementasi kurikulum baru tidak maksimal.

Indikasi bakal tidak maksimalnya implementasi kurikulum baru sesungguhnya dapat diprediksi. Misalnya, banyak guru SD yang menanyakan konten sekaligus contoh model pendidikan “tematik integratif”. Guru SMP dan SMA pengajar TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), yang kebetulan mata pelajarannya tereliminasi dalam kurikulum baru juga menanyakan nasibnya.

Apalagi mereka telah tersertifikasi sebagai guru mata pelajaran TIK. Pertanyaannya, bagaimana nasib sertifikasi mereka? Bukankan guru yang telah tersertifikasi berkewajiban untuk mengajar minimal 24 jam? Itulah sebagian pertanyaan yang menunjukkan kegamangan guru untuk mengimplementasikan kurikulum baru.

Jika melihat dokumen, sejatinya kurikulum baru itu sangat baik. Tetapi, idealnya kurikulum tidak hanya baik dalam tataran konsep. Yang juga penting dipikirkan adalah implementasinya. Karena itulah banyak pihak mengusulkan agar pelaksanaan kurikulum baru ditunda. Pemerintah harus memperbaiki sumber daya guru terlebih dulu.

Sebab, sebagus apa pun kurikulum itu dikonsepsi, pelaksananya

tetap guru. Sementara, realitas menunjukkan bahwa masih banyak guru yang mutunya rendah (*under qualified*). Rendahnya mutu guru itu dapat diamati dari hasil uji kompetensi guru (UKG). Dalam beberapa kali UKG tampak sekali bahwa pendidikan kita masih memiliki persoalan dengan mutu guru.

Yang aneh justru hasil ujian nasional (Unas). Hasil Unas selalu menunjukkan capaian yang membanggakan. Bahkan banyak sekolah yang berhasil meluluskan 100 persen siswanya. Padahal jika berkaca pada hasil UKG, semestinya tingkat kelulusan siswa tidak begitu tinggi. Karena ujung tombak pelaksanaan kurikulum masih banyak yang bermasalah maka mari kita kawal implementasinya.

Mengevaluasi Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum baru telah berlangsung satu semester (Juli-Desember 2013). Setidaknya ada 6.326 sekolah yang menjadi sasaran implementasi kurikulum baru. Termasuk 24 sekolah Muhammadiyah Jatim. Selain sekolah sasaran, ternyata banyak sekolah yang ingin melaksanakan kurikulum baru meski dengan biaya mandiri. Tetapi karena implementasi kurikulum ini cenderung dipaksakan pusat dan tidak banyak melibatkan daerah maka problem di lapangan menjadi tak terhindarkan.

Umumnya problem implementasi kurikulum baru berkaitan dengan pendanaan. Misalnya, pendanaan untuk pelatihan kepala sekolah dan guru serta pengadaan buku bagi guru dan siswa. Problem tak kalah pelik dialami guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum. Hal itu dapat dipahami karena sebegus apa pun kurikulum dikonsepsi oleh para ahli, tetap saja bergantung pada kesiapan guru.

Ada fakta menarik dari hasil sensus terhadap implementasi

kurikulum baru. Sensus dilaksanakan kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) tiga bulan setelah implementasi kurikulum. Hasil sensus menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memahami konsep pembelajaran tematik. Akibatnya guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.

Hasil sensus juga menginformasikan pandangan guru terhadap kurikulum baru. Menurut para guru, secara konsep kurikulum baru sangat bagus karena memberikan kebebasan untuk berkreasi. Persoalannya, guru mengalami kesulitan dalam memraktekkan. Kebingungan guru semakin menjadi karena tidak semua buku tersedia. Guru juga dibingungkan dengan model penilaian.

Sejatinya Kurikulum 2013 tidak banyak berbeda dengan Kurikulum 2006, yang lebih populer disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Proses pembelajarannya pun partisipatif dengan melibatkan siswa. Perbedaan utamanya ada pada materi ajar, baik untuk guru maupun siswa, yang dikemas dalam bentuk tematik. Kurikulum baru juga menekankan pentingnya kegiatan berpikir bagi siswa, mulai observasi, menanya, eksperimentasi, hingga menemukan solusi. Pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar secara otentik (*authentic learning*).

Seharusnya guru tidak perlu galau dengan kurikulum baru. Jika tidak percaya, cobalah tanyakan pada guru yang kini masih aktif mengajar. Mereka pasti merasakan pergantian kurikulum hingga beberapa kali. Mereka pernah memraktekkan Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), dan Kurikulum 2013. Pertanyaannya, apa yang berubah dalam pembelajaran mereka seiring dengan perubahan kurikulum? Jawabannya, hampir pasti tidak ada yang berubah. Karena itu guru harus tetap tenang mendidik siswa apa pun kurikulumnya.

Jika mencermati kegalauan guru maka terasa sekali bahwa dunia pendidikan kita membutuhkan guru yang andal. Meminjam istilah Rhenald Kasali, Gurubesar Fakultas Ekonomi UI, pendidikan kita membutuhkan guru-guru inspiratif. Mereka sering diilustrasikan sebagai pendidik yang selalu mengajak siswa untuk berpikir kreatif dengan memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan Tuhan (*maximum thinking*). Antitesa guru inspiratif adalah guru kurikulum, yakni mereka yang mengajarkan sesuatu yang standar dan biasa-biasa saja (*habitual thinking*).

Guru inspiratif pasti selalu berpikir positif jika terjadi perubahan kurikulum. Buku teks bagi guru inspiratif juga bukan segalanya. Buku teks hanya salah satu sumber belajar. Masih banyak media yang dapat dijadikan sumber belajar. Dengan perspektif itu maka menjadi tantangan bagi guru inspiratif untuk menanggapi keadaan jika di sekolahnya tidak tersedia buku teks. Begitu juga dengan persoalan keterbatasan perangkat informasi teknologi (IT). Dalam perspektif guru inspiratif, alam sekitar pun dapat dijadikan laboratorium untuk menunjang pembelajaran.

Kemendikbud sepertinya telah menutup mata dan telinga dari suara-suara kritis dan korektif terhadap implementasi kurikulum baru. Kemendikbud bahkan menetapkan bahwa pada 2014 semua kelas dan jenjang pendidikan harus sudah mengimplementasikan kurikulum baru. Kebijakan ini jelas berbeda dengan rencana semula, yang mencanangkan tahapan pelaksanaan kurikulum baru hingga 2015. Karena itu sulit menolak logika yang mengaitkan perubahan skema implementasi kurikulum baru dengan pemilu 2014. Pejabat Kemendikbud pasti merasa bahwa semuanya akan berubah setelah pemilu, termasuk menteri pendidikannya.

Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan Muhammadiyah untuk menghadapi kebijakan Kemendikbud yang terus berubah? Jika menilik usia Muhammadiyah yang jauh lebih tua dari negeri ini maka idealnya pendidikan kita memiliki kurikulum tersendiri. Kurikulum yang kira-kira tahan godaan, termasuk godaan politik dan kekuasaan.

Karena rancang bangun kurikulum pendidikan Muhammadiyah mutlak dibutuhkan maka gagasan itu harus terus digelorakan. Spiritnya, pendidikan Muhammadiyah harus menjadikan kurikulum pemerintah sebagai standar minimal. Itu berarti kurikulum pendidikan Muhammadiyah harus dirancang melampaui kurikulum pemerintah. Dengan sumber daya yang melimpah, Muhammadiyah pasti bisa.

Menyongsong Ujian Nasional

April dan Mei biasanya digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Ujian Nasional (Unas). Biasanya diawali Unas tingkat SMA/SMK/MA, kemudian disusul SMP/MTs. Sementara untuk SD/MI, meski sejak tahun 2014 pemerintah menghapus Unas dengan mengganti ujian sekolah, tapi “nuansanya” tetap sama.

Seiring semakin dekatnya pelaksanaan Unas, siswa kelas akhir jenjang pendidikan dasar dan menengah bersiap untuk menyongsong Unas. Karena itu, jangan heran jika pembelajaran di sekolah saat mendekati Unas lebih didominasi latihan (*try out*) soal-soal Unas. Di samping ikhtiar yang bersifat akademik, sekolah juga melaksanakan beragam kegiatan training spiritual untuk memberikan peneguhan berupa keyakinan pada siswa.

Bahkan ada sekolah yang secara rutin menyelenggarakan doa bersama (*istighasah*), shalat tahajud, dan ziarah wali. Semua itu dilakukan agar siswa siap lahir dan batin menghadapi Unas. Beban

lebih berat akan dirasakan guru kelas akhir setiap jenjang pendidikan karena guru kelas akhir diliputi kecemasan terhadap persiapan anak didiknya saat Unas tiba.

Itulah sebabnya banyak guru yang enggan mengajar kelas akhir, terutama untuk mata pelajaran yang di-Unas-kan. Padahal kesuksesan anak mengerjakan soal-soal Unas bukan hanya tanggung jawab guru kelas akhir, melainkan semua guru dan orang tua. Karena memegang posisi yang sangat menentukan, guru harus menerima kenyataan untuk disalahkan ketika hasil Unas kurang memuaskan. Pandangan yang menempatkan guru sebagai faktor utama kesuksesan Unas tentu sangat beralasan.

Tetapi, jangan lupa, dukungan orang tua pada anak juga sangat penting. Faktor dukungan orang tua ini sangat berarti untuk membesarkan hati (*encouragement*) anak agar menjalani Unas dengan tenang. Orang tua dapat mendorong anaknya meraih prestasi setinggi mungkin dengan tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran. Orang tua sesungguhnya dapat menjadi agen mengampanyekan kejujuran saat Unas.

Faktor yang juga turut menambah beban siswa saat pelaksanaan Unas adalah tekanan pejabat publik. Pejabat terkait seperti kepala dinas pendidikan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota biasanya ikut mematok target angka kelulusan. Pejabat publik yang tidak berhubungan secara langsung dengan pendidikan seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota bahkan turut menaruh perhatian dengan tingkat kelulusan siswa.

Kepala daerah jelas menyadari bahwa dalam konteks politik pencitraan, tingkat kelulusan dapat menjadi media untuk membangun citra kepemimpinannya. Seharusnya semua pihak mengajak siswa untuk menghadapi Unas dengan sewajarnya. Jika perlu, siswa harus digembirakan seraya diajak untuk bernyanyi, "Unas telah tiba; Unas telah tiba; hore, hore; hatiku gembira." Cara ini bagian dari ikhtiar untuk mengurangi beban psikologis siswa yang meningkat saat Unas.

Guru juga harus berkeyakinan bahwa sepanjang mereka telah melakukan proses belajar dan mengajar (PBM) dengan baik tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Umumnya guru yang menempatkan Unas sebagai beban adalah mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan PBM. Mereka pun tidak memiliki rasa percaya diri saat siswanya mengikuti Unas. Akibat itu, mereka akan mudah

tergoda untuk berperilaku tidak jujur.

Perilaku tidak jujur itu dilakukan karena guru seringkali tidak dapat menerima kenyataan siswanya memperoleh nilai jeblok. Pertimbangan lain berkaitan dengan citra sekolah jika hasil Unas tidak baik. Dalam alam pikiran guru dan kepala sekolah, citra sekolah salah satunya dilihat dari keberhasilannya dalam meluluskan siswa. Persentase kelulusan siswa dapat menjadi media untuk meyakinkan stakeholders-nya.

Karena pemerintah masih berkeyakinan untuk melaksanakan Unas, tidak ada pilihan lain, semua pihak harus diajak untuk menyongsong Unas dengan penuh optimisme. Semua pihak harus berkomitmen dengan berikrar; prestasi yes, jujur harus. Komitmen ini penting karena persoalan kejujuran saat Unas selalu menjadi perhatian. Karena masih sering terjadi ketakjujuran (*dishonesty*) itulah banyak pihak mempersoalkan kredibilitas Unas.

Padahal mulai tahun ini nilai Unas akan menjadi pertimbangan dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Untuk mengurangi angka ketakjujuran, pemerintah mempertahankan mekanisme penentuan kelulusan siswa yang dihitung berdasarkan pembobotan; Unas (60 persen) dan US (40 persen).

Itu berarti secara normatif Unas seharusnya dipahami bukan satu-satunya penentu kelulusan. Guru masih memiliki porsi yang cukup untuk menentukan kelulusan. Tetapi, semua orang tahu, perspektif sekolah terhadap Unas tetap yang terutama. Kebijakan yang juga layak diapresiasi adalah variasi soal Unas hingga 20 paket.

Itu berarti jika dalam satu kelas ada 20 siswa, mereka pasti akan mengerjakan soal yang berbeda. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi perilaku tak jujur saat Unas. Untuk mewujudkan Unas yang jujur dan kredibel jelas membutuhkan komitmen semua pihak. Semua pihak harus menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Capaian nilai anak dari hasil Unas jelas bukan tujuan pendidikan. Ujian harus dipahami sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui siswa untuk menapaki jenjang pendidikan selanjutnya. Karena itulah, siswa harus diyakinkan bahwa yang jauh lebih penting dalam Unas adalah berperilaku jujur. Sementara persoalan nilai tentu sangat bergantung pada kesiapan setiap siswa.

Berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan Unas yang jujur dan kredibel, kita telah diingatkan Indonesia Corruption

Watch (ICW). Dalam salah satu pernyataannya, ICW mengingatkan bahwa perilaku tidak jujur saat ujian itu sangat berkorelasi dengan budaya korupsi. Peringatan ini layak dikemukakan karena jika kita telisik latar belakang pelaku korupsi, ditemukan fakta bahwa mereka adalah produk lembaga pendidikan. Diantara mereka bahkan alumni perguruan tinggi. Agar generasi masa depan bangsa tidak terlibat korupsi, budaya jujur harus ditanamkan sejak dini.

Menyoal Kredibilitas Unas

Hasil Ujian Nasional (Unas) untuk SMA/MA/ SMK secara resmi telah diumumkan pada tanggal 20 Mei 2014. Tingkat kelulusan SMA/MA mencapai 99,52 persen, turun jika dibanding Unas 2013 sebesar 99,53 persen. Sedangkan tingkat kelulusan SMK adalah 99,90 persen, turun jika dibanding tahun lalu yang mencapai 99,94 persen. Data ini menunjukkan bahwa angka ketidaklulusan Unas meningkat.

Yang paling mencolok adalah ketidaklulusan SMK yang jika dianggakan mencapai 1.159 siswa. Padahal tahun lalu angka ketidaklulusan SMK hanya 601 siswa. Data Kemendikbud juga melaporkan bahwa rata-rata nilai Unas SMA tahun ini adalah 6,12. Nilai ini sedikit lebih rendah dari rata-rata hasil Unas tahun lalu yakni 6,32.

Rata-rata nilai Unas juga lebih rendah dari rata-rata nilai ujian sekolah yang mencapai 8,39. Data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sekolah memberikan nilai tinggi saat ujian sekolah. Karena itu, nilai Unas penting sebagai pembanding nilai ujian

sekolah. Melihat capaian hampir 1,7 juta anak SMA yang mengikuti Unas, jelas nilai mereka masih sangat rendah. Karena itu, harus ada intervensi dari *stakeholders* pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan SMA.

Variabel terpenting dari keinginan untuk meningkatkan mutu lulusan adalah guru. Peranan guru sangat penting karena menjadi ujung tombak pendidikan. Bukankah jantung pendidikan itu selalu ada di kelas? Dan, gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar di kelas.

Selain persoalan rata-rata nilai yang rendah, Unas tahun ini juga dinodai berbagai kasus ketidakjujuran. Yang lebih menyedihkan, kasus itu melibatkan kepala sekolah (kasek) dan guru. Pemerhati dan praktisi pendidikan pasti kaget tatkala membaca berita bahwa ada 70 kasek dan guru berkomplot untuk mencuri soal Unas. Kasus memalukan ini terjadi di Kabupaten Lamongan, Jatim. Kasus ini jelas menjadi potret buram pelaksanaan Unas 2014.

Tidak tertutup kemungkinan jika kasus ketidakjujuran dalam Unas SMA layaknya fenomena gunung es. Artinya, kasus ketidakjujuran yang melibatkan kasek dan guru sesungguhnya sangat banyak. Hanya, kasus-kasus itu luput dari perhatian publik karena belum terendus media. Apalagi dalam perkembangan penyelidikan aparat kepolisian, kasus pencurian soal oleh kepala sekolah dan guru itu ternyata berkaitan dengan jaringan joki gosok.

Melalui joki gosok dan jaringannya inilah praktik jual beli kunci jawaban Unas menyebar hingga di Surabaya. Setidaknya ada delapan SMA negeri di Surabaya yang terlibat jaringan joki gosok. Dampak dari berbagai kasus ketidakjujuran itu menyebabkan publik kurang percaya dengan hasil Unas. Kredibilitas hasil Unas pun terus dipersoalkan. Karena itu, sejumlah rektor menolak untuk menjadikan nilai Unas SMA sebagai salah satu komponen penilaian masuk perguruan tinggi negeri. Para rektor menilai hasil Unas tidak lagi mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.

Padaحال Mendikbud Mohammad Nuh berulang memerintahkan pada para rektor untuk menjadikan hasil Unas sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru. Persoalan ketidakjujuran yang selalu mewarnai pelaksanaan Unas secara tidak langsung juga diakui pemerintah. Itu dapat diamati dari kebijakan Kemendikbud yang mengubah soal Unas dari lima paket menjadi 20 paket. Di samping itu, pengamanan soal Unas juga dilakukan superketat. Tidak cukup

pengawas dari kalangan sipil, aparat kepolisian pun dilibatkan untuk menjaganya.

Pelibatan aparat kepolisian secara masif menunjukkan antisipasi Kemendikbud untuk menjaga Unas dari praktik tidak jujur. Rasanya tidak pernah ada pelaksanaan ujian di negara-negara lain yang dijaga begitu banyak aparat kepolisian sebagaimana yang terjadi di Tanah Air. Meski Unas telah dijaga aparat kepolisian, praktik tidak jujur tetap terjadi. Itu karena budaya tidak jujur telah menyebar hampir seluruh bidang kehidupan.

Untuk meniadakan praktik ketidakjujuran saat Unas, pasti dibutuhkan waktu karena itu terkait budaya. Meski begitu, Kemendikbud dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil ujian harus terus berusaha untuk membangun budaya jujur. Dalam kaitan ini pihak-pihak yang terlibat praktik ketidakjujuran harus ditindak tegas. Langkah inilah yang tampaknya belum dilakukan Kemendikbud. Justru aparat kepolisian yang kelihatan serius untuk menyelidiki kasus pencurian soal dan peredaran kunci jawaban Unas.

Kemendikbud seharusnya terlibat aktif menyelesaikan kasus ketidakjujuran Unas. Jika perlu, ada pemberian sanksi keras misalnya pemecatan kepada kasek dan guru komplotan pencuri soal Unas. Langkah ini penting agar menjadi pelajaran bagi kasek dan guru lain. Di samping pemberian sanksi yang bersifat personal, sanksi seharusnya juga diberikan pada sekolah. Apalagi jika dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa sekolah telah melakukan pembiaran terhadap praktik ketidakjujuran.

Dalam hal ini sanksi pada sekolah dapat berupa penurunan status akreditasi. Pengalaman negara-negara maju seperti Singapura layak dijadikan referensi. Negeri jiran Singapura telah menerapkan sanksi penurunan status akreditasi bagi sekolah yang tidak jujur saat Unas. Hukuman ini ternyata sangat efektif untuk meminimalkan praktik ketidakjujuran. Apalagi tindakan itu kemudian diikuti dengan ekspose ke media. Sekolah mana pun akan takut jika diumumkan ke media telah melakukan praktik ketidakjujuran saat Unas.

Jika langkah tersebut dicontoh Kemendikbud, rasanya akan memberikan efek jera pada kepala sekolah dan guru. Sementara sekolah yang diturunkan status akreditasinya karena kasus ketidakjujuran pasti akan ditinggalkan stakeholders-nya. Sekolah ini pada saatnya tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat

hingga kemudian gulung tikar. Persoalannya, kini berpulang pada keberanian Kemendikbud. Beranikah Kemendikbud memberikan sanksi pada pihak-pihak yang telah menodai UN dengan menyebarkan virus ketidakjujuran? Rasanya masyarakat akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kemendikbud jika berani bersikap tegas.

Kita harus berempati pada anak-anak yang sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan berperilaku jujur saat Unas. Mereka terpaksa harus menerima kenyataan hasil Unasnya dinilai tidak kredibel akibat kasus ketidakjujuran yang dilakukan oknum tertentu.

Ganti Unas Dengan Penilaian Otentik

Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) kini memiliki payung hukum untuk menghapus ujian nasional (Unas) SD seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013. Dengan berlandaskan pada PP tersebut, Kemendikbud tidak memiliki pilihan lain kecuali menjalankan perintah menghapus Unas SD. Sebagai penggantinya, evaluasi akhir untuk pembelajaran peserta didik SD harus dikembalikan ke sekolah. Itu berarti guru memiliki otoritas untuk menentukan hasil belajar anak.

Tugas Kemendikbud selanjutnya adalah merumuskan program yang berkelanjutan untuk menyiapkan guru agar mampu mengemban tugas evaluasi pembelajaran dengan baik. Hal ini penting dikemukakan karena kebijakan sebaik apa pun selalu mengundang perdebatan. Apalagi pemerintah sedang berhadapan dengan masyarakat yang mengidap penyakit krisis kepercayaan (*low trust*). Kelompok yang tetap menghendaki pelaksanaan Unas pasti akan

mempertanyakan kesiapan guru. Apalagi realitas menunjukkan bahwa masih banyak guru yang berkualifikasi rendah (*under qualified*). Fenomena itu setidaknya dapat diamati dari hasil uji kompetensi guru yang telah dijalankan pemerintah.

Di lain pihak, penentang Unas menanyakan; mengapa hanya Unas SD yang dihapus? Bagaimana dengan Unas SMP dan SMA? Jika Unas SMP dan SMA tetap dijalankan, itu berarti kebijakan pemerintah masih setengah hati. Padahal setelah melihat karut-marut pelaksanaan Unas 2013, rasanya inilah momentum yang tepat untuk mengganti Unas dengan sistem evaluasi yang lebih kredibel. Penghapusan Unas untuk semua jenjang pendidikan juga sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun.

Kemendikbud juga dikritik karena selalu mengaitkan Unas dengan peningkatan mutu pendidikan. Padahal jika melihat ranking pendidikan nasional di level dunia, posisi kita masih tercecer di bawah. Menurut data *Education for All (EFA) Global Monitoring Report* yang dikeluarkan Unesco pada 1 Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-69 dari 127 negara. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos. Indonesia pun kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei.

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara Unas dengan mutu pendidikan. Sebagai contoh, Singapura merupakan negara yang menerapkan Unas (*national examination*). Tetapi kita semua tahu sistem pendidikan Singapura termasuk salah satu yang terbaik di Asia. Dalam sistem pendidikan Singapura, Unas untuk SD diberi nama *Primary School Leaving Examination (PSLE)*. Sementara untuk SMP dan SMA adalah *Ordinary Level (O-Level)* dan *Advance Level (A-Level)*.

Yang membedakan, Unas di Singapura tidak dijadikan alat untuk menentukan kelulusan anak. Semua anak yang mengikuti Unas dinyatakan lulus. Hasil Unas di Singapura sepenuhnya digunakan untuk menentukan masa depan pendidikan anak. Bagi anak dengan kualifikasi hebat di bidang akademik, maka ia berpotensi untuk melanjutkan kuliah di universitas. Sebaliknya, anak yang kualifikasi akademiknya kurang, diberikan pilihan untuk mengambil program vokasional di politeknik. Sistem ini terkesan sederhana, tetapi visinya sangat jelas dan dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Singapura membangun budaya jujur? Ternyata kuncinya ada pada sanksi untuk mereka yang berperilaku tidak jujur saat Unas. Sekolah yang tidak menyelenggarakan Unas dengan jujur akan diturunkan status akreditasinya. Sanksi ini sangat berat karena dapat mempengaruhi citra sekolah di mata masyarakat. Masyarakat pasti tidak akan percaya pada sekolah dengan nilai akreditasi rendah. Akibatnya sekolah lambat laun akan mati karena kehilangan kepercayaan.

Mari kita bandingkan dengan sanksi yang diberikan Kemendikbud ketika melihat sekolah yang tidak jujur. Padahal kita tahu ketakjujuran (*dishonesty*) saat Unas ibarat fenomena gunung es; kelihatan sedikit tetapi sejatinya sangat massif. Maka jangan heran jika masyarakat semakin menyangsikan kredibilitas hasil Unas.

Rasanya kini sudah saatnya kita memberikan kepercayaan pada guru untuk menilai hasil belajar anak-anak. Bukankah guru di setiap sekolah juga sudah terlatih menilai dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan mengamati perilaku peserta didik. Dalam perspektif teori pendidikan, sistem evaluasi tersebut dinamakan penilaian otentik (*authentic assessment*).

Penilaian otentik meniscayakan guru menilai apa yang seharusnya dinilai, menilai dari banyak aspek, dan menilai dari berbagai sumber. Dari sudut pandang teori evaluasi, dapat dipastikan bahwa penilaian otentik jauh lebih kredibel dari hasil Unas. Karena itu pemerintah semestinya tidak membuat kebijakan setengah hati. Segera ganti Unas dengan penilaian otentik untuk pendidikan yang lebih bermartabat.

Urgensi Pendidikan Holistik

Setiap tanggal, 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tetapi sangat disayangkan, Hardiknas tahun 2013 harus dirayakan di tengah suasana karut-marut pelaksanaan Ujian Nasional (Unas). Unas yang semestinya dilaksanakan secara serentak harus ditunda untuk beberapa provinsi akibat mismanajemen. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Unas tahun 2013 yang terburuk. Pelaksanaan Unas juga masih diwarnai banyak ketidakjujuran (dishonesty) meskipun Kemendikbud telah menetapkan 20 paket soal.

Di samping persoalan Unas, pendidikan nasional juga diwarnai kontroversi pelaksanaan kurikulum 2013. Meski Kemendikbud telah memastikan pelaksanaan kurikulum dimulai secara bertahap pada tahun ajaran 2013/2014, penolakan terhadap kurikulum baru masih nyaring terdengar. Itu karena kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006 atau yang biasa disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) kelihatan tidak dipersiapkan secara matang.

Penelitian tentang kebutuhan kurikulum baru juga belum dilaksanakan secara serius. Apalagi sekolah sasaran dan guru pelaksana ternyata belum memahami secara seksama konten dan aplikasi kurikulum baru. Dari sinilah kesan bahwa kurikulum baru ini cenderung dipaksakan sulit dihindari. Berkaitan dengan beberapa persoalan tersebut rasanya semua komponen bangsa harus kembali menelaah amanah konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut UU Sisdiknas, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pengertian tersebut memberikan gambaran betapa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi anak.

Itu berarti tugas guru adalah memfasilitasi anak agar mengenali potensi dirinya. Harus diakui bahwa tugas mendampingi anak agar mengenali potensi diri sering dilupakan guru. Orang tua bahkan terkadang kurang memperhatikan potensi anaknya. Padahal guru dan orang tua seharusnya bersinergi untuk mengembangkan potensi anak agar meraih kesuksesan dalam kehidupan pada masa mendatang.

Guru dan orang tua harus meyakini bahwa setiap anak memiliki potensi istimewa yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu, tidak boleh ada kategori anak "bodoh" atau "nakal". Setiap anak memiliki kecerdasan yang sangat unik dan bervariasi. Pada konteks inilah orang tua, guru, dan peserta didik harus berkomunikasi secara timbal balik agar dapat menemukan potensi yang akan dikembangkan.

Yang penting diingat bahwa dalam dunia pendidikan potensi itu tidak harus bersifat akademik, tapi juga nonakademik. Menurut taksonomi Bloom (1968), pendidikan harus berorientasi pada tiga ranah yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara jujur harus diakui bahwa budaya masyarakat masih menempatkan capaian akademik di atas prestasi nonakademik.

Pemerintah juga turut menyuburkan pola pikir tersebut sebagaimana yang tampak dalam kebijakan Unas. Untuk kepentingan menyukseskan Unas, perhatian pemerintah luar biasa. Untuk membuat pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil Unas

berperilaku jujur saja, pemerintah harus mengerahkan sumber daya sipil dan militer. Karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pelaksanaan Unas.

Dalam perspektif pendidikan, Unas jelas merepresentasikan keinginan mengukur capaian akademik dan mengabaikan prestasi nonakademik. Kebijakan ini terasa kurang bersahabat pada anak yang memiliki bakat luar biasa di bidang nonakademik. Rasanya sudah saatnya kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan penghargaan yang lebih proporsional terhadap prestasi nonakademik.

Kita harus menyadari bahwa capaian akademik dan nonakademik itu sama-sama dibutuhkan untuk sukses hidup. Itu berarti profesi sebagai ilmuwan sama terhormatnya dengan atlet, pekerja seni, dan entrepreneur. Karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa Habibie (ilmuwan), Rudi Hartono (atlet), Emha Ainun Najib (budayawan), dan Ciputra (pengusaha dan pengembang virus entrepreneur) merupakan representasi orang-orang yang hebat di bidangnya.

Tidak bisa dikatakan bahwa salah satu lebih baik dari yang lain. Yang dibutuhkan justru saling bersinergi untuk membangun bangsa sehingga menjadi unggul dan bermartabat. Persoalan politik yang mengakibatkan sistem pendidikan terbelah menjadi dua atap; Kemendikbud dan Kemenag, juga harus dicarikan solusi. Penerapan sistem pendidikan dua atap selain mengakibatkan ketimpangan mutu, juga menjadikan perbedaan ilmu umum dan ilmu agama kian langgeng.

Polarisasi ini pasti menyebabkan pola pikir yang parsial (separated). Akibatnya tidak ada budaya untuk saling bertegur sapa antardisiplin ilmu. Jika kebijakan ini terus dipertahankan, keinginan untuk mengembangkan kajian yang bersifat holistik dan interkoneksi (holistic and interconnected studies) pasti tidak terwujud.

Sudah seharusnya pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag saling bertegur sapa untuk merumuskan formula agar sistem pendidikan nasional tidak terpolarisasi menjadi dua atap. Pemerintah harus didorong untuk mewujudkan pendidikan holistik (holistic education). Pendidikan holistik dalam hal ini dapat dipahami sebagai pendidikan yang menggabungkan semua potensi manusia; intelektual, emosional, spiritual, sosial, kultural, dan fisikal.

Mengutip pendapat tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, pendidikan dikatakan sebagai daya upaya untuk

mengembangkan budi pekerti (kekuatan batin, hati), pikiran (otak, intellect), dan tubuh anak (raga). Bagian-bagian ini, menurut Ki Hajar, tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak. Pikiran Ki Hajar ini sangat relevan dengan tantangan dunia pendidikan.

Apalagi pendidikan nasional kini sedang dihadapkan pada persoalan serius berupa tawuran antar pelajar, human trafficking, ketidakjujuran saat ujian, dan kurang berkarakter. Pada konteks inilah seluruh stakeholders pendidikan seharusnya bersinergi untuk mengembangkan pendidikan holistik. Melalui pendidikan holistik, kita berharap akan terwujud pendidikan manusia seutuhnya (human wholeness). Semoga peringatan Hardiknas semakin membuka mata kita terhadap pentingnya pendidikan holistik.

Delapan Prinsip Pendidikan Holistik

Pendidikan holistik (*holistic education*) dapat dipahami sebagai pendidikan yang menggabungkan semua potensi; spiritual, intelektual, emosional, sosial, kultural, dan fisik. Konsep ini layak direnungkan terkait dengan beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di dunia pendidikan. Kasus tawuran antar pelajar, demonstrasi anarkistis mahasiswa, dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melibatkan kalangan terdidik, benar-benar telah menjadi potret buram pendidikan nasional.

Pertanyaannya, apa yang salah dari sistem pendidikan kita sehingga belum berhasil melahirkan generasi yang berakhlak, cerdas, dan berbudaya (*civilized*). Dalam bahasa konstitusi, sistem pendidikan kita dapat dikatakan telah gagal mendidik manusia seutuhnya. Pada konteks inilah penting diwujudkan sistem pendidikan holistik. Menurut Lucila T. Rudge dari The Ohio State University, pendidikan holistik itu ditegakkan di atas delapan prinsip.

Pertama, spirituality is central of holistic education. Prinsip ini menekankan betapa penting nilai-nilai spiritual-keagamaan dijadikan komponen utama dalam mewujudkan pendidikan holistik. Yang dibutuhkan dalam hal ini tentu saja budaya hidup religius di lingkungan sekolah. Prinsip pertama ini juga menekankan pentingnya keteladan dari pendidik dan orang tua sebagai asas mendidik anak sehingga berakhlak mulia.

Kedua, educating for earth literacy. Prinsip ini memberikan penekanan bahwa pendidikan seharusnya mampu mengubah pandangan anak-anak terhadap kehidupan di dunia. Harus ditekankan bahwa kehidupan ini adalah suci. Karena itu anak-anak harus dididik agar senang membaca sehingga tercerahkan dan selalu muncul rasa ingin tahu. Dalam bahasa warga persyarikatan, pendidikan seharusnya diorientasikan untuk mencerahkan masyarakat.

Ketiga, interconnectedness. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan seharusnya bersifat integral atau interkoneksi. Pendidikan seharusnya mengintegrasikan potensi akal (*brain*), indera (*sense*), dan hati (*heart*). Dalam perspektif inilah dikotomi ilmu umum dan agama harus diakhiri. Juga tidak boleh ada pandangan yang menyatakan bahwa disiplin ilmu tertentu memiliki kualifikasi lebih tinggi dibanding yang lain. Dunia ini membutuhkan sikap kerendah-hatian dari ilmuwan dengan berbagai latar belakang untuk saling bertegur sapa. Sikap ini penting untuk menghindari perspektif yang parsial terhadap suatu persoalan.

Keempat, educating for human development: human wholness. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sehingga menjadi manusia seutuhnya. Untuk menjadi manusia seutuhnya jelas dibutuhkan seperangkat keterampilan di bidang intelektual, emosional, afeksi, fisik, sosial, estetik, dan spiritual. Dengan bermodal berbagai keterampilan ini maka dipastikan peserta didik akan sukses dalam mengarungi kehidupan.

Kelima, honoring students as individuals: individual uniqueness. Prinsip ini mengajarkan agar setiap pendidik menghargai peserta didik sebagai pribadi yang unik. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dianugerahi potensi oleh Sang Pencipta sebagai bekal hidup. Karena itu seharusnya tidak ada lagi pendidik yang menvonis anak dengan label “anak nakal” atau “anak bodoh”. Semua anak harus

dipandang sebagai mutiara dengan potensi bawaan yang berbeda-beda. Tugas pendidik adalah memfasilitasi anak-anak agar menyadari potensi itu dan mengembangkannya sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa.

Keenam, caring relation. Prinsip ini mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang baik antar sesama. Hubungan harmonis ini perlu dipraktikkan di lembaga pendidikan agar tidak ada jarak antar pribadi. Antara pemimpin yang dipimpin, pendidik-tenaga kependidikan, pendidik-peserta didik, dan orang tua, jelas memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu seharusnya tidak menjadi halangan terwujudnya hubungan timbal balik antar pribadi sehingga saling berempati.

Ketujuh, freedom of choice: new role of educators as facilitator. Prinsip ini mengharuskan pendidik sebagai fasilitator bagi peserta didik. Dengan berposisi sebagai fasilitator maka pasti ada perubahan dalam sistem pembelajaran. Jika dulu pembelajaran berpusat pada pendidik (*teacher center*), maka kini sudah berubah menjadi berpusat pada peserta didik (*student center*). Ini berarti pendidik tidak harus memosisikan diri sebagai satu-satunya sumber informasi. Peserta didik pun layak dijadikan sumber informasi. Model pembelajaran ini memungkinkan terjadinya saling tukar informasi (*information exchange*). Dengan demikian prinsip *every one is a teacher here* terasa sangat relevan dijalankan dalam proses pembelajaran.

Kedelapan, education for a participatory democracy. Prinsip terakhir ini memberikan pelajaran bahwa pendidikan seharusnya digunakan sebagai media untuk mendidik anak sehingga berbudaya demokratis. Sikap ini penting karena berkaitan dengan keterampilan sosial anak. Dalam kaitan ini anak-anak harus terus dilatih untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk.

Jika lembaga pendidikan Muhammadiyah mampu menerapkan delapan prinsip tersebut rasanya kita telah memberikan teladan pada pemerintah bagaimana seharusnya mengelola sistem pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik yang berbudaya dan berakhlak mulia. Semoga kita bisa!

Spirit Internasional Tanpa RSBI

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan yang "memakamkan" status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Bisa jadi keputusan ini meresahkan sekolah berstatus RSBI. Tetapi, jika dilihat alasan yang dikemukakan, putusan MK terasa sangat tepat. MK berpendapat bahwa status RSBI bertentangan dengan spirit UUD '45 yang mengamankan setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan terbaik.

MK pun membeberkan fakta bahwa mayoritas sekolah berstatus RSBI hanya menerima siswa dengan latar belakang ekonomi mampu. Akibatnya, terjadi kastanisasi pendidikan yang mewujud dalam kelas reguler dan RSBI.

MK juga menyoroti kecenderungan komersialisasi pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pungutan. Bahkan, di kalangan masyarakat RSBI, hal itu dipelesetkan dengan rintisan sekolah "bertarif" internasional. Hanya tarifnya yang internasional, sementara mutunya lokal. Ini jelas sindiran terhadap mahalnya biaya pendidikan di sekolah berstatus RSBI.

Persoalan jati diri anak bangsa juga menjadi kekhawatiran karena kurikulum RSBI diadopsi dari pendidikan luar negeri. Apalagi, dalam pembelajaran, penggunaan bahasa Inggris ditekankan sebagai pengantar. Sementara itu, alokasi materi yang berkaitan dengan nilai-nilai keindonesiaan dirasa sangat kurang.

Putusan MK sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai keberadaan sekolah berstatus RSBI. Sebab, pasca putusan MK, sekolah tidak boleh lagi menggunakan status RSBI. Yang menarik ditunggu adalah sikap Kemendikbud. Sejauh ini Kemendikbud masih berniat untuk melanjutkan program yang digulirkan sejak 2005 itu. Bahkan, penganggaran untuk mendukung program RSBI telah dialokasikan. Sebab, dalam perspektif Kemendikbud, program RSBI dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tingkat internasional. Program ini juga merupakan ikhtiar untuk menjalankan amanah konstitusi (UU Sisdiknas 20/2003, pasal 50 ayat 3).

Sejak Januari 2012 Kemendikbud sejatinya mengevaluasi 1.305 sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang berstatus RSBI. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa program RSBI dianggap gagal. Indikatornya, belum ada satu pun sekolah berstatus RSBI yang statusnya naik menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Padahal, untuk menjadi SBI, jenjang SD hanya membutuhkan tiga tahun, SMP empat tahun, dan SMA/SMK lima tahun. Kegagalan itu menunjukkan bahwa program RSBI tidak dirancang dengan serius dan berkelanjutan. Padahal, program RSBI telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari APBN dan APBD.

Beberapa sekolah berstatus RSBI sejatinya telah lama menanyakan keberlanjutan program ini kepada pemerintah. Pertanyaan yang diajukan terutama berkaitan dengan perubahan status RSBI menjadi SBI. Karena tidak ada kepastian dari pemerintah, sebagian sekolah pun khawatir. Apalagi subsidi pemerintah mulai dikurangi.

Di tengah ketidakpastian itu, sekolah melakukan *fundraising* guna menutupi biaya operasional. Ironinya, ikhtiar sekolah ini dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pendidikan gratis. Sebab, pungutan tersebut dapat mereduksi kampanye pendidikan gratis yang selama ini digelorkan pemerintah. Faktanya, kampanye pendidikan gratis cenderung menyesatkan karena tidak pernah ada dalam kenyataan.

Karena MK telah mengumumkan putusan, Kemendikbud tidak memiliki pilihan lain. Program yang selama ini dirancang untuk mempertahankan RSBI harus dialihkan untuk kegiatan lain. Tetapi, Kemendikbud tidak boleh kehilangan semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apa pun namanya, semangat untuk menginternasionalisasikan mutu pendidikan tetap penting.

Pada konteks itulah, sekolah dapat menginisiasi program RSBI dengan menciptakan kelas-kelas unggulan. Rasanya tidak adil jika mengatasnamakan kesamaan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan kemudian menafikan anak-anak yang bertalenta hebat. Mereka yang bertalenta luar biasa jelas berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Pada mereka selayaknya kita berharap munculnya generasi emas yang akan menentukan perjalanan bangsa di masa mendatang.

Salah satu prinsip pendidikan holistik (*holistic education*) menekankan pentingnya perlakuan yang berbeda sesuai dengan keunikan anak. Proses pendidikan harus menghargai peserta didik sebagai pribadi yang unik (*honoring students as individuals, individual uniqueness*). Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dianugerahi potensi oleh Tuhan sebagai bekal hidup. Karena itu, seharusnya tidak ada lagi pendidik yang menvonis anak dengan status "anak nakal" atau "anak bodoh". Semua anak harus dipandang sebagai mutiara dengan potensi bawaan yang berbeda-beda.

Tugas pendidik adalah memfasilitasi anak-anak agar menyadari potensi itu dan mengembangkannya sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan memahami prinsip dalam pendidikan holistik, jika ada perlakuan berbeda pada anak, tidak dapat digeneralisasi bahwa telah terjadi diskriminasi. Anak yang bertalenta hebat di bidang akademis harus difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga anak yang memiliki bakat di bidang nonakademis.

Untuk memberikan layanan terbaik, jelas dibutuhkan dana yang besar. Dalam konteks inilah, negara jika mau konsisten seharusnya menyediakan semua kebutuhan pendidikan anak. Tetapi, kita tahu persis, kemampuan negara sangat terbatas jika harus membiayai pendidikan yang bermutu untuk semua anak bangsa. Karena itulah, pemerintah membutuhkan *stakeholder* pendidikan dari kelompok swasta sehingga tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana dengan baik. Sinergi pemerintah dan swasta ini penting untuk mewujudkan kelas-kelas unggulan yang

mewadahi anak dengan berbagai bakat. Kelas-kelas unggulan inilah yang diharapkan dapat menggantikan program RSBI.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, yang dibutuhkan hanya *political will* dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan kelonggaran kepada sekolah untuk memobilisasi sumber daya masyarakat. Ikhtiar ini jelas tidak termasuk kategori komersialisasi pendidikan sebagaimana diduga MK. Justru secara otomatis terjadi subsidi antara anak orang kaya dan miskin.

Gejala Inden Sekolah dan *Best Process*

Juni hingga Juli biasanya menjadi bulan yang sibuk bagi sekolah untuk menerima peserta didik. Tetapi, jika diamati, ada banyak sekolah tingkat dasar dan menengah yang telah membuka pendaftaran sejak jauh hari. Itu terutama dilakukan sekolah swasta berkategori unggulan dengan menggunakan sistem inden.

Langkah itu tentu tidak dapat disalahkan karena sekolah sejatinya hanya merespons keinginan masyarakat. Bahkan, sistem inden juga dilakukan sekolah berkategori non unggulan dengan tujuan agar tetap memperoleh peserta didik baru untuk menjamin keberlangsungan sekolahnya.

Ada sekolah yang laris manis sehingga pendaftarannya melampaui daya tampung. Bahkan, dengan gagah, sekolah tersebut menolak banyak pendaftar. Fenomena itu biasanya dialami sekolah berkategori mapan dengan segudang prestasi.

Sementara di tempat lain yang berjarak tidak terlalu jauh, ada sekolah yang harus berjuang hingga tetes keringat penghabisan

untuk mendapatkan peserta didik baru. Bahkan, hingga tahun ajaran baru dimulai, sekolah tersebut masih menerima pendaftaran. Kondisi itu biasanya dialami sekolah berkategori kecil dan miskin prestasi.

Perbedaan nasib sekolah itu terjadi karena faktor keunggulan. Itu berarti jika lembaga pendidikan berkategori unggul, di mana pun posisinya pasti akan dicari. Pada konteks itulah, lembaga pendidikan harus memberikan layanan yang bermutu. Jika tidak begitu, pasti sekolah akan ditinggalkan *stakeholder*-nya.

Sekolah unggul merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti *effective school*, *efficiency school*, *high performance school*, dan *excellent school*. Dalam praktiknya, untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang kemutuan sekolah biasanya digunakan *branding* sekolah unggul, sekolah juara, sekolah prestasi, sekolah plus, sekolah favorit, dan sekolah model.

Sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), label RSBI juga digunakan untuk menunjukkan keunggulan sekolah. Tentu saja, beberapa *branding* itu absah digunakan asalkan di sekolah tersebut diterapkan budaya mutu. Artinya, ada jaminan standar mutu layanan yang ditetapkan sekolah.

Persoalan layanan mutu itu penting karena ada kalanya orang memahami pendidikan unggul sekadar dilihat dari sarana fisik, besarnya SPP, dan muridnya yang memang pilihan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa sekolah unggul itu harus serba "wah".

Tom J. Parkins (2003) dalam penelitiannya tentang pendidikan unggul di Tanah Air menyatakan bahwa ada tiga indikator yang harus dimiliki sekolah unggul: *input*, proses, dan *output*. Menurutnya, sekolah unggul dapat dicapai melalui dua strategi, yaitu *best input* dan *best process*.

Strategi *best input* meniscayakan sekolah untuk memperoleh peserta didik yang bermutu. Dalam praktiknya, sekolah berkategori *best input* menerapkan tes masuk yang sangat ketat, terutama yang berkaitan dengan kemampuan akademik. Harapannya, sekolah memperoleh peserta didik yang terbaik. Dengan demikian, *output* yang dihasilkan sekolah pasti lulusan dengan capaian akademik luar biasa.

Pertanyaannya, capaian akademik yang luar biasa itu dikarenakan proses pendidikan di sekolah atau faktor lain? Diduga, anak-anak

hebat lulusan sekolah yang menekankan strategi *best input* itu karena anaknya memang hebat sejak semula. Fasilitas bimbingan belajar di luar sekolah juga sudah disiapkan begitu rupa oleh orang tua peserta didik. Itu berarti kontribusi guru dalam proses pendidikan pada sekolah yang menekankan *best input* sangat kecil.

Sekolah unggul kategori kedua menekankan strategi *best process*. Sekolah tersebut biasanya tidak begitu menekankan kepada kualitas akademik anak saat awal masuk. Dalam kondisi apa pun, peserta didik yang mendaftar akan diterima. Semua peserta didik yang mendaftar akan dipetakan berdasar keunggulannya. Jadi, tidak ada proses seleksi yang “jelimet” untuk sekolah tersebut karena setiap guru telah menyiapkan diri menjadi agen perubahan (*agent of change*) bagi peserta didik.

Setiap guru di sekolah berkategori *best process* juga menyadari betul ungkapan Edward Sallis dalam *Total Quality Management in Education* (2006), bahwa *recovery begins with teachers*. Karena ujung tombak pendidikan adalah guru, para guru di sekolah yang menekankan strategi *best process* berusaha secara maksimal mengubah karakter anak dari yang biasa menjadi luar biasa. Guru di sekolah tersebut meyakini bahwa setiap anak pasti telah memiliki keunggulan, minat, dan bakat yang unik sebagai anugerah dari Tuhan. Tugas guru ialah memfasilitasi anak agar memaksimalkan potensi bawaan tersebut.

Rasanya tipe sekolah berkategori *best process* itulah yang layak disebut pendidikan unggul. Tetapi, sayang, jumlah sekolah yang menekankan keunggulan pada *best process* ternyata sangat sedikit. Hasil penelitian Tom menunjukkan bahwa 99 persen sekolah unggul di Tanah Air membangun keunggulannya dengan strategi *best input*. Itu berarti hanya satu persen sekolah yang menekankan keunggulannya melalui strategi *best process*.

Tugas kita sebagai *stakeholder* pendidikan ialah mendorong sebanyak mungkin sekolah agar menempuh strategi *best process* dengan guru hebat. Itu penting ditekankan karena jantung pendidikan sejatinya ada pada proses pembelajaran dengan guru-guru yang andal.

Membangun Harapan Melalui Pendidikan

Mantan senator Amerika Serikat (AS) dan penggagas yayasan beasiswa Fulbright, William Fulbright, pernah berujar: *the education is slow movement, but powerful force*. Ungkapan ini bermakna bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang pergerakannya lambat, tetapi memiliki daya dobrak luar biasa kuat. Pernyataan Fulbright ini layak direnungkan karena kini ada begitu banyak harapan yang dialamatkan pada dunia pendidikan. Institusi pendidikan diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian berbagai soal bangsa.

Nalar itulah yang melandasi keinginan Kemendikbud untuk mengganti kurikulum. Pergantian kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), menjadi Kurikulum 2013 telah melewati masa uji publik. Berdasar hasil uji publik itulah Kemendikbud berkesempatan untuk merevisi naskah akademik kurikulum baru sehingga siap dilaksanakan mulai tahun ajaran 2013/2014.

Jika ditelisik lebih jauh memang banyak soal yang kini dihadapi bangsa. Sebagai contoh, sendi-sendi kehidupan berbangsa terus digerogoti virus korupsi sehingga negeri tercinta ini kian rapuh. Publik pun bertanya-tanya, apa sumbangsih lembaga pendidikan untuk mengatasi problem korupsi? Apalagi jika diamati, ternyata mereka yang terlibat kasus korupsi banyak yang berasal dari kalangan terpelajar. Bahkan sebagian mereka adalah lulusan pendidikan tinggi bergelar doktor dan profesor.

Pertanyaannya, apakah lembaga pendidikan turut memproduk koruptor? Pada konteks inilah publik menganggap penting untuk memberikan materi pendidikan antikorupsi mulai tingkat taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Ironisnya bangsa ini ternyata tidak hanya menghadapi persoalan korupsi. Budaya kewargaan (*civic culture*) seperti keramah tamahan, toleran, dan berkeadaban yang selama ini menjadi identitas bangsa mulai tergerus seiring munculnya radikalisme di tengah-tengah masyarakat.

Publik pun mulai membandingkan era reformasi dengan masa lalu. Sebagian kemudian menyimpulkan bahwa budaya kewargaan terus tergerus karena kalangan terdidik tidak lagi memperoleh pendidikan Pancasila secara memadai. Tuntutan untuk memasukkan Pancasila dalam kurikulum pendidikan pun terus menguat. Nilai-nilai Pancasila perlu diajarkan untuk menggugah kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan kaum muda.

Yang penting diingat dalam kaitan ini, pembelajaran Pancasila harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dialogis dan manusiawi. Ini dimaksudkan agar pendidikan mampu melahirkan generasi bangsa yang lebih berkarakter. Berbagai ironi yang terjadi di dunia pendidikan juga kian menjadi sehingga membutuhkan solusi.

Kasus ketakjujuran saat ujian, tawuran antarpelajar, demonstrasi anarkistis, narkoba, seks bebas, video mesum, *human trafficking*, dan tindakan asusila lain yang melibatkan kalangan terpelajar telah menyedot begitu banyak perhatian. Kasus yang membuat publik, termasuk guru dan orang tua, mengelus dada adalah arisan pekerja seks komersial (PSK) yang melibatkan pelajar SMA di Situbondo, Jatim. Yang lebih ironis, ternyata PSK yang dijadikan “piala bergilir” pelajar itu ternyata telah positif terkena virus HIV. Hati siapa yang tidak miris membaca berita tersebut.

Pertanyaannya, rentetan berita negatif inilah hasil pendidikan

yang telah menyedot anggaran negara hingga mencapai 20 persen? Untuk merespons kasus seks bebas yang melibatkan pelajar, sebagian elemen mengusulkan agar ada kurikulum pendidikan seks.

Ide ini jelas baik asal materi pendidikan seks tidak diberikan secara vulgar. Sebab, jika pembelajaran dilakukan secara vulgar, yang terjadi adalah dorongan yang semakin kuat untuk mengetahui lebih jauh atau bahkan ingin mencobanya. Melalui kurikulum pendidikan seks, pelajar diharapkan memperoleh informasi dari sumber yang benar sehingga terhindar dari praktik seks bebas. Di samping itu, anak-anak juga dapat menjaga kesehatan reproduksinya.

Sebagai institusi yang diharapkan begitu banyak elemen, praktisi pendidikan harus menemukan strategi yang tepat untuk mengajarkan materi yang menjadi tuntutan publik. Paling tidak ada dua strategi yang dapat dilakukan. *Pertama*, menyiapkan kurikulum sesuai dengan materi yang dikehendaki. Jika ini yang menjadi pilihan, dapat dibayangkan betapa gemuk struktur kurikulum dalam satuan pendidikan.

Kedua, melalui strategi penyisipan (*inserting*) materi pendidikan. Strategi penyisipan materi ini terasa paling memungkinkan. Melalui strategi *inserting* penyampaian materi pendidikan sesuai dengan topik yang akan diajarkan dapat dilakukan lebih fleksibel. Itu berarti tidak harus ada mata pelajaran baru. Strategi kedua ini juga terasa sejalan dengan semangat yang dikembangkan Kemendikbud. Dalam kurikulum 2013, Kemendikbud menekankan adanya perampingan kurikulum sehingga ada beberapa mata pelajaran yang harus diintegrasikan.

Pendidik dan pemerhati pendidikan tetap dapat berkreasi untuk menyusun sebanyak mungkin modul berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, lingkungan hidup, *civic culture*, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan virus HIV/AIDS. Selanjutnya, modul ini dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Yang perlu diingat, pendidikan berbagai materi yang dibutuhkan bangsa ini tidak boleh sekadar transfer pengetahuan. Yang jauh lebih penting dari sistem pendidikan adalah menumbuhkan afeksi anak sehingga mewujud dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain melalui mata pelajaran, sesungguhnya ada satu variabel yang terasa hilang dari proses pendidikan kita, yaitu keteladanan. Berbagai ironi yang terjadi di dunia pendidikan salah satu faktornya

sangat mungkin disebabkan tiadanya keteladanan. Keteladanan mutlak dibutuhkan untuk membentuk pribadi anak sehingga berintegritas dan berakhlak mulia. Pada konteks inilah setiap orang yang memiliki keprihatinan terhadap nasib generasi mendatang wajib menghadirkan keteladanan di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar.

Selamatkan Buah Hati Kita

Bagi orang tua, anak merupakan anugerah yang tak terhingga nilainya. Anak juga merupakan amanah Allah SWT. Dalam Alqur'an, anak juga dilukiskan sebagai penyejuk pandangan (QS. Al-Furqan: 74) dan hiasan hidup di dunia (QS. Al-Kahfi: 46). Tetapi jangan lupa, anak juga digambarkan secara antagonis, misalnya sebagai musuh (QS. Al-Taghabun: 14) dan fitnah atau cobaan (QS. Al-Taghabun: 15).

Dengan gambaran itu berarti orang tua harus menjaga buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Selain orang tua, guru juga harus menjaga anak didiknya dengan sepenuh hati. Itu karena sebagian waktu anak dihabiskan di sekolah. Bahkan saat anak berada di sekolah, guru harus memosisikan diri sebagai orang tua sekaligus sahabat.

Peringatan bagi orang tua dan guru itu penting dikemukakan karena kasus kekerasan (*bullying*) pada anak kini kian mengkhawatirkan. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada Januari-Juni 2013, menunjukkan bahwa telah

terjadi 1.032 kasus kekerasan anak. Rinciannya, 294 kasus kekerasan fisik (28 persen), 203 kasus kekerasan psikis (20 persen), dan 535 kasus kekerasan seksual (52 persen).

Diantara kasus kekerasan anak yang menyita perhatian publik pada Oktober 2014 adalah peristiwa di SD Trisula Perwari Bukittinggi, Sumatera Barat. Publik pun dapat mengunggah kasus kekerasan yang melibatkan beberapa anak SD di Bukittinggi itu melalui tayangan video *You Tube*. Data Komnas PA juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak menduduki peringkat nomor wahid. Karena itu tidak mengherankan jika kasus *bullying* pada anak kini menjadi perhatian nasional.

Salah satu kasus yang kemudian menjadi perhatian nasional dan internasional adalah kekerasan seksual yang menimpa anak-anak TK Jakarta International School (JIS). Terkuaknya kejadian di JIS ternyata memicu keberanian masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus pelecehan seksual pada anak di daerah lain. Menurut catatan Mabes Polri, hingga pertengahan 2014 telah terjadi 73 kasus pelecehan seksual pada anak (*pedofilia*) yang tersebar di 18 Provinsi.

Dari semua kasus pedofelia tersebut yang paling heboh adalah pelecehan seksual terhadap anak di Sukabumi dengan pelaku Andri Sobari alias Emon. Tidak tanggung-tanggung, korban Emon diduga mencapai 120 anak. Konon Aksi Emon sudah berlangsung sejak tahun 2005. Rangkaian kasus kekerasan seksual pada anak, apalagi dilakukan di sekolah, jelas menjadi ironi dalam dunia pendidikan.

Di kota metropolis ini beberapa kali juga terjadi kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melibatkan pelajar setingkat SMP dan SMA. Ironisnya, diantara mereka ada yang bertindak sebagai mucikari. Coba bayangkan, orang tua mana yang tidak risau dengan kasus tersebut. Pada usia yang masih sangat belia itu, anak-anak yang semestinya belajar untuk menyiapkan masa depan ternyata sudah jauh terlibat dalam jaringan prostitusi.

Apalagi dalam beberapa kasus *human trafficking* itu anak-anak ternyata bukan sekedar korban, melainkan berprofesi sebagai mucikari muda. Mereka pun tampak sangat rapi dan profesional menjalankan bisnis prostitusi. Mereka seakan tidak segan menjadikan teman-temannya sebagai korban. Media pun menamakan pelaku bisnis prostitusi yang melibatkan pelajar dengan istilah *blue chicken* (ayam berbaju biru, anak SMP) dan *gray chicken* (ayam berbaju abu-

abu, anak SMA).

Kasus yang lain yang berulang kali terjadi adalah seks bebas dan video mesum yang melibatkan pelajar. Bahkan pada penghujung 2012, dunia pendidikan dikagetkan kasus arisan pekerja seks komersial (PSK) yang melibatkan sejumlah pelajar SMA di Situbondo, Jatim. Ironisnya, PSK yang dijadikan “piala bergilir” ternyata telah positif terjangkit virus HIV/AIDS. Sekali lagi, hati orang tua dan guru mana yang tidak miris membaca rentetan berita tersebut.

Untuk meminimalkan kasus kekerasan seksual dan asusila yang melibatkan pelajar, sebagian pemerhati pendidikan mengusulkan agar ada materi pendidikan seks (*sex education*). Tetapi gagasan ini terlanjur menuai kontroversi. Mereka yang menolak menganggap pendidikan seks itu tabu sehingga akan berdampak negatif. Sementara mereka yang setuju menganggap pendidikan seks penting untuk menghindarkan anak dari praktek seks bebas. Pendidikan seks juga bermanfaat bagi anak agar dapat menjaga kesehatan reproduksinya.

Terlepas dari pro kontra tersebut, yang mendesak dilakukan adalah menyelamatkan anak-anak dari kekerasan seksual dan kasus asusila lainnya. Disinilah peran orang tua dan guru terasa sangat penting untuk mendidik anak-anak. Rasanya, lebih baik anak-anak memperoleh pengetahuan mengenai seluk beluk seks dan kesehatan reproduksi dari sumber yang benar, yakni guru dan orang tua, daripada mereka mencari sendiri melalui media *online* (website).

Jika anak-anak bebas mengakses media *online* tanpa pendampingan dari orang tua dan guru maka ibaratnya mereka sedang memasuki hutan belantara. Semua layanan tersedia mulai film, game, dan berbagai jenis informasi lainnya begitu bebas diakses. Untuk itulah anak-anak harus mendapatkan bimbingan dari orang tua dan guru saat berinteraksi dengan internet. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat memilih informasi yang bermanfaat untuk kehidupannya.

Dalam proses pendampingan itu, anak-anak harus didekatkan dengan realitas kehidupan. Anak-anak harus diberikan pemahaman terhadap akibat yang ditimbulkan jika mengakses tayangan atau informasi yang tidak baik dari media. Rasanya anak-anak masa kini tidak bisa lagi dilarang. Pendekatan pendidikan dengan menggunakan kata “jangan” kini harus ditinggalkan. Karena jika dilarang, rasa ingin tahu anak-anak pasti semakin membuncah.

Disamping melalui pembelajaran, yang juga penting ditekankan

pada anak-anak adalah pembiasaan. Melalui metode pembiasaan inilah anak-anak diharapkan berbudaya baik dalam keseharian. Di atas itu semua, yang terpenting dalam pendidikan tentu saja adalah keteladanan. Melalui keteladanan orang tua, guru, dan masyarakat, kita berharap anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

Spirit Multikulturalisme Piala Dunia

Gebyar Piala Dunia edisi ke-20 resmi dimulai. Hajatan akbar empat tahunan ini berlangsung di Brasil mulai 12 Juni hingga 13 Juli 2014. Sebanyak 32 kontestan mewakili negara masing-masing akan unjuk kekuatan untuk menjadi yang terbaik. Karena mewakili negara maka sepak bola sekaligus menjadi media untuk menumbuhkan spirit nasionalisme.

Pada konteks inilah nilai-nilai persatuan, perjuangan, pengorbanan, kehormatan, dan harga diri, sebagai satu bangsa dipertaruhkan. Nilai-nilai nasionalisme itu menjadi penyemangat setiap pemain sehingga berlaga dengan sepenuh hati guna meraih kemenangan demi menjaga martabat bangsanya. Selain menumbuhkan spirit nasionalisme, sepak bola juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya multikulturalisme.

Melalui permainan sepak bola, setiap pemain dengan berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama, dipertemukan menjadi satu kekuatan. Bahkan, di era modern ini berkembang budaya naturalisasi pemain-pemain berkualitas dari mancanegara. Seakan

tidak mau ketinggalan, PSSI juga menaturalisasi sejumlah pemain demi meraih mimpi menjadi peserta Piala Dunia pada suatu waktu nanti.

Perbedaan agama antarpemain tidak menjadi halangan untuk membangun tim yang tangguh. Tengoklah tim nasional Prancis yang dihuni beberapa pemain muslim, seperti Karim Benzema dan Franck Ribery. Pemain berkulit hitam yang sering menjadi sasaran rasisme juga dapat bermain dalam satu tim seperti Mario Balotelli (Italia) dan Jerome Boateng (Jerman).

Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepak bola dapat menjadi media yang efektif untuk menciptakan pembauran antarwarga (*melting pot*). Slogan resmi Piala Dunia 2014, *All in One Rhythm*, terasa sangat relevan untuk dijadikan spirit menumbuhkan multikulturalisme. Slogan tersebut seakan mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan yang plural.

Demikian juga dengan lagu resmi Piala Dunia, *We Are One*, yang dinyanyikan duet penyanyi Pitbull, Jennifer Lopez (J-Lo), dan Claudia Leitte. Spirit *We Are One* mengiringi pembukaan Piala Dunia sekaligus laga perdana yang mempertemukan Brasil melawan Kroasia. Lagu resmi Piala Dunia menegaskan pentingnya semangat mewujudkan kehidupan berbangsa yang ramah dengan keragaman.

Multikulturalisme dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap pluralitas budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat dan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka tetap diakui (Kymlika, 1989).

Dengan demikian, tujuan utama multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) sehingga memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing. Menurut Haryatmoko (2007), setidaknya ada tiga alasan yang menjadikan multikulturalisme mutlak diperlukan dalam konteks kekinian.

Pertama, adanya fenomena penindasan atau penafian atas dasar agama, etnis, dan budaya. Dikotomi antara "kita" (kelompok dominan) dan "mereka" (di luar kelompok dominan) sering kali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini banyak terjadi di wilayah

publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan publik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, kelompok minoritas terus ditekan sehingga kehilangan eksistensi.

Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memarjinalkan kelompok tertentu dengan memberi label "tidak terlalu penting" dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri semakin terpatritasi dalam struktur kesadaran kelompok minoritas. Pada konteks inilah, multikulturalisme hendak menjawab kebutuhan yang mendasar kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya.

Ketiga, kaum urban dan migran sering kali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak undang-undang otonomi daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah sering kali disalahartikan dengan pemihakan terhadap kepentingan warga asli atau pribumi.

Akibatnya, terjadi diskriminasi terhadap warga pendatang. Lebih ironis lagi, rekrutmen pejabat publik sering kali tidak didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak, tetapi asal daerah dan pertimbangan politik lokal dan faktor primordialisme lainnya. Berdasarkan tiga argumen tersebut, kesadaran multikulturalisme perlu terus digelorakan agar tumbuh sikap saling memahami kekhasan masing-masing.

Dalam hal ini, kekhasan tidak boleh disamakan dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial budaya. Dalam memahami kekhasan etnis, budaya, dan agama, kita layak belajar pada teori filsuf Prancis, Emmanuel Levinas (1971) tentang penampakan wajah.

Dikatakan oleh Levinas bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu sama sekali berbeda dari aku. Namun demikian, hubungan aku dengan yang lain tidak akan melahirkan kekerasan. Bahkan, kehadiran yang lain justru akan membuahkkan kedamaian dan menumbuhkan kultur positif dalam kehidupan.

Melalui teori penampakan wajah akan tergambar yang lain (*the other*). Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling bertegur sapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang

lepas dari tanggung jawab. Setiap orang akan dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap.

Wajah yang menampak dalam gambar mencair dalam afeksi sehingga tidak hanya berhenti pada persepsi, tetapi juga mengkristal dalam kesadaran seseorang. Teori Levinas mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan nir kepentingan. Hubungan ini menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut imbalan. Itu berarti tidak ada tuntutan timbal balik dan tiada pula dominasi.

Pelajaran multikulturalisme terasa sekali dalam permainan sepak bola. Semua pemain bahu-membahu dan saling membantu sehingga tidak tampak budaya yang mendominasi. Penonton juga dapat menikmati pertandingan dan memberikan dukungan penuh pada pemain; meski sejujurnya harus diakui bahwa antara pemain dan penonton sejatinya memiliki perbedaan sosial budaya.

Hal itu menunjukkan betapa penting permainan sepak bola sebagai media untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme. Semoga semarak Piala Dunia dapat dijadikan pelajaran untuk membangun Indonesia yang lebih ramah terhadap keragaman.

Harapan untuk Kementerian Ristek dan Dikti

Salah satu perubahan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah membagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi dua. Pertama, Kementerian Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Kedua, Kementerian Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Dikti). Perubahan itu bertujuan meningkatkan kinerja kementerian yang sangat menentukan nasib pendidikan nasional.

Harus diakui, selama ini *loading* kegiatan Kemendikbud sangat berjubel. Anggaran yang disiapkan pun sangat besar. Sebagai gambaran, anggaran Kemendikbud mencapai Rp 371,2 triliun dari total APBN 2014 yang mencapai Rp 1.816,7 triliun. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mengurus pendidikan, mulai anak usia dini, taman kanak-kanak, dikdasmen, hingga dikti. Itu belum termasuk berbagai bentuk pendidikan informal dan nonformal.

Karena yang diurus sangat banyak, arah pendidikan nasional sejauh ini terkesan kurang fokus. Dampaknya, mutu pendidikan nasional tertinggal dari negara lain. Ranking pendidikan nasional level dunia juga tercecer di bawah. Padahal, pada 2015, kita memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jelas dibutuhkan keseriusan untuk mengelola pendidikan agar lulusan berdaya saing internasional.

Dalam kaitan itulah, perubahan kementerian pendidikan nasional terasa sangat relevan. Pembentukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti yang terpisah dari Dikdasmen bisa mendorong kiprah perguruan tinggi (PT) dalam melaksanakan tugas-tugas penelitian. Apalagi jika penelitian itu menghasilkan teknologi tepat guna yang bermanfaat praktis bagi kehidupan masyarakat.

Seorang akademisi Melbourne University, Profesor Richard James (2010), pernah membuat definisi menarik tentang penelitian. Menurut dia, substansi penelitian terletak pada publikasi dan kegunaan (*research is publication and using*). Pandangan itu menegaskan, untuk mengukur mutu penelitian, harus dilihat publikasi yang dihasilkan dan manfaat praktisnya bagi masyarakat.

Melalui publikasi, akan terjalin komunikasi timbal balik antarilmuwan. Bermula dari publikasi itulah keinginan membangun budaya akademik (*academic atmosphere*) di dunia pendidikan dapat tercapai. Publikasi hasil penelitian juga berguna untuk meminimalkan praktik plagiat yang marak terjadi di dunia pendidikan. Berkaitan dengan problem plagiat, perguruan tinggi (PT) harus memiliki mekanisme yang ampuh.

Salah satu caranya adalah memublikasikan ringkasan hasil penelitian melalui media cetak nasional atau internasional. Apalagi kini publikasi ilmiah juga dapat dilakukan secara online. Sayangnya, banyak peneliti yang belum berani memublikasikan hasil penelitian mereka. Padahal, selalu dikatakan, tugas utama civitas academica PT adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tiga tugas itulah yang populer disebut tridarma PT. Itu berarti seluruh civitas academica harus memahami tridarma sebagai satu kesatuan yang saling terkait (*linkage*). Berkaitan dengan keinginan untuk membuat linkage tridarma, civitas academica harus menyadari bahwa penelitian tersebut sangat penting.

Hasil penelitian bisa menjadi referensi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kesadaran itu terasa kurang di kalangan civitas academica. Dampaknya, praktik

pendidikan dan pengabdian tidak mengalami kemajuan berarti. Padahal, dunia pendidikan telah berkembang begitu pesat. Kebutuhan masyarakat juga bergerak begitu cepat seiring dengan tuntutan zaman. Konteks pendidikan terkini jelas meniscayakan pembelajaran berbasis penelitian.

Karena itu, banyak PT yang menjadikan penelitian sebagai branding (label). Tidak mengherankan jika ada universitas yang mengenalkan diri dengan label *university based research*. Untuk menjadikan penelitian sebagai budaya, setiap dosen harus mendesain pembelajaran dengan mengutamakan model induktif. Model pembelajaran induktif mengharuskan mahasiswa mengamati problem sosial di tengah-tengah masyarakat untuk dicarikan solusinya. Itulah sesungguhnya model pembelajaran otentik (*authentic learning*).

Inti pembelajaran otentik adalah pelibatan mahasiswa secara aktif untuk menemukan beragam ilmu pengetahuan dengan bersumber pada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Metode induktif dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pembelajaran deduktif. Sudah saatnya mahasiswa dilatih untuk memiliki sense bertanya, mengobservasi, dan mengajukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Pola pembelajaran itu bisa menjadi media membentuk mahasiswa haus ilmu sehingga selalu merasa ingin tahu (*curiosity*).

Melalui cara itu, berarti dosen telah memberikan soft skill kepada mahasiswa untuk menjadi calon peneliti pada masa mendatang. Karena itu, penting ditekankan pelibatan mahasiswa dalam penelitian oleh dosen. Dalam sudut pandang penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), komponen penelitian yang melibatkan mahasiswa bernilai sangat tinggi. Demikian pula penelitian yang diikuti publikasi. Dua kegiatan tersebut, penelitian dan publikasi, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam akreditasi program studi dan institusi.

Untuk membangun budaya penelitian dan publikasi, direktur jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud sejatinya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 152/E/T/2012 tentang kewajiban melakukan publikasi ilmiah bagi mahasiswa S-1, S-2, dan S-3. Sayangnya, terobosan Dirjen Dikti itu belum efektif. Masih banyak PT yang enggan menjalankan amanat peraturan tersebut.

Memuliakan Profesi Guru

Hampir setiap tahun pemerintah disibukkan dengan urusan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Problem yang dihadapi pun selalu sama, yakni penentuan besaran UMP untuk merespon tuntutan buruh. Seiring dengan alotnya penentuan UMP buruh, ada pertanyaan yang mesti dijawab, yaitu berkaitan dengan nasib guru. Pertanyaannya, berapa gaji minimal yang seharusnya diberikan pada guru agar hidup dengan layak?

Pertanyaan tersebut penting dijawab karena sejauh ini gaji guru masih jauh dari kata memadai. Padahal kalau kita ingin memperbaiki mutu pendidikan, salah satu yang harus dipikirkan adalah nasib guru. Pemerintah dan swasta harus memastikan bahwa guru-guru kita hidup secara layak dan terhormat. Tetapi itulah hebatnya para pahlawan tanpa tanda jasa. Meski bergaji kecil, mereka tetap mendidik dengan sepuh hati.

Semangat mengabdikan para guru muncul karena ada keyakinan bahwa mendidik tidak sekedar bekerja, melainkan juga beribadah. Dengan kata lain, mendidik bukan sekedar profesi, melainkan

panggilan hati. Karena itu dalam perspektif perundang-undangan, posisi guru tidak sama dengan buruh. Guru merupakan jabatan profesi sehingga tidak dapat dijalani sembarang orang. Seseorang yang ingin berprofesi sebagai guru disyaratkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (*UU Nomor 14 Tahun 2005*).

Untuk menjadi guru, seseorang tidak boleh hanya bermodal kemauan dan kepintaran. Guru dituntut untuk menampilkan diri seutuhnya sebagai pendidik. Tutur kata dan perilaku guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru. Pada konteks inilah guru harus menghadirkan keteladan bagi anak-anak. Tegasnya, guru harus menjadi teladan kehidupan (*living example*) bagi peserta didiknya.

Untuk menjadi pendidik profesional, guru juga harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). PPG harus dijalani calon guru selama satu tahun di perguruan tinggi yang telah ditunjuk pemerintah. Itu berarti seseorang dapat dinyatakan sebagai guru profesional jika lulus PPG. Mereka yang lulus PPG berhak untuk memperoleh gelar Guru atau disingkat “Gr” (*Pasal 14, Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013*).

Berbeda dengan buruh, guru bekerja di lembaga pendidikan yang bersifat nirlaba. Sementara buruh bekerja di perusahaan yang berorientasi profit. Karena itulah nafas perjuangan guru terasa lebih menonjol. Tetapi sebagai orang yang bekerja dalam waktu tertentu, guru berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang layak. Berkaitan dengan itulah, kesejahteraan hidup guru harus terjamin.

Untuk itu guru kita tidak boleh menderita. Itu karena mereka memiliki tugas mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena gajinya belum memadai maka *stakeholders* pendidikan harus berpikir keras agar kehidupan guru tidak terganggu. Apalagi realitas menunjukkan masih banyak guru yang menerima gaji jauh di bawah standar. Bahkan jika dibanding dengan UMP buruh yang ditetapkan pemerintah, terasa sekali gaji guru jauh lebih kecil.

Padahal jika dibanding buruh, profesi guru menuntut persyaratan pendidikan minimal sarjana (S-1 atau D-IV). Bahkan kini banyak guru yang berijazah S-2 dan S-3. Selain persyaratan akademik, guru juga harus mengalami jalan berliku. Misalnya, guru yang diterima di lembaga pendidikan swasta tidak otomatis berstatus guru tetap. Mereka harus melewati masa percobaan hingga bertahun-tahun. Pengelola pendidikan swasta biasanya sangat berhati-hati mengangkat

guru tetap. Itu karena ada konsekwensi membayar gaji pokok dan tunjangan.

Jika gaji guru masih di bawah standar, bagaimana mereka dapat menjalankan tugas dengan profesional dan penuh dedikasi. Profesionalitas guru dapat diamati dari performansi dan kompetensinya. Sementara dedikasi guru dapat dilihat dari kecintaannya terhadap profesi sehingga membuahkan semangat bekerja dengan sepenuh hati. Bagi pendidik sejati, mendidik layaknya memberikan hati pada peserta didik.

Secara teori, tingkat kesejahteraan selalu berkorelasi positif dengan kinerja. Semakin baik kesejahteraan maka semakin baik pula kinerja. Karena itu jangan heran jika ditemukan banyak guru yang mengajar di sejumlah lembaga pendidikan. Hal itu terpaksa dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian meningkat. Jika guru tidak fokus mendidik, bagaimana layanan pendidikan bermutu dapat diwujudkan?

Pemerintah memang telah memberikan tunjangan profesi pendidik (TPP) guru yang tersertifikasi. Tetapi jika dihitung secara total, gaji guru tersertifikasi masih di bawah UMP. Itu pun dengan catatan TPP dibayarkan pemerintah setiap bulan. Padahal faktanya TPP tidak dibayarkan setiap bulan. Bahkan ada guru yang tidak menerima TPP hingga lima tahun. Kejadian ini dialami guru-guru di bawah naungan kementerian agama (Kemenag).

Jika mengacu pada konstitusi, idealnya pemerintah yang menanggung gaji dan tunjangan guru, termasuk guru swasta. Tetapi pemerintah jelas memiliki keterbatasan biaya. Apalagi menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru secara nasional kini mencapai 5.186.692 orang dengan rincian; 2.607.311 guru PNS dan 1.579.381 guru swasta. Dengan jumlah guru yang demikian besar maka terasa berat anggaran yang harus ditanggung pemerintah.

Karena itulah sinergi pemerintah dan swasta untuk memperbaiki kesejahteraan guru sangat penting. Jika pemerintah-swasta belum mampu memberikan kesejahteraan yang ideal, setidaknya guru memperoleh layanan agar dapat hidup lebih layak. Layanan itu dapat berbentuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar guru dan keluarganya seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Setiap pendidik sejati pasti menyadari bahwa pilihan menjadi guru merupakan panggilan hati. Pasti tidak terbayang dalam pikiran

guru bahwa ia akan hidup mewah dan bergelimang harta dengan menjadi pendidik. Yang ada dalam benak guru adalah mencetak generasi masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang lebih membahagiakan hati guru kecuali melihat anak didiknya sukses. Karena itulah kita harus memuliakan profesi guru dengan cara menyejahterahkan mereka.

Revitalisasi Fungsi Unas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memastikan ujian nasional (Unas) 2015 tetap dilaksanakan. Meski tetap diselenggarakan, skema Unas 2015 akan dimodifikasi. Salah satu perubahan yang pasti dilakukan adalah revitalisasi fungsi unas. Mendikbud Anies Baswedan menegaskan, Unas 2015 hanya akan difungsikan sebagai pemetaan pemerataan mutu pendidikan.

Dengan demikian, unas tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Revitalisasi fungsi Unas jelas menjadi kabar gembira bagi *stakeholder* pendidikan. Dengan memfungsikan Unas untuk pemetaan mutu pendidikan, penentuan kelulusan siswa diserahkan kepada sekolah. Kebijakan Kemendikbud itu sekaligus menjadi tantangan bagi guru.

Pertanyaannya, sudah siapkah guru menilai siswa dengan penuh tanggung jawab? Pertanyaan itu wajib dijawab secara jujur oleh guru. Sebab, di tengah situasi masyarakat yang cenderung saling tidak percaya (*low trust*), keputusan apa pun menjadi perdebatan. Rasanya, sudah waktunya kita percaya pada kemampuan guru. Para guru pasti

siap mengambil alih otoritas untuk menentukan kelulusan siswa dengan cara penilaian yang otentik (*authentic assessment*).

Penilaian otentik meniscayakan guru menilai apa yang seharusnya dinilai, menilai dari banyak aspek, dan menilai dari berbagai sumber. Sejauh ini, guru telah memiliki pengalaman menilai secara otentik melalui ulangan harian, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Para guru juga terbiasa menilai sikap dan perilaku siswa melalui kegiatan observasi. Dari perspektif teori evaluasi pendidikan, penilaian otentik jelas lebih kredibel daripada hasil Unas. Syaratnya, para guru menilai siswa dengan penuh kejujuran.

Ditegaskan Kemendikbud, Unas selanjutnya digunakan untuk memetakan mutu sekolah, pembelajaran guru, capaian siswa, dan dukungan orang tua. Berdasar hasil Unas itulah, pemerintah memetakan mutu pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Kemendikbud berjanji memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil. Sedangkan sekolah yang belum mencapai target akan memperoleh pembinaan secara intensif.

Persoalan yang dihadapi Kemendikbud adalah waktu pelaksanaan Unas yang semakin dekat. Jika merujuk tahun sebelumnya, umumnya Unas SMA dan SMP dilaksanakan April. Artinya, Kemendikbud hanya memiliki waktu tiga bulan untuk menyiapkan Unas. Persoalan waktu tersebut harus diperhitungkan secara cermat. Sebab, masih segar dalam ingatan publik karut-marut pelaksanaan Unas 2013.

Gara-gara mismanajemen, Unas 2013 tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Kasus itu begitu kompleks, mulai keterlambatan pencetakan, kendala pengiriman soal, kebocoran soal, hingga jual beli kunci jawaban. Problem itu masih ditambah dengan berbagai kasus yang menunjukkan praktik ketakjujuran (*dishonesty*). Ironisnya, problem ketakjujuran selalu melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa. Publik pun mengenang Unas 2013 sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.

Jika tidak ingin karut-marut Unas 2013 terulang, Kemendikbud harus menyiapkan kebutuhan logistik dengan baik. Untuk itu, Kemendikbud harus berpacu dengan waktu. Mereka tidak boleh lagi banyak berwacana. Termasuk wacana mengganti nama Unas dengan evaluasi nasional (*enas*). Apalagi jika pergantian itu sekadar nama. Ibaratnya hanya berganti baju.

Sebelumnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga

mewacanakan rancangan kriteria kelulusan Unas 2015 dengan komposisi 50:50. Wacana itu jelas tidak produktif di tengah persiapan dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam menghadapi Unas. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Unas pasti kebingungan jika terlalu banyak wacana.

Harus diakui, wacana penggantian Unas menjadi enas sangat positif sepanjang digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan. Tapi, jika masih dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam penentuan kelulusan, ujian itu akan tetap menjadi beban bagi siswa. Bahkan, beban itu tidak hanya dirasakan siswa, melainkan juga orang tua, guru, dan kepala sekolah. Sebab, tingkat kelulusan siswa selalu dijadikan alat untuk membangun citra sekolah.

Yang menarik, unas juga menjadi perhatian pejabat publik seperti presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan pimpinan dinas pendidikan. Mereka menaruh perhatian karena tingkat keberhasilan unas dapat digunakan sebagai alat pencitraan. Karena itu, banyak kepala daerah yang memerintahkan kepada dinas pendidikan untuk meningkatkan kelulusan siswa. Kepala dinas pendidikan pun memerintahkan kepala sekolah untuk menyukseskan Unas. Perintah dinas pendidikan itu ditindaklanjuti kepala sekolah dengan membentuk tim sukses Unas. Bermula dari sanalah berbagai kasus ketidakjujuran terjadi menyertai unas.

Rasanya, Mendikbud penting untuk diingatkan bahwa unas adalah produk politik. Unas merupakan kesepakatan politik pemerintah dan pihak legislatif sehingga harus dilaksanakan. Alokasi biaya untuk Unas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga disiapkan setiap tahun. Alasan itulah yang selalu dikemukakan pemerintah saat merespons tuntutan penghapusan unas.

Karena merupakan produk politik, untuk menghapus Unas, pasti dibutuhkan lobi-lobi politik. Pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi pasti kehilangan jika program yang menyedot anggaran ratusan miliar itu dihapus. Di tengah problem politik itulah, keputusan Mendikbud untuk merevitalisasi fungsi Unas layak diapresiasi. Kini tantangan Mendikbud adalah meyakinkan presiden, wakil presiden, pihak legislatif, dan dinas pendidikan bahwa revitalisasi fungsi Unas merupakan langkah terbaik demi masa depan pendidikan nasional.

Sumber Tulisan

BAB I

Menyoal Moralitas Bangsa

1. Buta Aksara Moral (*Seputar Indonesia*, 11 Februari 2014)
2. Meluruskan Kiblat Bangsa (*Seputar Indonesia*, 31 Mei 2014)
3. Bergaji Tinggi tapi Korupsi (*Seputar Indonesia*, 2 November 2013)
4. Plagiarisme dan Moral Keilmuan (*Seputar Indonesia*, 23 Februari 2014)
5. Intelektual dan Kekuasaan (*Seputar Indonesia*, 5 Desember 2012)
6. Susahnya Menjadi Bangsa yang Jujur (*Majalah Matan*, September 2013)
7. Saat Akil (Makan) Kemaruk (*Seputar Indonesia*, 18 Januari 2014)
8. Romli *Effect* untuk Integritas Kemenag (*Jawa Pos*, 11 Desember 2013)

9. Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan (*Seputar Indonesia*, 24 Desember 2012)
10. Cendekiawan Pejuang Antikorupsi (*Seputar Indonesia*, 14 November 2013)
11. Mendengar Koreksi RUU Ormas (*Jawa Pos*, 4 April 2013)
12. Memperkuat Pilar *Civil Society* (*Seputar Indonesia*, 10 Oktober 2014)

BAB II

Beragama Minus Kesalehan

1. Memoderasi Pemikiran Islam (*Seputar Indonesia*, 19 April 2013)
2. Berdamai Dengan Perbedaan (*Seputar Indonesia*, 29 Juni 2014)
3. Menjauhi Paradoks Ramadan (*Seputar Indonesia*, 8 Juli 2013)
4. Mudik ke Kampung Rohani (*Jawa Pos*, 6 Agustus 2013)
5. Haji, Laksana Pertunjukan Akbar (*Seputar Indonesia*, 12 Oktober 2013)
6. Berdakwah Seharusnya Nirkekerasan (*Seputar Indonesia*, 29 Juli 2013)
7. Mewaspada Virus ISIS (*Seputar Indonesia*, 4 Agustus 2014)
8. Kampus dan Deradikalisasi (*Seputar Indonesia*, 3 September 2014)
9. Start Surabaya Bebas Prostitusi (*Jawa Pos*, 21 Desember 2012)
10. Amal Intelektualisme Buya Syafi'i (*Jawa Pos*, 29 Mei 2013)
11. Menumbuhkan Kesadaran Multikulturalisme (*Seputar Indonesia*, 30 Mei 2013)
12. Oase Gerakan Filantropi (*Seputar Indonesia*, 15 Mei 2014)

BAB III

Moralitas Dalam Berpolitik

1. Tatkala Ulama Terbelah (*Majalah Matan*, September 2014)
2. Imajinasi Politik Islam (*Jawa Pos*, 18 Maret 2014)
3. Kisruh PPP dan Masa Depan Partai Islam (*Jawa Pos*, 15 September 2014)
4. Budaya Plutokrasi (*Jawa Pos*, 26 Agustus 2013)

5. Politik Dinasti dan Kisah Adam (*Jawa Pos*, 21 Februari 2014)
6. Bangun Koalisi Mengusung Figur Alternatif (*Seputar Indonesia*, 19 April 2014)
7. Tiada Lawan Abadi dalam Politik (*Seputar Indonesia*, 16 Agustus 2014)
8. Budaya Kontrak Politik (*Seputar Indonesia*, 3 Mei 2014)
9. Kaum Muda dan Siklus 20 Tahunan (*Seputar Indonesia*, 8 April 2014)
10. Selamatkan Peradaban Mesir (*Seputar Indonesia*, 31 Agustus 2013)
11. Akhlak Pemimpin Publik (*Seputar Indonesia*, 20 September 2014)
12. Hijrah Dari Pencitraan ke Kerja (*Seputar Indonesia*, 25 Oktober 2014)
13. Spirit Kemandirian Muhammadiyah (*Seputar Indonesia*, 7 November 2014)
14. Dari Purifikasi Agama ke Purifikasi Sosial (*Jawa Pos*, 18 November 2014)
15. Meneguhkan Ideologi Muhammadiyah (*Seputar Indonesia*, 18 November 2014)

BAB IV

Meniscayakan Pendidikan Holistik

1. PR Pendidikan Nasional (*Seputar Indonesia*, 2 Januari 2014)
2. Kurikulum Baru dan Guru Inspiratif (*Majalah Matan*, Maret 2013)
3. Mengawal Start Kurikulum Kapal Nuh (*Jawa Pos*, 11 Juli 2013)
4. Mengevaluasi Implementasi Kurikulum (*Majalah Matan*, Januari 2014)
5. Menyongsong Ujian Nasional (*Seputar Indonesia*, 14 Maret 2014)
6. Menyoal Kredibilitas Unas (*Seputar Indonesia*, 21 Mei 2014)
7. Ganti Unas Dengan Penilaian Otentik (*Majalah Matan*, Juli 2013)
8. Urgensi Pendidikan Holistik (*Seputar Indonesia*, 3 Mei 2013)
9. Delapan Prinsip Pendidikan Holistik (*Majalah Matan*, Desember 2012)
10. Spirit Internasional tanpa RSBI (*Jawa Pos*, 11 Januari 2013)

11. Gejala Inden Sekolah dan *Best Process* (*Jawa Pos*, 20 Februari 2013)
12. Membangun Harapan Melalui Pendidikan (*Seputar Indonesia*, 5 Januari 2013)
13. Selamatkan Buah Hati Kita (*Majalah Matan*, November 2014)
14. Spirit Multikulturalisme Piala Dunia (*Seputar Indonesia*, 14 Juni 2014).
15. Harapan Untuk Kementerian Ristek dan Dikti (*Jawa Pos*, 5 November 2014)
16. Memuliakan Profesi Guru (*Seputar Indonesia*, 6 Desember 2014)
17. Revitalisasi Fungsi Unas (*Jawa Pos*, 31 Desember 2014)

Biodata Penulis



Dr. Biyanto, M.Ag. lahir pada 10 Oktober 1972 di Desa Gampang Sejati, Laren, Lamongan. Pendidikan dasar ditempuh di MI Hidayatul Ummah Gampang Sejati (lulus 1983) dan SDN Gampang Sejati (lulus 1985). Melanjutkan pendidikan menengah di SMPN Laren (lulus 1988), dan SMAN Paciran (lulus 1991). Pernah belajar mengaji di Pesantren Al-Fatah, Siman, Lamongan (1983) dan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran (1989-1991). Menyelesaikan S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (1991-1995), S2 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (1996-1998), dan S3 dengan predikat *Cumlaude* di IAIN Sunan Ampel (2005-2008).

Sejak mahasiswa aktif dalam dunia pergerakan. Pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Korkom IAIN Sunan Ampel (1994-1995). Pada periode 2005-2010 dipercaya menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

(Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Periode berikutnya, 2010-2015, dipercaya sebagai Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur. Disamping itu, juga menjadi anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M, periode 2012-2017). Sejak 2010 hingga kini juga tercatat sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Sejak tahun 1996 hingga sekarang, tercatat sebagai pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel. Juga tercatat sebagai pengajar di Universitas Widya Kartika (2007-sekarang), Institut Informatika Indonesia (2008-sekarang), Pascasarjana UIN Sunan Ampel (2010-sekarang), Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2010-sekarang), dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2009-sekarang). Pernah menjadi anggota Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian UIN Sunan Ampel (1999-2006), Ketua Laboratorium Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel (2002-2005), dan Ketua Program Studi Politik Islam di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel (2005-2010). Pada tahun 2007 memperoleh predikat Dosen Teladan UIN Sunan Ampel.

Karya tulis yang telah terpublikasikan diantaranya adalah *Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibn Khaldun* (2004), *Pergumulan Tokoh Muhammadiyah Menuju Sufi: Catatan Pemikiran Abdurrahim Nur* (bersama A. Fatichuddin & Sufyanto, 2003), *Menembus Benteng Tradisi* (kontributor, 2005), *Resolusi Konflik Islam Indonesia* (kontributor, 2007), *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme* (kontributor dan penyunting, 2007), *Penegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (kontributor, 2008), *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (2009), *Ritual yang Terbelah* (2012), *Mewujudkan Pendidikan Unggul* (2012), dan *The Role of Educators & Students in Building Integrity* (kontributor, 2013)

Beberapa artikel untuk Jurnal Ilmiah juga pernah dimuat di *Paramedia*, *Qualita Ahsana*, *Istiqro'*, *Ijtima'*, *Akademika*, *Islamica*, *al-Afkar*, *Teosofi*, *Salam*, *Lektur*, *Al-Buhuts*, *Tamadun*, *Journal of Indonesian Islam*, dan *Jurnal Penelitian Keislaman*. Selain itu, juga aktif menulis opini di berbagai media massa: *Jawa Pos*, *Seputar Indonesia* (Sindo), *Kompas*, *Surya*, *Radar Surabaya*, *Surabaya Post*, *Suara Muhammadiyah*, dan *Majalah Matan*. Korespondensi dapat melalui email: mr_abien@yahoo.com